



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024 - 2026



DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2023



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jalan Tengkawang No.01 Telp. 275666 - 275777 - 276243
Fax. No. 276242 - 276245 Kotak Pos No. 107

SAMARINDA

Nomor : 600.1/2306/SEKT-PR-C
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Perihal : Penyampaian Ulang Dokumen
Rancangan Akhir RENSTRA 2024
- 2026

Samarinda, 11 Agustus 2023

Kepala

Yth. Kepala Bappeda Prov. Kaltim

Di

Samarinda

Sehubung dengan adanya Pemutakhiran indikator Sub kegiatan Prihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 2023 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bersama ini kami sampaikan kembali dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

A.M Fitra Firmanda, ST, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197404052000031004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jalan Tengkwang No.01 Telp. 275666 - 275777 - 276243
Fax. No. 276242 - 276245 Kotak Pos No. 107

SAMARINDA

Samarinda, 22 Mei 2023

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Perihal : **Penyampaian Dokumen**
Rancangan Akhir RENSTRA
2024-2026

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Prov. Kaltim

di
Samarinda

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0378/B.PPEPD-Bapp/2023 Tentang : Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Bersama ini kami sampaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

A.M Fitra Firnanda, ST, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197404052000031004

KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dilakukan karena mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya penyesuaian dengan kebijakan nasional maupun provinsi Seperti di ketahui salah satu fokus Penyusunan Perubahan Renstra Provinsi Kalimantan Timur ini dikarenakan pada saat yang bersamaan dilakukan pula perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang secara linier mengharuskan disusunnya perubahan Renstra DPUPR-PERA ini. Selain itu ,adanya pengalihan ibu kota Negara sebagian wilayah di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tentu menjadi prioritas dalam melakukan perubahan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Perubahan Renstra DPUPR-PERA tahun 2024-2026 diharapkan memberikan arahan untuk mewujudkan visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan nasional yakni menyejahterakan rakyat.

Besar harapan kami agar penyusunan dokumen Perubahan Renstra DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat sebagai upaya dalam mendorong peningkatan kinerja daerah dan perbaikan pembangunan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat beserta pemerataannya di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat



A.M Fitra Firmanda, ST. MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR TABEL		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan	90
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	91
	3.1. Permasalahan	91
	3.2. Isu Strategis	95
	3.3. Telaahan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara	95
	3.4. Telaahan Isu Strategis Daerah Dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026	99
	3.5. Penetapan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 - 2026	100
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	102
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPR-PERA	102
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	106
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	106
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	108
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN GURUSAN	176
BAB VIII	PENUTUP	222
	8.1. Kesimpulan	222
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	223

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD Tahun 2024 - 2026	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Substansi Renstra PD dengan RPD dan Renja PD	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas PUPR – PERA Provinsi Kalimantan Timur	22
Gambar 2.2	Rekapitulasi Kinerja Jalan Provinsi	37
Gambar 2.3	Gambar Persentase Non Revenue Water (NRW) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2020 (%)	46
Gambar 2.4	Kondisi Eksisting Profil OPD Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	76
Gambar 2.5	Persentase Jumlah Tenaga Ahli dan Jumlah Tenaga Terampil Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2022	79
Gambar 2.6	Jumlah Tenaga Ahli dan Petugas K3 Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	80
Gambar 2.7	Ketersediaan Instruktur / Assessor di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2021	81
Gambar 2.8	Jumlah Sertifikat Badan Usaha (SBU) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	82
Gambar 2.9	Gambar Klasifikasi dan Kualifikasi BUJK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	82
Gambar 2.10	Persentase IUJK Ke Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2020	86
Gambar 3.1	Peta Wilayah Ibu Kota Nusantara	96

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Data Pegawai Pejabat Eselon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	23
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021	23
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	24
Tabel 2.4	Data Dinas PUPR – PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022	26
Tabel 2.5	Tingkat Capaian Kinerja Dinas PUPR – PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 -2022	32
Tabel 2.6	Capaian Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022	34
Tabel 2.7	Rekapitulasi Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi	38
Tabel 2.8	Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (km)	39
Tabel 2.9	Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (km)	39
Tabel 2.10	Panjang Jalan Berdasarkan Material (Negara + Prov + Kab/ Kota) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022	40
Tabel 2.11	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi dan Fasilitas di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022	41
Tabel 2.12	Pembanguna Sarana Jembatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 -2022	41
Tabel 2.13	Pembangunan Turap di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022	42
Tabel 2.14	Penduduk Terlayani Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022	43
Tabel 2.15	Jumlah PDAM di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2021	44
Tabel 2.16	Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	45
Tabel 2.17	Perumahan Berdasarkan Fasilitas Sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018- 2021	46
Tabel 2.18	Sebarkan Lokasi TPA dan Sistem Operasional di Provinsi Kalimantan Timur	47
Tabel 2.19	Luas Area Permukiman Tertata di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022	48
Tabel 2.20	Luas Kawasan Permukiman Eksistensi dan luas kawasan peruntukan permukiman di provinsi Kalimantan Timur (Ha)	48
Tabel 2.21	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi	50

Tabel 2.22	PSU Terbangun di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022	51
Tabel 2.23	Kondisi Sawah Eksisting di Provinsi Kalimantan Timur	52
Tabel 2.24	Kondisi Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur	52
Tabel 2.25	Kondisi Daerah Irigasi Rawa di Provinsi Kalimantan Timur	54
Tabel 2.26	Neraca Air Baku Tanpa Pengembangan (1t/dtk)	55
Tabel 2.27	Kapasitas Air Baku, Cakupan Layanan Air Minum dan Persentase Penyediaan air Baku Kawasan Industri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022	56
Tabel 2.28	Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur	57
Tabel 2.29	Data Pengaman Pantai di Provinsi Kalimantan Timur	61
Tabe 2.30	SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2016 - 2020	62
Tabel 2.31	Perhitungan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	63
Tabel 2.32	Progres Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten/ Kota	65
Tabel 2.33	Proses Revisi RTRW Kabupaten/Kota	68
Tabel 2.34	Skor Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	70
Tabel 2.35	Jumlah Tenaga Ahli dan Terampil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022	77
Tabel 2.36	Laporan Sertifikat Keterampilan dan Keahlian LPJKP Kalimantan Timur Tahun 2018	78
Tabel 2.37	Skor Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	84
Tabel 2.38	Hasil Monitoring IUJK ke Kabupaten / Kota di provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2020	85
Tabel 2.39	Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Dinas PUPR – PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 -2022	86
Tabel 2.40	Target dan Realisasi Anggaran Program Dinas PUPR – PERA Provinsi Kalmantan Timur Tahun 2019 - 2022	87
Tabel 3.1	Permasalahan Daerah dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026 Terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	92
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Perangkat Daerah	92
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026	105
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026	106
Tabel 6.1	Rencana Kegiatan dan Kegiatan DPUPR PERA 2024 - 2026	111

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026	177
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026	178

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

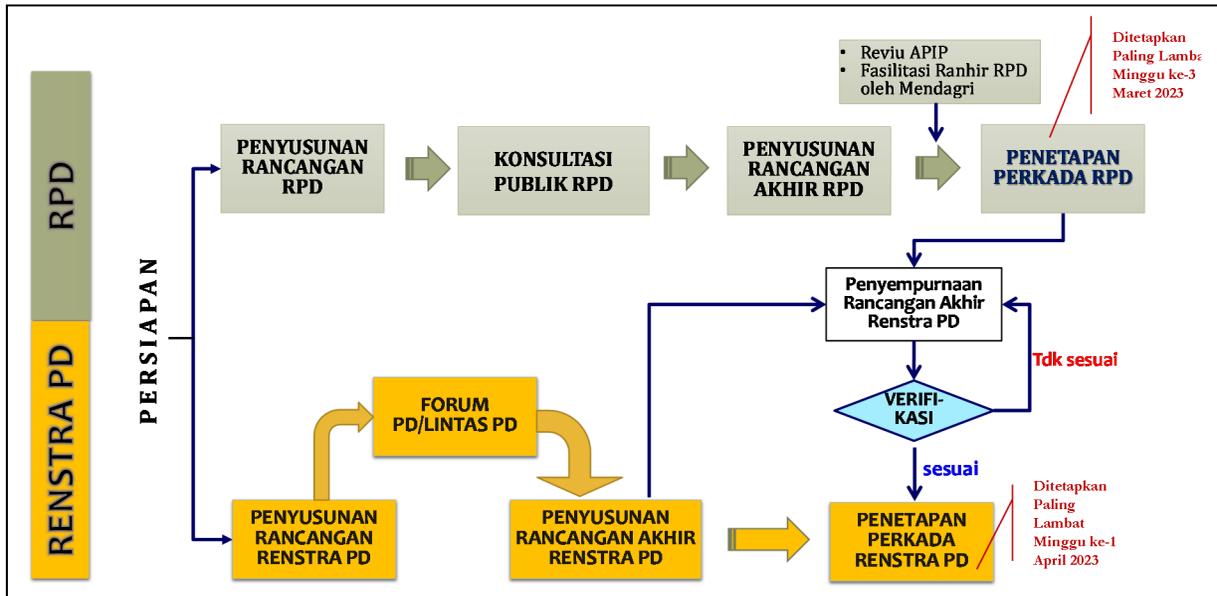
Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai Pilkada serentak pada tahun 2024. Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama tertentu. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, khususnya pada tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, meliputi: Persiapan, Penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan

Akhir, dan Penetapan. Pelaksanaan tahapan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, maupun perangkat daerah di kabupaten/kota yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta berbagai pihak non pemerintahan.

Gambar 1.1.



Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD Tahun 2024-2026

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat disusun berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Substansi Renstra PD disusun selaras dengan substansi RPD, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi dinas. Selanjutnya, Renstra PD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun. Rencana kerja yang dimuat dalam Renstra perangkat daerah dilaksanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2024, 2025 dan 2026 untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah merupakan instrumen pengukuran dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan. Evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan informasi evaluasi hasil Renja PD setiap tahun.

Gambar 1.2.



Keterkaitan Substansi Renstra PD dengan RPD dan Renja PD

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan 3 (tiga) tahun sebagai pedoman kebijakan pembangunan terkait tugas dan fungsi PUPRPR Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Menjadi acuan kerja bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2024 sampai 2026;
 3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
 4. Sebagai bahan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat selama periode tahun 2024-2026; dan
 5. Sebagai pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yakni terdiri dari 8 (delapan) bab. Sistematika dokumen dimaksud sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum bab pendahuluan berisi tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dengan isi sub-bab sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, serta sumber daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari sumber daya

manusia dan aset/modal yang dimiliki untuk menunjang kinerja perangkat daerah. Dalam bab ini juga diuraikan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, kelompok sasaran layanan dinas, dengan isi sub-bab sebagai berikut:

2.1. Tugas, fungsi dan struktur PD

2.2. Sumber daya PD

2.3. Kinerja pelayanan PD

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang dipetakan berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Selain itu, dimuat juga isu-isu strategis dinas yang dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa isu internal maupun eksternal, dengan isi sub-bab sebagai berikut:

3.1. Permasalahan pelayanan PD

3.2. Isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta isu-isu strategis perangkat daerah. Selain itu, pada subbab ini dimuat juga cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikator masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas PUPRPR Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi uraian rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya selama periode

tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap penting untuk pelaksanaan Renstra PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun tugas dan fungsi Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keciptakarya;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina konstruksi;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Melihat fungsi dan tugas di atas, dalam pelaksanaan kinerjanya, Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh manajemen dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur ; Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman. Dalam menjalankan tugasnya, kepala dinas bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina marga;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang cipta karya;

- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina konstruksi;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris yakni:

- a. Subbagian Umum; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat
- b. Subbagian Perencanaan Program; mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

- c. Subbagian Keuangan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang sumber daya air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sumber daya air. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sumber daya air;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan sumber daya air;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis irigasi dan rawa;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sungai dan pantai; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sumber daya air membawahkan seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan SDA; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta perencanaan sumber daya air.
- b. Seksi Irigasi dan Rawa; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta pengaturan irigasi dan rawa.
- c. Seksi Sungai dan Pantai; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan sungai dan pantai.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugasnya yakni melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang bina marga melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina marga;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang bina marga;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan bina marga;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jalan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jembatan dan bangunan pelengkap; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yakni:

- a. Seksi Perencanaan Bina Marga; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta perencanaan bina marga.
- b. Seksi Jalan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian jalan.
- c. Seksi Jembatan dan bangunan Pelengkap; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian jembatan dan bangunan pelengkap.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang cipta karya. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang cipta karya;

- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang cipta karya;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan cipta karya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tata bangunan dan lingkungan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyehatan lingkungan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yaitu:

- a. Seksi Perencanaan Cipta Karya; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta perencanaan cipta karya.
- b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan.
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman

6. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bina konstruksi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina konstruksi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang bina konstruksi;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengkajian usaha jasa konstruksi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan informasi dan jasa;

- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian mutu; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Konstruksi membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yaitu:

- a. Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengkajian usaha jasa konstruksi.
- b. Seksi Pemberdayaan Informasi dan Jasa; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemberdayaan informasi dan jasa.
- c. Seksi Pengendalian Mutu; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian mutu

Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan:

- a. Fungsi Pengaturan
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi.
- b. Fungsi Pemberdayaan
Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi
- c. fungsi pengawasan
Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Berdasarkan struktur, kelembagaan, dan pembagian tugas/fungsi tersebut di atas maka saat ini surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur ditujukan kepada Nomor : 065.4/1291/BIKON Tanggal 19 April 2022 perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur pada Bidang Bina Konstruksi, terkait proses perubahan nomenklatur seksi-seksi pada Bidang Bina Konstruksi:

- a. Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi diusulkan menjadi Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
- b. Seksi Pengendalian Mutu diusulkan menjadi Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang penataan ruang dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang penataan ruang;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan tata ruang;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yakni:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan tata ruang.
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah.
- c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perumahan dan permukiman dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perumahan dan permukiman;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan perumahan dan permukiman;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perumahan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kawasan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yakni:

- a. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan perumahan dan permukiman.
- b. Seksi Perumahan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perumahan.
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur yang

pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerjanya diatur Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

a. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya serta melaksanakan urusan penatausahaan. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- 4) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 5) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d) Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya

- e) Kelompok Jabatan Fungsional

b. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengujian mutu dan standardisasi konstruksi serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program kegiatan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 4) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A, terdiri dari:

- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian
- d. Seksi Standardisasi Konstruksi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

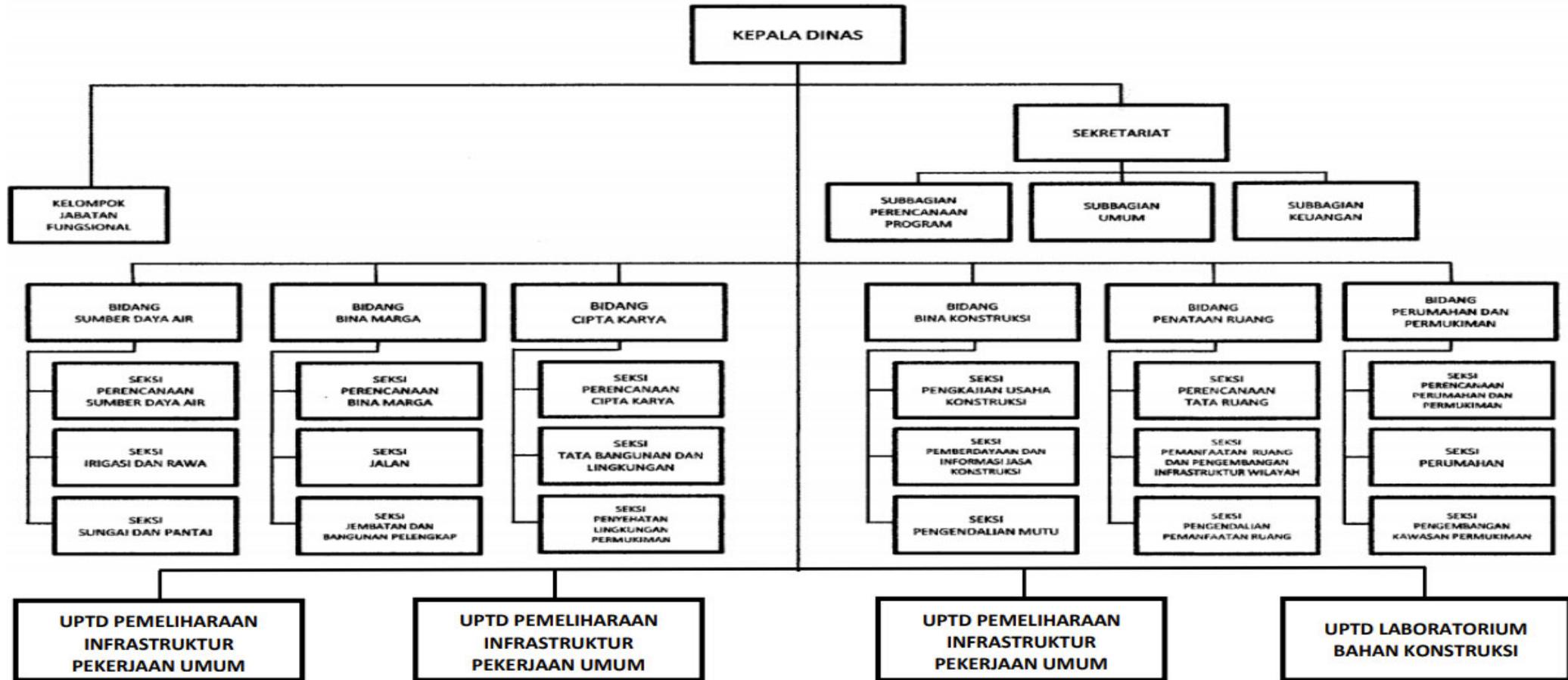
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya di mana tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya manusia per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 313 orang yang diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data pejabat struktural Tahun 2022.

Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Data Pegawai Pejabat Eselon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	8	1	9
3.	Eselon IV	20	5	25
4.	Fungsional	11	8	19
5.	Pelaksana	191	68	259
TOTAL		231	82	313

Sumber: Data kepegawaian DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021

BIDANG.	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
Sekretariat	1	40	37	3
Penataan Ruang	-	-	8	1
Bina Konstruksi	-	2	6	2
Sumber Daya Air	1	3	10	3
Bina Marga	1	14	28	3
Cipta Karya	1	3	11	1
Perumahan dan Permukiman	0	2	12	2
UPTD Lab Bahan Konstruksi	-	7	14	2
UPTD Wilayah I	-	17	15	3
UPTD Wilayah II	4	16	7	3
UPTD Wilayah III	3	13	12	2
JUMLAH	11	117	160	25
TOTAL PNS 313 ORANG				

Tabel 2.3.**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021**

BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN							
	SD	SLTP	SLTA	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3
Sekretariat	2	4	45	4	2	19	5	-
Penataan Ruang	-	-	-	1	-	4	4	-
Bina Konstruksi	-	-	2	-	-	6	2	-
Sumber Daya Air	-	1	5	1	-	6	4	-
Bina Marga	1	-	16	4	2	15	8	-
Cipta Karya	1	1	4	1	-	6	13	-
Perumahan dan Permukiman	-	-	2	1	-	9	4	-
UPTD Lab Bahan Konstruksi	-	-	8	1	1	9	4	-
UPTD Wilayah I	-	2	17	2	-	10	4	-
UPTD Wilayah II	2	2	15	1	-	6	4	-
UPTD Wilayah III	5	3	11	3	-	4	4	-
TOTAL	11	13	125	19	5	94	46	-
TOTAL PNS 313 ORANG								

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur didukung pula dengan sarana prasarana penunjang dalam mencapai tujuan organisasi di antaranya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Kantor Dinas, 3 (tiga) unit Kantor UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 1 (satu) unit Kantor UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
 - ✓ UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I berlokasi di Kota Balikpapan untuk melayani Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Paser.
 - ✓ UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II berlokasi di Kota Samarinda untuk melayani Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahulu.
 - ✓ UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III berlokasi di Kabupaten Berau untuk melayani Kabupaten Berau,

Kutim dan Bontang.

- ✓ UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi berlokasi di Kota Samarinda untuk melayani 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- b. Alat-alat berat yang dioperasikan oleh masing-masing UPTD Pemeliharaan Infrastruktur, di antaranya :
- ✓ UPTD Wilayah I : 3 unit excavator (2 mini exca, 1 exca 330), 1 unit loader, 1 unit grader, 1 unit truck crane (low power), 1 vibrator roller (4 ton), 1 compaktor sakai, 7 unit Dump Truck, 1 unit Vibrator Roller Bomag 8 Ton, 1 unit Backhoe Loader Case, 1 unit Pc 200-8, 1 unit Cutter, 1 unit Chain Saw Besar, 1 unit Chain Saw Kecil, 1 unit Tronton, 2 unit Stamper Strika, 3 unit Stamper Kodok, 2 unit Exavator, 1 unit Baby Roller, 2 unit Loader, 2 unit Grader.
 - ✓ UPTD Wilayah II : 2 unit Excavator, 4 unit Mini Excavator, 2 unit Motor Grader, 4 unit Vibrator Roller, 2 unit Backhoe Loader, 1 unit Tronton, 9 unit Dump Truck, 1 unit Traktor, 1 unit Dozer.
 - ✓ UPTD Wilayah III : 6 unit Motor Grader, 1 unit Aspal Equipment, 3 unit WHEEL Excavator, 5 unit Excavator, 3 unit Vibrator Roller, 10 unit Dump Truck, 1 unit Concrete Breaker, 4 unit Cutter, 1 unit Compressor, 1 unit Motor Grader, 1 unit Backhoe Loader, 1 unit Baby Roller, 1 unit Self Loader Truck, 4 unit Mesin Pemotong Rumput, 3 unit Stamper, 3 unit Pemotong Aspal, 1 unit AMP Mobile, 5 unit Genset, 1 unit Excavator Mini, 1 unit Crane Truck, 1 unit Asphal Mixing Plant, 1 Unit Tandam Roller (Bomag), 1 Unit Wheel Loader, 1 Unit Self Loader (Tronton)
- c. 33 unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 103 unit Kendaraan Dinas Roda Dua

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari perkembangan daerah. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemajuan wilayah.

Perkembangan kinerja dinas dapat dilihat dari data dan informasi dinas selama beberapa tahun terakhir. Data dinas mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan ada sebagian kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat juga beberapa yang mengalami penurunan. Beberapa kondisi layanan dinas yang memerlukan perhatian yaitu panjang jalan provinsi jalan baik, persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor, luas area permukiman tertata, dan persentase luas pemukiman yang tertata. Data kinerja dinas secara rinci mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 dimuat pada tabel di bawah. Terdapat tahun tertentu yang tidak memiliki data capaian antara lain disebabkan adanya perubahan dokumen perencanaan atau kebijakan pemerintah pusat.

Tabel 2.4.

**Data Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Provinsi	Km	895,09	895,09	895,09	895,09
2	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	61,45	69,77	75,20	77,52
2	Rasio jumlah panjang jalan per jumlah penduduk	Persen	0,43	0,43	0,42	0,41
3	Panjang Jalan Provinsi	Km	895,09	895,09	895,09	895,09
	a. Jalan Baik	Km	93,74	408,38	257,03	284,86
	b. Jalan Sedang	Km	456,27	216,10	389,26	408,99
	c. Jalan Rusak	Km	195,12	101,48	126,94	104,82

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
	d. Jalan Rusak Berat	Km	149,96	169,13	121,87	96,42
4	Ketersediaan Jalan Tol	Km	64,87	64,87	99,35	99,35
4	Panjang Jembatan	Meter	32709,97	33473,97	33548,97	33548,97
5	Jumlah Jembatan	Unit	2406,00	3170,00	3173,00	3173,00
6	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi					
	a. Arteri	Km	326,22	326,22	326,22	326,22
	b. Kolektor	Km	3935,91	3935,91	3935,91	3935,91
	c. Jalan Lokal	Km	4061,59	4061,59	4061,59	4061,59
	d. Jalan Lingkungan	Km	1793,58	1793,58	1793,58	1793,58
7	Panjang jalan yang memiliki fasilitas					
	a. Trotoar	Km	18,33	18,33	18,33	18,33
	b. Drainase	Km	609,57	609,57	635,28	637,90
	c. Trotoar dan Drainase	Km	627,90	627,90	653,61	656,23
	d. Sempadan Jalan	Km	870,82	870,82	870,82	870,82
8	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 ton	%	20,15	20,15	27,83	27,83
9	Panjang Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Km	0,34	0,34	0,64	0,64
10	Panjang Wilayah Rawan Longsor	Km	2,00	2,00	3,00	3,00
11	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	16,80	16,80	21,40	21,40
12	Sisa luas area permukiman kumuh tertata	Ha	1525.47	1287.82	1190.14	1185.14
13	Luas Area Permukiman Kumuh Keseluruhan	Ha	2636.28	2636.28	2636.28	2636.28
14	Pengurangan Luas kawasan kumuh Yang Tertata	%	42.14	51.15	54.83	55.02
15	Prasarana Irigasi/Pengairan					
	a. Non Teknis	m	852203,06	852203,06	852203,06	852203,06
	b. Teknis	m	992089,33	992089,33	992089,33	992089,33
	c. Luas Irigasi	Ha	6949,37	6949,37	6949,37	6949,37
	d. Rasio Irigasi	%	39,40	39,40	39,40	39,40
	e. Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	19,18	19,18	19,18	19,18
	f. Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	Ha	1332,83	1332,83	1332,83	1332,83
	g. Luas Lahan Budidaya	Ha	5476,70	5476,70	5476,70	5476,70

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
	h. Luas Lahan Pertanian Yang Terlayani Jaringan Irigasi dan Pengairan	Ha	4278,37	4278,37	13878,50	13878,50
16	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi					
	a. Pasok Air Irigasi	lt/dtk	150,00	150,00	150,00	150,00
	b. Luas Lahan Terairi	Ha	38942,57	38942,57	38942,57	38942,57
	c. Pasok Irigasi Total	lt/dtk	120,00	120,00	120,00	120,00
	e. Rancangan Luas Areal	Ha	11491,00	1149,00	1149,00	1149,00
17	Jumlah PDAM	Unit	9	9	9	9
18	Luas Kawasan Pemukiman	Ha	396299,13	396299,13	396266,13	396266,13
19	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	396266,00	7274,48	7274,48	7274,48
20	Luas Rencana Peruntukan Lahan	Ha	14326,85	12808603,82	12808603,82	12808603,82
21	Realisasi RTRW	%	78,35	47,73	47,73	47,73
22	Luas Lahan Produktif	Ha	n/a	6090518,21	6090518,21	6090518,21
23	Luas Lahan Kritis	Ha	n/a	11070432,46	11070432,46	11070432,46
24	Luas Lahan Hutan Rakyat	Ha	7643,98	587,63	587,63	587,63
25	Luas Wilayah Budidaya	Ha	10395026,00	n/a	n/a	n/a
26	Luas Kawasan Lindung	Ha	2283360,00	1820425,78	1820425,78	1820425,78
27	Luas Kawasan Industri	Ha	32887,00	36386,44	36386,44	36386,44
28	Skor penyelenggaraan tata ruang	%	66,68	66,46	n/a	n/a
29	Jumlah Luas Wilayah Kekeringan	Ha	n/a	1765744,77	1765744,77	1765744,77
30	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan	Ha	4338233,00	n/a	n/a	n/a
31	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	%	7835,00	4773,00	4773,00	4773,00
32	Persentase Luas Wilayah Produktif	%	0,00	609051821,00	609051821,00	609051821,00
33	Persentase Luas Wilayah Industri	%	0,32	3638644,00	3638644,00	3638644,00
34	Persentase Luas Wilayah Kekeringan	%	0,00	176574477,00	176574477,00	176574477,00
35	Air Baku					
	a. Kapasitas air baku	lt/dtk	7,00	7922,00	8400,00	8400,00
	b. Cakupan Layanan Air Minum	%	56,84	64,53	70,78	78,00
	c. Persentase Penyediaan air baku kawasan industri	%	13,79	13,79	13,79	13,79
36	Rumah Layak Huni	Unit	16127,00	20497,00	25467,00	27972,00

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
37	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1278,48	1278,48	1278,48	1278,48
38	Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan	%	54,59	62,64	67,48	69,67
39	Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	Orang	6.344	4.902	2.579	3.840
40	Presentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	%	64,87	70,11	70,11	70,11
41	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik di Wilayah I	%	52,00	58,00	65,00	65,00
42	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik di Wilayah II	%	52,00	58,00	63,00	63,00
43	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik di Wilayah III	%	52,00	58,00	60,00	60,00
44	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	73.481	72.881	71.781	70.811
45	Luas Genangan Banjir Perkotaan	Ha	664,20	641,00	477,00	400,00
46	Indikator SDGs (PUPR):					
a	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Kabupaten/Kota (Skala Kota)	7,00	7,00	7,00	7,00
b	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	2,58	2,72	2,73	4,71
c	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kabupaten/Kota	8,00	9,00	9,00	9,00
d	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	Rencana	4,00	4,00	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
	(RTRW)					
e	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Wilayah Sungai	1,00	2,00	n/a	n/a
f	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Wilayah Sungai	1,00	4,00	n/a	n/a
g	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Lembaga	2,00	4,00	n/a	n/a
h	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DAS	4,00	4,00	n/a	n/a
i	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DAS	4,00	4,00	n/a	n/a
47	Indikator SDGs (Perkim):					
a	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	56,84	64,53	70,78	78,00
b	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	41,75	47,40	n/a	n/a
c	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	80,89	80,89	79,85	81,79
d	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa / Kelurahan	83,00	83,00	n/a	n/a
e	Jumlah	Desa /	54,00	54,00	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
	desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Kelurahan				
f	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%	1,60	1,62	1,65	1,86
g	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/dt	7,92	8,40	8,40	8,40

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id, diolah

Berbagai upaya dan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019 sampai 2022 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja Dinas PUPR-PERA. Target dan realisasi indikator kinerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas PUPR-PERA dapat dilihat di tabel di bawah. Pada tahun tertentu terdapat indikator kinerja yang tidak lagi digunakan atau sebaliknya, terdapat indikator kinerja baru. Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat dalam periode pelaksanaan Renstra PD dan adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra pada tahun 2021.

Tabel 2.5.

Tingkat Capaian Kinerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

N O	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET					REALISASI					TINGKAT CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi	Kawasan	2	3				2	5				100,00	166,67			
2	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	29,41	57,65	78,82	94,12	100,00	29,41	57,65	78,82	94,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase peluang kerja bagi masyarakat jasa konstruksi	%	25,00	28,00	31,29	33,27	36,06	25,88	28,55	34,36	36,51		104	92	109,81	109,7	
4	Cakupan layanan air minum	%	62,00	64,53	66,53	68,53	70,53	62,23	70,08	70,78	78,00	78,50	100	108,6	106,3	113,8	111,3
5	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1525,47	1287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82	1525,47	1287,82	1.190,14	1.185,14		100	100	195,36	102,68	
6	Luas lahan pertanian yang beririgasi	Ha	14.008,50	14.808,50	14.028,50	14.278,50	14.778,50	13.378,11	14.958,50	14.078,50	14.278,50		95,50	101,01	100,36	100	
7	Luas genangan banjir perkotaan	Ha	664	575	420	374	329	641	411	406,3	318,9		96,54	71,48	96,74	117,28	
8	Panjang pantai kritis	Km	12.933	11.733				12.966	11.738				100,26	100,04			
9	Skor penyelenggara	%	66,68	69,01	75,94	76,74	83,1	66,46	66,46	75,38	78,57		99,67	96,30	99,26	102,38	

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					TINGKAT CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	aan penataan ruang																
10	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan	Kawasan			4	5	7			4	5				100,00	100,00	
11	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%			75,02	76,15	78,27			75,20	77,52				100,24	101,79	
12	Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	%	n/a*	n/a*	81,45	95,16	100	n/a*	n/a*	81,45	95,16	100	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00
13	Capaian akses air minum layak	%	62,00	64,53	66,53	68,53	70,53	62,23	70,08	70,78	78,00	78,50	100	108,6	106,3	113,8	111,3
14	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%			31,29	33,27				33	36,51				105,5	109,74	

Sumber: LKjIP Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 diolah

Keterangan:

*) Target Gedung dan Bangunan Lingkungan belum bisa teridentifikasi menjadi 1 indikator target, karena pada periode 2019-2020 masih terpisah ke dalam 2 (dua) indikator di 2 program

Dari data realisasi di atas, terlihat bahwa pencapaian indikator kinerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 terdapat 3 indikator kinerja pencapaiannya melebihi 100 persen, dan 4 indikator kinerja yang mencapai 100 persen. Di tahun 2020, terdapat 6 indikator kinerja pencapaiannya melebihi 100 persen, dan 1 indikator kinerja yang mencapai 100 persen. Untuk tahun 2021, terdapat 5 indikator kinerja pencapaiannya melebihi 100 persen, dan 3 indikator kinerja yang mencapai 100 persen. Untuk tahun 2022, terdapat 3 indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi 100 persen, dan 3 indikator kinerja yang mencapai 100 persen. Trend capaian ini kemudian diprediksi akan sama di tahun 2023. Cukup baiknya tingkat capaian kinerja tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan kinerja setiap unsur/bidang Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur.

Gambaran kinerja umum per bidang Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur akan diuraikan sebagai berikut.

A. Bidang Bina Marga

Ketersediaan infrastruktur, sebagaimana diketahui bersama, sangat berpengaruh terhadap daya saing daerah. Hal ini karena tingkat daya saing diukur dari ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi daerah. Kinerja pelayanan infrastruktur dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memerhatikan beberapa indikator utama seperti kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur: konektivitas jalan dan jembatan, Sumber Daya Air, bangunan, perumahan dan permukiman, jasa konstruksi serta penataan ruang terkait ketersediaan air baku dan air bersih, jaringan irigasi, dan perumahan. Kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.6.

Capaian Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

No.	Urusan/Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7,00	7.922	8400,00	8400,00
2	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	54,59	62,64	67,48	69,67
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	46722,00	42352,00	41152,00	41152,00

No.	Urusan/Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
4	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	64,87	70,11	70,11	70,11

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

Kinerja pelayanan jalan dan jembatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu ketersediaan jaringan jalan dan kualitas jalan. Dalam konteks ini, kedua aspek tersebut belum dipenuhi secara baik di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan jaringan jalan Provinsi hingga tahun 2022 sesuai dengan SK Dinas PUPR-PERA yaitu sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap mencapai 77,52 persen.

Adapun konektivitas jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat - Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, konektivitas infrastruktur jalan di Kalimantan Timur masih belum optimal mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, terutama masih terbatasnya jaringan jalan dan prasarana perhubungan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Ketersediaan jalan provinsi dalam kondisi mantap juga belum mampu sepenuhnya mendukung konektivitas 8 (delapan) Kawasan Strategis Provinsi (Perda RTRW Kaltim No. 1 Tahun 2016) dan pusat produksi, kawasan industri, serta outlet pemasaran terkoneksi jaringan jalan. Ketersediaan jaringan jalan belum mampu menjangkau seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti:

- a. Kawasan industri pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Kawasan industri pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat;
- c. Kawasan Agropolitan Regional Kutai Timur.

Adapun KSP yang memiliki infrastruktur jalan yang cukup baik namun keterhubungan dengan kawasan sentra produksi masih belum optimal sehingga menjadi salah satu permasalahan dalam menarik investasi di kawasan KSP, seperti:

- a. Kawasan industri perdagangan dan jasa di Kota Samarinda;
- b. Kawasan industri manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- c. Kawasan industri oleochemical di Maloy, Kutai Timur.
- d. Kawasan industri petrokimia berbasis migas dan kondensat Bontang; dan
- e. Kawasan industri pertanian Paser, PPU.

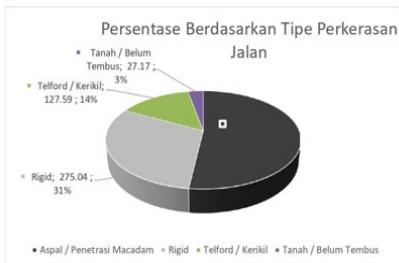
Infrastruktur jalan khususnya konektivitas wilayah dari dan ke kawasan industri yang merupakan KSP tersebut masih memiliki keterbatasan sehingga pengembangan KSP juga belum optimal khususnya dalam distribusi barang dan jasa, termasuk di dalamnya distribusi barang dari kawasan sentra produksi. Selain itu, kualitas jaringan jalan terbangun belum optimal yang dibuktikan dengan tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan.

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 284,86 km, kondisi sedang mencapai 408,99 km, kondisi rusak ringan mencapai 104,82 km, dan kondisi rusak berat mencapai 96,41 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.806,76 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 1.430,61 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 442,50 Km, kondisi sedang 988,11 Km, kondisi rusak ringan mencapai 278,01 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 98,14 Km.

Gambar 2.2. Rekapitulasi Kinerja Jalan Provinsi

REKAPITULASI PANJANG JALAN BERDASARKAN TIPE PERKERASAN

TIPE PERKERASAN	P (KM)	%
Aspal / Penetrasi Macadam	465.29	51.98%
Rigid	275.04	30.73%
Telford / Kerikil	127.59	14.25%
Tanah / Belum Tembus	27.17	3.04%
TOTAL PANJANG	895.09	



REKAPITULASI KONDISI JALAN

KONDISI JALAN	P (KM)	%
BAIK	284.86	31.83%
SEDANG	409.00	45.69%
RUSAK RINGAN	104.81	11.71%
RUSAK BERAT	96.42	10.77%
TOTAL PANJANG	895.09	



RAKAPITULASI KEMANTAPAN JALAN

KEMANTAPAN JALAN	P (KM)	%
MANTAP	693.86	77.52%
TIDAK MANTAP	201.23	22.48%
TOTAL PANJANG	895.09	



Tabel 2.7.
Rekapitulasi Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab. / Kota : KALIMANTAN TIMUR
Tahun : 2022

DD1

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kec. Yang dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (km)				Panjang Tiap Kondisi (%)								LHR Rerata	Akses Ke Jalan N / P / K	Ket.	
						Aspal / Penetrasi Macadam	Telford / Kerikil	Tanah / Belum Tembus	Rigid	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat					
										%	Km	%	Km	%	Km	%	Km				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	34 001 K	JL. BUNG TOMO (SAMARINDA SEBERANG)	Samarinda Seberang	2.20	10,6 - 15,4	0.10	0.00	0.00	2.10	9.09	0.20	86.38	1.90	4.55	0.10	0.00	0.00	-	N	-	
2	34 002 K	JL. SURYANATA (SAMARINDA)	Samarinda Ulu	9.16	7,3 - 18,6	3.33	0.00	0.00	5.83	10.98	1.01	79.19	7.25	8.73	0.80	1.09	0.10	-	N	-	
3	34 003 K	Jl. H.A.M. RIFADDIN (SAMARINDA SEBERANG)	Loa Janan Iir	7.34	9,1 - 20	0.00	0.00	0.00	7.34	30.52	2.24	69.48	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-	N	-	
4	34 004 K	JL. HARUN NAFSI (SAMARINDA SEBERANG)	Loa Janan Iir	4.80	8,8 - 14	0.00	0.00	0.00	4.80	12.50	0.60	77.29	3.71	10.21	0.49	0.00	0.00	-	P	-	
5	34 005 K	JL. APT. PRANOTO (SAMARINDA SEBERANG)	Samarinda Seberang / Loa Janan Iir	1.90	19,2	1.67	0.00	0.00	0.23	10.53	0.20	78.95	1.50	10.53	0.20	0.00	0.00	-	N	-	
6	34 006 K	JL. MOEIS HASAN (SAMARINDA SEBERANG)	Loa Janan Iir	2.36	20,1 - 24,3	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	100.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-	P	-	
7	34 007 K	JL. R. SOEPRAPTO (SAMARINDA)	Samarinda Ulu	1.10	14 - 14,5	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91	1.00	9.09	0.10	0.00	0.00	-	P	-	
8	34 008 K	JL. S. PARMAN (SAMARINDA)	Samarinda Ulu / Sungai Pinang	1.10	14,00	0.85	0.00	0.00	0.45	40.91	0.45	59.09	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-	P	-	
9	34 009 K	JL. AHMAD YANI (SAMARINDA)	Sungai Pinang	2.00	13,8 - 14,5	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1.70	15.00	0.30	0.00	0.00	-	P	-	
10	34 010 K	JL. TEUKU UMAR (SAMARINDA)	Sungai Kunjang	3.96	5,1 - 12,3	0.23	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	92.42	3.66	7.58	0.30	0.00	0.00	-	P	-	
11	34 011 K	JL. MT. HARYONO (SAMARINDA)	Sungai Kunjang / Samarinda Ulu	2.57	5,9 - 17,2	2.26	0.00	0.00	0.31	3.66	0.09	92.45	2.38	3.89	0.10	0.00	0.00	-	P	-	
12	34 012 K	JL. KH. WAHID HASYIM II (SAMARINDA)	Samarinda Utara	2.00	8,1 - 10,9	1.30	0.00	0.00	0.70	75.00	1.50	25.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	K	-	
13	34 013	SP. 4 OUTER RING ROAD IV - BANDARA SAMARINDA BARU	Samarinda Utara	10.76	7 - 11,6	0.00	0.00	10.20	0.56	5.20	0.56	-	-	3.16	0.34	91.64	9.88	-	N	-	
14	34 014	SP. BATU CERMIN - SP. L2 - SP.4 OUTER RINGROAD IV	Samarinda Utara	10.31	5,5 - 15	0.00	0.20	0.07	10.04	78.81	8.13	17.60	1.82	0.97	0.10	2.62	0.27	-	P	-	
15	34 015	SP. BATU CERMIN - BATU BESAUNG - SP.4 OUTER RINGROAD IV	Samarinda Utara	7.10	4,8 - 10,8	0.00	0.00	0.00	7.10	98.38	6.99	1.62	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-	P	-	
16	34 016	SAMARINDA - ANGGANA	Samarinda Iir / Sambutan / Anggana	18.00	6,5 - 12,4	11.23	0.00	0.00	6.77	52.72	9.49	45.33	8.16	1.94	0.35	0.00	0.00	-	P	-	
17	34 017	SP. 3 SAMBERA - MUARA BADAK	Muara Badak	18.00	5,8 - 7,5	16.55	0.00	0.00	1.46	87.42	15.74	12.58	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-	N	-	
18	34 018 K	JL. MULAWARMAN (BALIKPAPAN)	Samboja / Balikpapan Timur / Balikpapan Kutubaya	21.10	5,1 - 16	21.00	0.00	0.00	0.10	48.34	10.20	51.66	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-	P	-	
19	34 019	BTS. BALKPAPAN - SIMPANG SAMBOJA	Samboja	16.21	6 - 7,5	14.93	0.00	0.00	1.28	57.56	9.33	35.66	5.78	6.79	1.10	0.00	0.00	-	P	-	
20	34 020	SIMP. SAMBOJA - SMP. MUARA JAWA	Muara Jawa / Samboja	44.67	6 - 7,5	29.71	0.00	0.00	14.97	23.58	10.54	55.27	24.89	18.89	8.44	2.25	1.01	-	P	-	
21	34 021	SAMARINDA SEBERANG - SANGA SANGA	Samarinda Seberang / Palarang / Sanga Sanga	25.15	6 - 14	4.97	0.00	0.00	20.19	21.31	5.36	74.71	18.79	2.74	0.69	1.23	0.31	-	P	-	
22	34 022	SANGA SANGA - DONDANG (BENTUAS)	Sanga Sanga / Muara Jawa	18.02	6 - 7	5.81	0.40	0.00	11.81	73.62	13.27	13.67	2.46	9.27	1.67	3.44	0.62	-	P	-	
23	34 023	KM. 38 - SIMP. SAMBOJA	Samboja	7.10	5 - 6,8	5.93	0.00	0.00	1.17	91.55	6.50	5.63	0.40	2.82	0.20	0.00	0.00	-	N	-	
24	34 024	KM. 38 - SEMOI SEPAKU	Samboja / Sepaku	39.52	4,2 - 8,1	15.38	0.00	0.00	24.14	73.00	28.85	27.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-	N	-	
25	34 025	SP. BENTUAS - SP. MUARA JAWA	Pasarant / Sanga Sanga / Loa Janan / Muara Jawa	51.53	3,4 - 10,8	13.16	16.93	16.70	4.75	3.10	1.60	13.65	7.04	30.48	15.71	52.77	27.19	-	P	-	
26	34 026	KM.5.5 BALKPAPAN - KARIANGAU	Balikpapan Utara / Balikpapan Barat	10.51	6,1 - 9,6	4.33	0.00	0.00	6.18	51.62	5.43	38.96	4.10	5.52	0.68	3.90	0.41	-	N	-	
27	34 027	SEMOI SEPAKU - PETUNG (PENAJAM)	Sepaku / Penajam	64.48	4 - 8	23.73	0.10	0.00	40.65	80.32	51.79	17.20	11.09	1.24	0.80	1.24	0.80	-	N	-	
28	34 028	JL. JANJU - JONE - PONDONG BARU	Tanah Grogot / Kuaro	14.46	5 - 7,2	10.25	0.00	0.00	4.20	44.29	6.40	47.06	6.80	8.85	1.25	0.00	0.00	-	N	-	
29	34 029	PATUNG LEMBUSWANA - SEBULU	Tenggarong Seberang / Sebulu / Muara Kaman	66.71	3,1 - 10,1	20.92	0.00	0.00	45.79	44.15	29.45	38.38	25.60	8.94	5.96	8.54	5.70	-	P	-	
30	34 030	SP. SEBULU - KM. 5.2 MUARA BENGKAL	Sebulu / Muara Kaman	5.20	6,8 - 7,2	0.00	0.00	0.00	5.20	11.54	0.80	86.54	4.50	1.92	0.10	0.00	0.00	-	P	-	
31	34 031	SP. KALIORANG - TALISAYAN	Kaubun / Karangany / Blatan / Talisayan	248.00	2,1 - 12,9	131.86	108.53	0.20	7.41	9.93	24.84	60.24	149.39	22.07	54.74	7.76	19.23	-	N	-	
32	34 032	TANJUNG REDEB - TALISAYAN	Talisayan / Talabar / Sambalung	151.28	5 - 18	122.92	1.00	0.00	27.37	19.41	29.37	53.76	81.33	6.68	10.10	20.15	30.49	-	P	-	
33	34 033	RING ROAD TANJUNG REDEB - SP. LABANAN	Teluk Bayur	6.50	7 - 12,2	0.00	0.43	0.00	6.07	67.23	4.37	21.54	1.40	4.62	0.30	6.62	0.43	-	N	-	
A. TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI (Km)				895.09		465.29	127.99	27.17	275.04		284.96	409.00		104.81		96.42					
B. PERSENTASE JALAN (%)				100%						31.83		45.69		11.71		10.77					

Sumber: Dinas

PUPR-PERA

Provinsi

KALTIM,

2022

Berikut data jalan menurut status, jenis permukaan dan kondisinya di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.8.
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (km)

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,90	1.490,50	0,00	4,31	311,95
2	Provinsi	895,09	465,29	127,59	27,17	275,04
3	Kabupaten/ Kota	10.710,12	2608,20	2912,17	2530,64	2658,89

Sumber: Dinas PUPR-PERA Provinsi KALTIM, 2022

Tabel 2.9.
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (km)

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	438,73	995,67	179,79	96,71
2	Provinsi	284,86	408,99	104,82	96,41
3	Kabupaten/Kota	3.368,37	1.737,49	1.464,57	4.140,07
TOTAL		4.091,96	3.142,15	1.749,18	4.333,19

Sumber: DD1 Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota, 2022

Persoalan lain yang berkaitan dengan konektivitas wilayah yaitu ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota belum optimal. Saat ini masih terdapat satu kabupaten yang belum terkoneksi jaringan jalan yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut disebabkan oleh jauhnya rentang kendali menuju daerah tersebut sehingga biaya konstruksi dan mobilisasi alat berat menjadi lebih mahal. Kota Balikpapan merupakan daerah yang memiliki kondisi jalan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Ketimpangan capaian kualitas jalan terbangun antar wilayah mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi belum merata di semua wilayah. Persoalan ini disebabkan oleh jauhnya rentang kendali serta sulitnya akses pada wilayah-wilayah tertentu.

Melihat pada material atau bahan yang digunakan dalam pembangunan jalan, mayoritas jalan di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh aspal sebesar 5.622,03 km, namun demikian masih terdapat cukup banyak jalan kerikil (3.147,23 km) dan tanah (4.194,06 km) sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Panjang Jalan Berdasarkan Material (Negara + Prov + Kab/Kota)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota	14333,67	15359,80	15359,79	15359,85	15359,85
1. Aspal	5019,23	5756,64	5622,03	5589,22	5589,22
2. Berbatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Hotmix (Aspal Beton)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Cor Beton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kerikil	3030,90	2997,74	3159,62	3147,23	3147,23
6. Tanah	3979,64	4295,27	4194,06	4194,83	4194,83
7. Lainnya	2303,90	2310,15	2384,08	2428,57	2428,57
Panjang Jalan Nasional	1703,10	1710,91	1710,90	1710,96	1710,96
1. Aspal	1351,39	1490,50	1.490,50	1428,99	1428,99
2. Kerikil	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25
3. Tanah	0,50	4,31	4,31	0,00	0,00
4. Lainnya	351,21	216,10	216,10	265,72	265,72
Panjang Jalan Provinsi	895,10	895,09	895,09	895,09	895,09
1. Aspal	608,48	581,02	529,65	475,11	475,11
2. Kerikil	94,57	8,41	132,49	141,65	141,65
3. Tanah	43,44	125,32	28,42	29,19	29,19
4. Lainnya	148,61	180,34	204,53	249,14	249,14
Panjang Jalan Kabupaten/Kota	11735,47	12753,80	12753,80	12753,80	12753,80
1. Aspal	3059,36	3685,12	3685,12	3685,12	3685,12
2. Kerikil	2936,33	2989,33	2989,33	2989,33	2989,33
3. Tanah	3935,70	4165,64	4165,64	4165,64	4165,64
4. Lainnya	1804,08	1913,71	1913,71	1913,71	1913,71

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

Pada tahun 2018 dilakukan penetapan Status Jalan Provinsi Kalimantan Timur yang melalui Keputusan Gubernur No. 622/K.295/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, yaitu sepanjang 895.09 Km. Dari perubahan panjang jalan tersebut maka kondisi mantap jalan provinsi mengalami perubahan mencapai 77,52% dan tidak mantap mencapai 22,48% di tahun 2022.

Selanjutnya, bila dilihat dari fungsinya, pemanfaatan jalan terbagi atas jalan arteri, kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan dengan rincian panjang jalan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.11.
Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi dan Fasilitas
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun					Ket.
	2018	2019	2020	2021	2022	
Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi						
1. Arteri	326,21	326,22	326,22	326,22	326,22	Data Jalan Nasional
2. Kolektor	1384,69	3.935,91	3.935,91	3935,91	3935,91	Data 2018 komulatif Prov & Kab/Kota
3. Jalan Lokal	1712,75	4.061,59	4.061,59	4061,59	4061,59	Data 2018 komulatif Prov & Kab/Kota
4. Jalan Lingkungan	93570,74	1.793,58	1.793,58	1793,58	1793,58	Data 2018 komulatif Prov & Kab/Kota
Panjang jalan yang memiliki fasilitas						
1. Trotoar	18,33	18,33	n/a	18,33	18,33	
2. Drainase	609,57	609,57	n/a	609,57	609,5	
3. Trotoar dan drainase	627,90	627,90	n/a	627,90	627,90	
4. Sempadan Jalan	870,82	870,82	n/a	70,82	870,82	

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

Pembangunan infrastruktur jalan senantiasa berbarengan dengan pembangunan jembatan sebagai sarana penghubung antar wilayah yang terpisahkan oleh aliran sungai. Pembangunan jembatan selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2022 jumlah jembatan yang terbangun sebanyak 3.173 unit dengan panjang jembatan mencapai 33548,97 Km. Jumlah Jembatan yang terbangun pada ruas jalan provinsi sebanyak 131 unit dengan panjang total 6.069,55 meter (sumber: hasil inspeksi kondisi jembatan tahun 2022).

Tabel berikut menunjukkan capaian pembangunan jembatan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018- 2022.

Tabel 2.12.
Pembangunan Sarana Jembatan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Panjang Jembatan	32238,97	32709,97	33473,97	33548,97	33548,97
2. Jumlah Jembatan	2358,00	2406,00	3170,00	3173,00	3173,00

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

Guna mengantisipasi terjadinya longsor pada saat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan maka dibangun pula turap berupa dinding vertical yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah dan menahan masuknya air ke dalam lubang galian.

Tabel 2.13.
Pembangunan Turap di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun					Ket.
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Panjang Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor (Km)	2,00	0,34	0,34	0,64	0,64	
2. Panjang Wilayah Rawan Longsor (Km)	2,00	2	2	3,00	3,00	Data Sementara, Kubar, Kukar, kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu tidak memilikidata
3. Persentase Pembangunan Turap di wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor (%)	100,00	16.80	16.80	21,40	21,40	Panjang Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor / Panjang Wilayah Rawan Longsor x 100

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

B. Bidang Cipta Karya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal. Belum meratanya penyediaan air baku dan air bersih, menjadi faktor utama minimnya layanan SPAM di suatu wilayah. Ditambah lagi masih kurangnya prasarana dan sarana unit air baku serta unit pengolahan air kemudian mempengaruhi kapasitas distribusi dan ketersediaan layanan air minum di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur layanan dasar air minum akan meningkatkan kualitas sistem penyediaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada tahun 2021 capaian akses air minum layak mencapai 70,78%. Persentase penyediaan air baku kawasan industri di tahun 2018 masih sebesar 13,79%.

Tabel 2.14.
Penduduk Terlayani Air Minum Layak
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Air Minum Layak (%)			
		2019	2020	2021	2022
1	Balikpapan	97,63	97,84	97,84	99,25
2	Penajam Paser Utara	23,33	33,91	49,90	30,90
3	Paser	62,92	66,88	66,80	70,14
4	Bontang	77,42	79,57	81,18	83,55
5	Kutai Timur	37,08	43,28	44,20	51,73
6	Berau	73,27	73,77	72,44	82,16
7	Samarinda	82,59	80,19	79,39	87,27
8	Kutai Kartanegara	59,71	56,64	56,64	72,85
9	Kutai Barat	60,38	72,19	72,19	86,02
10	Mahakam Ulu	13,90	13,95	13,89	66,06
JUMLAH		68,97	70,08	70,78	78,00

Sumber: Data Sektoral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari tren *update* capaian per tahun masing-masing Kabupaten/Kota, maka terlihat inkonsistensi data capaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma dan konsep perhitungan capaian air minum oleh masing-masing daerah dan Provinsi. Untuk capaian air minum yang terukur dengan baik, maka kedepan diperlukan penyamaan persepsi baseline data perhitungan capaian air minum, seperti penyepakatan jumlah jiwa dalam satuan Sambungan Rumah, keikutsertaan data sektor komersil dalam perhitungan capaian air minum, dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan data di atas, peningkatan capaian akses air minum layak mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, di mana pada tahun 2019 sebesar 68,97% dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 70,08%, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 70,78%, dan di Tahun 2022 meningkat tajam menjadi 78,00%.. Capaian ini masih memiliki GAP sekitar 22% dari target nasional RPJMN 2024, yang mana capaian akses air minum layak untuk Provinsi Kalimantan Timur ditargetkan sebesar 100% yang terdiri dari minimal 71% akses jaringan perpipaan dan sisanya 29% akses bukan jaringan perpipaan. Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan peningkatan capaian akses air minum layak adalah dukungan kinerja layanan PDAM di Kabupaten/Kota, namun kondisinya saat ini masih dianggap belum sepenuhnya optimal hampir di seluruh Kabupaten/Kota, terutama di Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Berdasarkan tabel data cakupan layanan air minum di atas,

kabupaten yang sudah terlayani dengan cukup baik antara lain adalah Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan, namun ketiga wilayah ini masih memiliki permasalahan terkait menurunnya kapasitas/kualitas air baku, tingginya *non revenue water* (NRW) atau kehilangan air, serta belum optimalnya idle capacity yang ada dalam operasional IPA dan JDU, hal ini akan mempengaruhi keandalan SPAM dimasa yang akan datang. Secara umum, pemerataan suplai air baku dan optimalisasi layanan air minum maupun pengelolaannya perlu lebih ditingkatkan lagi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Perusahaan daerah air minum (PDAM) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2020 telah terdapat 9 perusahaan air minum (PDAM) dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.347 liter/detik. Pengolahan air baku melalui unit produksi PDAM di Kalimantan Timur hingga tahun 2021 telah mencapai efisiensi sebesar 87,93%.

Tabel 2.15.
Jumlah PDAM di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021

Elemen Data	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
Jumlah PDAM	9	9	9	Unit
Kapasitas Produksi Potensial	7.844	8.395	9.179	(Ltr/dtk)
Kapasitas Produksi Efektif	7.091	7.347	8.071	(Ltr/dtk)
Efektivitas Produksi	90,40	87,51	87,93	(%)

Sumber: Baseline Bidang Cipta Karya, 2018-2020

Dalam upaya pemenuhan layanan air minum saat ini, mulai ditemui kendala terkait terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian menjadikan upaya pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM menjadi kurang optimal. Idealnya penyelenggaraan SPAM, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas, kuantitas dan keandalan air baku yang sangat besar, sementara di daerah lain diprediksi akan mengalami kesulitan air baku. Beberapa daerah yang diperkirakan mengalami defisit air baku di masa depan meliputi beberapa daerah yang saat ini hanya mengandalkan sumber air baku yang berasal dari tanah, dengan tanpa alternatif sumber air baku lain, seperti air permukaan (DAS, danau dan mata air) Melihat permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan capaian

akses air minum untuk seluruh masyarakat, maka kedepan akan diperlukan upaya untuk pemerataan akses terhadap sumber air baku yang potensial dimanfaatkan secara bersama. Upaya tersebut akan berjalan melalui skema penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota atau Regional (SPAM Regional). Terdapat beberapa potensi SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (digambarkan dalam Tabel II.14), dan akan potensial direalisasikan dengan skema kerjasama daerah, melalui Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Tabel 2.16.
Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur

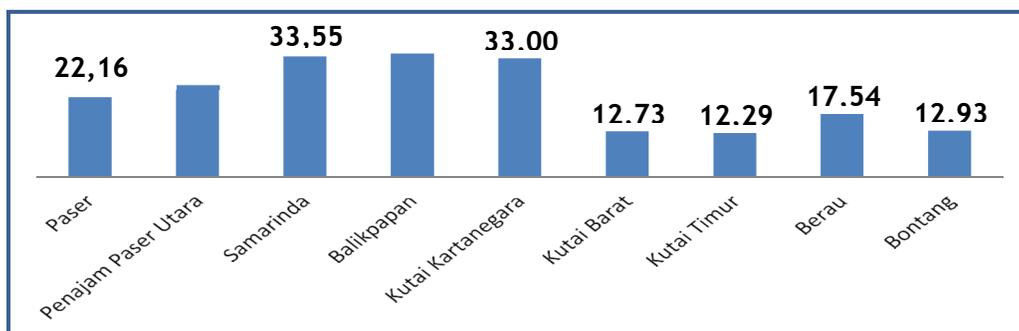
No	Potensi SPAM Regional	Kab/Kota YgTerlibat	Sumber Air Baku	
			Nama	Kapasitas
1	Kukar-Bontang *)	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bontang	Bendung Marangkayu	450 L/Det
2	Kutim-Bontang *)	Kab. Kutai Timur, Kota Bontang	Waduk Ex Tambang Indominco dan Sei. Mayang	250 L/Det
3	PPU – Balikpapan	Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan	Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	> 2.000 L/Det
4	Kukar – Balikpapan	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan	Waduk Batu Lepek	5.000 L/Det
5	Paser – Balikpapan	Kab. Paser, Kota Balikpapan	Waduk Lambakan	12.000 L/Det
6	Paser – PPU	Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara	Sungai Telake (Longkali)	Dalam Kajian

Sumber: Data Sektoral Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Keterangan: Prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2024-2026

Untuk Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata kehilangan air (NRW) Distribusi berdasarkan data Audit BPKP Tahun 2020 di 9 PDAM yaitu sebesar 22,70 persen. Dengan NRW tertinggi berada pada 34,38 persen di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebesar 33,55 persen. NRW atau kehilangan air juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan layanan air minum menjadi tidak efisien dan optimal.

Gambar 2.3.
Gambaran Persentase Non Revenue Water (NRW)
Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 (%)



Sumber: Data Sektoral Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Selanjutnya selain mengukur kualitas bangunan perumahan, kinerja pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga dapat dilihat dari akses dan kualitas sanitasi. Sanitasi yang layak mengindikasikan kualitas sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Kualitas sanitasi dapat dilihat dari penggunaan fasilitas sanitasi seperti jamban dan tangki septik.

Tabel 2.17.
Perumahan Berdasarkan Fasilitas Sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah tangga yang menggunakan Jamban sendiri (%)	91,34	92,49	93,33	93,53
Persentase Rumah tangga yang menggunakan Jamban dengan Tangki Septik/IPAL (%)	83,78	72,68	88,80	88,78

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021

Pada tahun 2021, sebagian besar RT telah mempunyai jamban sendiri sebesar 93,53% dari total RT keseluruhan. Capaian tersebut mengindikasikan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, proporsi RT yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebesar 88,78%.

Di samping fasilitas sanitasi, persoalan berikutnya yang dihadapi oleh Kalimantan Timur adalah belum optimalnya penanganan persampahan. Menurut hasil FGD persoalan ini disebabkan oleh belum adanya TPA regional dan rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun

belum memiliki TPA Regional, terdapat beberapa TPA di Kabupaten Kota yang bisa dioptimalkan. Namun ada satu kabupaten yang belum memiliki TPA, yaitu Mahakam Ulu. Berikut adalah sebaran lokasi TPA dan sistem operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.18.
Sebaran Lokasi TPA dan Sistem Operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Nama TPA	Sistem Operasional TPA	Luas TPA (Ha)
Balikpapan	Manggar	<i>Control Landfill</i>	±28
Samarinda	Bukit Pinang	<i>Open Dumping</i>	±9,5
	Sambutan	<i>Control Landfill</i>	±30
Bontang	Bontang Lestari	<i>Control Landfill</i>	±15 (aktif 6ha)
Paser	Janju	<i>Control Landfill</i>	10,499
	Batu Sopang	<i>Control Landfill</i>	±2 (rencana menjadi 5 ha)
Penajam Paser Utara	Buluminung	<i>Control Landfill</i>	±10
Kutai Timur	Batotak	<i>Control Landfill</i>	±12
Kutai Kartanegara	Bekotok	<i>Open Dumping</i>	±4
Kutai Barat	Belau	<i>Control Landfill</i>	±15
Berau	Bujangga	<i>Control Landfill</i>	±10
Mahakam Ulu	-	-	-

Sumber: Data Sektoral Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika ditinjau dari prasarana persampahan, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Dari 11 TPA yang ada, dua diantaranya masih menggunakan sisten open dumping yaitu TPA Bukit Pinang di Samarinda dan TPA Bekotok di Kutai Kartanegara, sedangkan 9 TPA lainnya sudah menggunakan sistem Control Landfill. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, proses akhir sampah idealnya dilakukan dengan metode control landfill, sanitary landfill dan teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, proses akhir sampah dengan metode open dumping harus segera diganti minimal dengan metode control landfill. Meskipun demikian, metode control landfill ini merupakan metode antara sebelum mampu menerapkan sistem sanitary landfill. Oleh karena itu, perbaikan metode pemrosesan akhir sampah perlu untuk diperbaiki terutama pada TPA yang masih menggunakan metode open dumping. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

C. Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman bertujuan untuk memastikan terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, aman dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goal's*) yang ke-11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. Adapun kondisi perumahan dan kawasan permukiman di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 2.19.

Luas Area Permukiman Tertata di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Luas area permukiman tertata	113,57	11,32	10,97	4,00	5,00	Ha
Persentase Luas Permukiman Yang Tertata	11,37	1,04	1,00	0,37	0,46	(%)

Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/dataprofil/dataku/52>, 2022

Berdasarkan data di atas, luas permukiman tertata di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 mencapai 113,57 Ha atau sebesar 11,37%. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan permukiman belum dilakukan secara tertata dengan memerhatikan tata ruang.

Tabel 2.20.

Luas Kawasan Permukiman Eksisting dan Luas Kawasan Peruntukan Permukiman di Provinsi Kalimantan Timur (Ha)

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Permukiman Eksisting	Luas Kawasan Peruntukan Permukiman
Samarinda	12.910,00	39.156
Kutai Kartanegara	9.558,62	63.928
Bontang	3.024,09	7.775
Kutai Timur	9.906,89	79.923
Berau	5.818,32	76.643
Balikpapan	8.905,67	25.318
Penajam Paser Utara	3.342,19	27.123
Paser	3.944,22	62.298
Kutai Barat	1.359,78	11.311
Mahakam Ulu	138,94	2.790
Total	58.908,76	396.265

Sumber: RTRW Prov. Kaltim 2016-2036

Pada tahun 2017, luas kawasan peruntukan pemukiman mencapai 396.265 Ha dengan luas kawasan pemukiman eksisting sebesar 58.908,76 Ha atau 14,87 persen dari total luas kawasan peruntukan pemukiman. Sebagian besar kawasan pemukiman berada di Kota Samarinda (12.910 Ha) yang mencapai 21,9 persen dari total luas kawasan pemukiman.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun khususnya di wilayah perkotaan memberikan dampak terhadap kebutuhan rumah yang semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh perkembangan perumahan maka akan terjadi backlog dimana seringkali angka pertumbuhan penduduk lebih besar daripada ketersediaan perumahan.

Angka *backlog* di atas merepresentasikan kebutuhan rumah untuk keluarga yang belum memiliki rumah. Jumlah *backlog* rumah di Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terjadi pada backlog kepemilikan maupun *backlog* penghunian. Pada tahun 2017, backlog kepemilikan mencapai 174.614 unit sedangkan *backlog* penghunian mencapai 218.648 unit. Artinya, jika dilihat kelayakan satu KK menghuni satu rumah, 23,49 dari 930.772 KK diantaranya masih menumpang. Peningkatan backlog yang terjadi setiap tahun mengindikasikan belum akses masyarakat terhadap perumahan yang belum optimal.

Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga khususnya yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya.

Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah layak huni di provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak (kumuh). Ketidaklayakan rumah tersebut berupa kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah. Tantangan pemerintah dalam pengurangan backlog adalah harga rumah yang ditawarkan tidak sebanding dengan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih bermukim di area kumuh dan tidak layak huni.

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan

permukiman yang didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur teridentifikasi sebagai kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan Kawasan. Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. . Berdasarkan pemutakhiran SK Bupati/Walikota terbaru hingga tahun 2022, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur baik yang menjadi kewenangan provinsi 203,85 ha yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.21.
Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
Paser	35,06	No. 653/KEP-332/2020
Kutai Barat	37,5	No. 413.2/K.719/2018
Kutai Kartanegara	37,51	No. 454/SK-BUP/HK/2019
Kutai Timur	0	No. 050/K.661/2015
Berau	25,79	No. 30 Tahun 2020
Penajam Paser Utara	0	No. 593.33/270/2017
Mahakam Hulu	0	No. 050.136.146/K.63/2020
Balikpapan	10,39	No. 188.45-326/2020
Samarinda	24,25	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
Bontang	33,35	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur	203,85	

Sumber: Dinas PUPR-PERA Provinsi KALTIM, 2021

Dari luasan 203,85 Ha ini, ditargetkan akan dilakukan penuntasan kumuh hingga tahun 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Faktor lain yang menyebabkan penataan kawasan permukiman kumuh belum optimal adalah belum optimalnya perencanaan dalam penanganan kawasan kumuh.

Komponen berikutnya yang tidak terpisahkan dalam rancangan perencanaan pembangunan dan menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di kawasan permukiman adalah fasilitas Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum (PSU). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan kebutuhan PSU Permukiman di beberapa lokasi di Kalimantan Timur berupa jalan lingkungan, drainase serta penerangan jalan umum (PJU). Area permukiman yang telah dibangun PSU dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.22.
PSU Terbangun di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022

No.	Tahun	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Lokasi yang Ditangani PSU	Total Penanganan
Jalan Lingkungan				20.213,35 m
1	2019	Samarinda	4	7.494 m
2	2019	Balikpapan	1	1.444 m
3	2020	Samarinda	3	4.884 m
4	2021	Samarinda	2	393,28 m
5	2022	Samarinda	9	5.543,07 m
Drainase				454 m
1	2020	Samarinda	1	454 m
Penerangan Jalan Umum				842 Titik
1	2022	Samarinda	4	50 Titik
2	2022	Kutai Kartanegara	3	81 Titik
3	2022	Balikpapan	6	359 Titik
4	2022	Penajam Paser Utara	10	352 Titik

Sumber: Realisasi Capaian Program PSU, 2022

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) termasuk ke dalam program penunjang di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun termasuk dalam program penunjang, program ini akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026 karena peningkatan PSU di lokasi permukiman masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

D. Bidang Sumber Daya Air

Salah satu sektor strategis pembangunan infrastruktur berikutnya di Kalimantan Timur adalah Sumber Daya Air. Keberadaannya tidak hanya krusial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga menyangkut aktivitas perekonomian. Dan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan air juga meningkat. Pada periode 2013-2017, pembangunan sektor Sumber Daya Air difokuskan pada 3 aspek, yakni upaya pemenuhan Kebutuhan Air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri, pembangunan jaringan irigasi untuk memberikan suplai air pada lahan pertanian, serta upaya pengendalian daya rusak air secara khusus pada pengendalian banjir. Dalam hal ini, sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang kesinambungannya sangat

bergantung pada suplai air yang memadai. Pada tahun 2018, luas lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 15.191,5 Ha, atau 16,06 persen dari luas seluruh lahan sawah eksisting di Kaltim. Luasan tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota serta mencakup seluruh kewenangan baik pusat, provinsi, maupun kabupaten seluas 94.572,92 Ha.

Tabel 2.23.
Kondisi Sawah Eksisting di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kab/Kota	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Non Irigasi (Ha)	Luas Sawah (Ha)
1	Paser	0	12.702	12.702
2	Kutai Barat	608	8.111	8.719
3	Kutai Kartanegara	6.071	29.921	35.992
4	Kutai Timur	2.881	6.874	9.775
5	Berau	2.831	7.654	10.485
6	Penajam Paser Utara	933	11.272	12.205
7	Mahakam Ulu	0	480	480
8	Balikpapan	0	250	250
9	Samarinda	294,5	3.453,5	3.748
10	Bontang	0	74	74
TOTAL KALTIM		13.618	80.791,5	94.410

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi, terdapat 8 (delapan) Daerah Irigasi permukaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan total luasan 12.060 Ha. Daerah Irigasi dan luasannya dapat dilihat pada table 2.28. Selain itu, terdapat 14 (empat belas) Daerah Irigasi rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan total luasan 23.000 Ha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Kondisi Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS DI (Ha)
1	Biatan	1.065
2	Labanan	1.050
3	Merancang	1.136,70
4	Semurut dan Buyung - buyung	1.089
5	Kaliorang	1.220
6	Selangkau	991,56
7	Marangkayu	1.506,75
8	Sungai Buluh	681,28
Total		12.051

Sumber: Perencanaan Sumber Daya Air 2019

Tabel 2.25.
Kondisi Daerah Irigasi Rawa di Provinsi Kalimantan Timur

NO.	KAB./KOTA	DAERAH IRIGASI RAWA	LUAS (Ha)
1	Berau	D.I.R.Rantau Pangan	1.500
2	Berau	D.I.R.Sei Kuran	1.000
3	Berau	D.I.R.Sukan Tengah	1.000
4	Berau	D.I.R.Tanjung Perengat	2.500
5	Berau	D.I.R.Urutang	2.000
6	Kutai Barat	D.I.R.Resak	1.000
7	Kutai Kartanegara	D.I.R.Sebulu	1.000
8	Kutai Timur	D.I.R.Bengalon	2.000
9	Paser	D.I.R.Laburan Lama	2.000
10	Paser	D.I.R.Padang Pangrapat	2.000
11	Paser	D.I.R.Riwang	1.500
12	Paser	D.I.R.Suliliran	1.500
13	Paser	D.I.R.Tanjung Aru	2.000
14	Paser	D.I.R.Tanjung Harapan	2.000
Total			23.000

Sumber: Perencanaan Sumber Daya Air 2019

Dari luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi tersebut, yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 43,53 persen atau seluas 5.250 Ha. Pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2018 meliputi 4 Daerah Irigasi, yaitu DI Biatan, DI Labanan, DI Merancang dan DI Sungai Buluh luas daerah irigasi yang terlayani sebesar 1.573 Ha.

Dalam proses perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah, integrasi memang belum dilakukan hingga posisi/lokasi spesifik. Penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya data geospasial yang akurat mengenai kondisi lahan sawah eksisting serta rencana lokasi pencetakan sawah. Penyediaan data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan agar ke depannya persoalan ini tidak menjadi penghambat Kaltim untuk meningkatkan indeks kinerja irigasi, indeks pertanaman dan persentase ketersediaan beras.

Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri juga menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami defisit air baku. Berdasarkan tabel neraca air baku, masing-masing kabupaten/kota kecuali Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit kebutuhan air baku pada tahun 2018, sehingga proyeksi kebutuhan air hingga tahun 2023 mengalami defisit yang semakin tinggi. Untuk itu, diperlukan infrastruktur pendayagunaan Sumber Daya Air.

Tabel 2.26.
Neraca Air Baku Tanpa Pengembangan (lt/dtk)

Kabupaten/Kota		Penyediaan Air Baku (Lt/ Dtk)	Wtp Terpas ang (Lt/Dtk)	Neraca Air Baku Tanpa Pengembangan (Lt/Dtk)						Ket.
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Paser	365	197	(78)	(88)	(94)	(103)	(111)	(120)	Defisit
2	Kutai Barat	211	197	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Defisit
3	Kutai Kartanegara	1.538	1.692	(3)	(39)	(63)	(94)	(126)	(158)	Defisit
4	Kutai Timur	365	292	(115)	(138)	(155)	(175)	(195)	(216)	Defisit
5	Berau	560	385	261	313	308	299	291	283	Surplus
6	Penajam Paser Utara	108	75	(137)	(140)	(142)	(144)	(147)	(149)	Defisit
7	Mahakam Ulu	50	50	(30)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	Defisit
8	Balikpapan	1.220	1.220	(90)	(111)	(123)	(142)	(160)	(179)	Defisit
9	Samarinda	3.064	2.633	946	914	895	868	840	795	Surplus
10	Bontang	475	330	68	62	56	50	44	40	Surplus
Jumlah		7.965	7.071	817	748	656	532	408	267	

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Defisit air baku lebih disebabkan masih kurangnya pembangunan infrastruktur pengambil air baku pada air permukaan dan semakin berkurangnya cadangan air tanah. Air permukaan adalah air yang mengalir secara berkesinambungan atau dengan terputus-putus dalam alur sungai atau saluran dari sumbernya yang tertentu, di mana merupakan bagian dari sistem sungai yang menyeluruh, meliputi air sungai, saluran, sumber, danau dan waduk. Air permukaan tersebut merupakan Sumber Daya Air potensial terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengambil air baku sudah dilakukan pada beberapa lokasi prioritas. Beberapa di antaranya telah terbangun dan sisanya belum direalisasikan. Terdapat pula beberapa prasarana yang telah terbangun namun belum dapat dioperasikan.

Tabel 2.27.
Kapasitas Air Baku, Cakupan Layanan Air Minum dan Persentase Penyediaan air baku kawasan industri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
1.Kapasitas air baku	7	7	7.922	8.400	8.400	lt/dtk
2.Cakupan Layanan Air Minum	47,59	56,84	64,53	64,53	64,53	%
3.Persentase Penyediaan air baku kawasan industri	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	%

Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/dataprofil/dataku/60>, 2022

Masalah alih fungsi lahan, persampahan, pemukiman di bantaran sungai dan sistem drainase yang kurang memadai belum mendapatkan penanganan yang optimal, sehingga berdampak pada timbulnya bencana banjir di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan banjir akan mempunyai skala yang lebih besar bila parameter permasalahan yang mencakup DAS yang luas, daerah paparan banjir, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut tidak diatasi. Oleh karena itu, tercatat hampir semua kota di Kalimantan Timur pernah mengalami bencana banjir.

Tabel 2.28.
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	80
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	5
		Karangasam Besar	47
		Karangasam Kecil	22
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	28
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	0
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1.000
		Kandilo	188
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sangata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten PPU	Tunan	20

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Tingginya kejadian banjir tidak hanya disebabkan belum memadainya infrastruktur pengendali banjir, namun juga merupakan dampak dari masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, belum terpenuhinya ketersediaan bendali, folder dan drainase yang memadai serta banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Penyebab banjir dapat dibedakan menjadi penyebab alami dan penyebab manusia. Penyebab banjir secara alami ini sifatnya statis,

namun tetap menjadi faktor terjadinya banjir mulai dari jaman dahulu sampai saat ini dan sulit dikendalikan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Curah hujan yang tinggi, Kalimantan Timur mempunyai curah hujan tahunan yang tinggi yaitu antara 2.200- 2.400 mm/tahun.
2. Daerah rawan banjir berada pada daerah dengan topografi yang datar, dimana pada daerah ini pemukiman dan lahan usaha berkembang (Samarinda, Bontang, Sangata, Berau, Paser).
3. Daerah Aliran Sungai yang besar, sehingga debit yang dihasilkan dari daerah tangkapan air cukup besar (Mahakam, Sangatta, Kandilo, Longkali, Segah).
4. Alur sungai yang banyak mean dering (berkelok-kelok) dan dipengaruhi oleh pasang air laut. Kondisi ini akan memperlambat penurunan muka air banjir sehingga waktu kejadian banjir semakin lama.

Selain penyebab alami, banjir juga disebabkan karena ulah manusia yang sifatnya dinamis dan setiap waktu semakin meningkat dan menekan daya tampung lingkungan khususnya kemampuan alam untuk mereduksi limpasan permukaan. Adapun penyebab banjir karena kegiatan manusia/masyarakat, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Perkembangan populasi manusia dari waktu ke waktu semakin meningkat, peningkatan pertumbuhan populasi ini memerlukan lahan untuk pemukiman dan lahan usaha. Pemenuhan lahan ini telah merubah bentang alam dan juga tutupan lahan. Daerah perbukitan banyak yang dipotong untuk menimbun daerah rawa, kawasan hijau atau kawasan dengan vegetasi penutup lahan yang masih bagus ditutup dengan material kedap air dan hilangnya cekungan-cekungan alam akibat sedimentasi.
2. Pola bermukim di bantaran sungai, banyak masyarakat yang bermukim di bantaran sungai sehingga menyempitkan alur sungai.
3. Tingginya erosi lahan akibat pembukaan lahan yang muaranya menjadi sedimentasi disungai, sehingga kapasitas alir sungai menjadi jauh berkurang.
4. Produksi sampah yang semakin hari semakin meningkat dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Material sampah yang masuk disungai dan saluran drainase

menjadi penyebab menurunnya kapasitas alir sungai/saluran drainase.

Program Pengendalian banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah baik, Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai dengan saat ini masih kalah cepat dengan permasalahan banjir yang ada. Pengendalian banjir yang dilakukan dapat digolongkan dalam beberapa kegiatan:

1. Pemanfaatan potensi alam dan optimasi potensi alam dalam mereduksi limpasan permukaan.
2. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi, bendungan pengendali banjir, normalisasi alur sungai dan saluran drainase serta pembangunan waduk.
3. Pengendalian pengaruh pasang surut air laut kesungai-sungai utama sampai dengan drainase utama.
4. Pengendalian banjir yang bersifat non struktural, seperti pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian banjir, pembentukan komunitas peduli sungai, peduli danau dan waduk, penyusunan peringatan dini banjir.

Beberapa program pengendalian banjir yang dilaksanakan pemerintah telah tertuang dalam kegiatan Masterplan Pengendalian Banjir pada masing-masing kabupaten/kota. Beberapa wilayah yang telah memiliki masterplan pengendalian banjir antara lain: Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Paser, dan Kab. Kutai Timur. Beberapa program pengendalian banjir secara struktural yang ada dalam masing-masing Masterplan Pengendalian Banjir antara lain, Pengembangan Bendungan dan Waduk Pengendali banjir (Bendungan Lempake, Teritip, Marangkayu, Samboja, Merancang, Bendali HM Ardans) sementara rencana bendungan pengendali banjir yang lain seperti bendungan Lambakan, bendungan Sangatta, Bendali Sukarahmat, Bendungan Kandilo, dan beberapa bendungan kecil di Kota Balikpapan.

Bendungan pada umumnya untuk mengendalikan banjir dari daerah hulu, sementara untuk pengendalian banjir di daerah tengah dengan mengembangkan kolam retensi maupun peningkatan tampungan alam seperti danau. Beberapa kolam retensi di Kota Samarinda seperti kolam retensi air hitam, Kolam Retensi Loa Hui. Sementara yang masih belum dibangun seperti kolam retensi

Bengkuring, Kolam retensi Gunung Lingai, kolam retensi Rapak Dalam, kolam retensi Rapak Mahang, kolam retensi Sempaja semua berada di kota Samarinda, sedangkan yang kolam retensi Bontang, pengembangan Danau Kanaan dan depresi Kanaan ada dikota Bontang. Di Kabupaten Paser terdapat rencana kolam retensi Kandilo; kolam retensi Teluk Bayur ada di Kab. Berau; di Kab. Kutai Timur terdapat kolam retensi Jl. Pendidikan; sementara di kota Balikpapan beberapa bendali telah dikembangkan, mulai dari bendali 1 sampai bendali 5 dan kolam retensi di DAS Ampal.

Untuk pengendalian banjir di daerah hilir dengan memperlancar aliran disaluran drainase dan juga pembenahan sistem drainase. Pengendalian pasang surut air laut masuk sungai utama dikendalikan dengan rencana mengembangkan pintu-pintu banjir yang dilengkapi dengan pompa banjir.

Pada pelaksanaan program terkait pengamanan kondisi pantai, terdapat berbagai kegiatan pengamanan pantai yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Data Pengaman Pantai di Provinsi Kalimantan Timur

Nama Pantai	Lokasi		Tahun Pelaksanaan	Tipe Pengamanan	Panjang Penanganan (m)	Panjang pantai kritis	Luas yang sudah ditangani (Ha)	Luas yang akan ditangani (Ha)	Luas yang belum ditangani (Ha)
	Kabupaten/ Kota	Kecamatan							
Saloloang	Penajam Paser Utara	Penajam	2008	Revetment Buis Beton	500	3000	10	75	26,46
			2009	Revetment Buis Beton	467		9,34		
			2010	Revetment Buis Beton	642		12,84		
			2011	Revetment Buis Beton	500		10		
			2016	Revetment Buis Beton	318		6,36		
			2019	Revetment Buis Beton					
Tanjung Tengah	Penajam Paser Utara	Penajam	2014 -2016	Revetment Buis Beton	999	5600	19,98	140	120,02
Pejala	Penajam Paser Utara	Penajam	2013 -2015	Revetment Buis Beton	1.183	2500	23,66	174	150,34
BBU Manggar	Balikpapan	Balikpapan Timur	2012	Seawall & Buis Beton	230	3300	4,6	181,5	176,9
Manggar	Balikpapan	Balikpapan Timur	2013	Breakwater Blok Beton	68,8		1,376	66	64,624
			2016		54,6		1,092		
Sambit	Berau	Maratua	2011, 2014-2015	Tetrapoid	550	2000	11	100	89
Biduk-biduk	Berau	Biduk-biduk	2012 -2013	Revetment Buis Beton	1.478	4210	29,56	105,25	75,69
Talisayan - Dumaring	Berau	Talisayan	2017	Revetment Buis Beton	1274	1500	25,48	50	24,52
Derawan	Berau					2000		350	350
Beras Basah	Bontang	Bontang selatan	2013 -2015	Tetrapod	750	2500	15	250	235
Tanjung Harapan						5000		125	125
Bual-bual						2260		90	90
Senipah	Kutai Kartanegara	Senipah	2016	Tetrapod	72	1500	1,44	75	73,56
TOTAL					9.086	35.370	182	1.782	1.601

Sumber: Laporan Akhir Review Study Pantai Kritis se-Kaltim PT.Mettana Engineering Consultant

Posisi geografi Provinsi Kalimantan Timur member konsekuensi wilayah ini memiliki potensi Abrasi. Hingga saat ini infrastruktur pengendali abrasi belum tersedia secara memadai. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 35.370 m garis pantai di Kaltim dalam kondisi kritis. Dari total panjang pantai kritis tersebut baru 9.086 m yang ditangani. Jika dikonversi menjadi luasan, wilayah pantai kritis yang belum tertangani mencapai 1.601 Ha.

E. Bidang Penataan Ruang

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan dan penerapan SPM daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Berikut adalah perhitungan SPM Bidang Penataan Ruang tahun 2016 - 2020 yang diperoleh dari indikator persentase tersedianya informasi mengenai RTRW Provinsi serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

Tabel 2.30.

SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Pencapaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peta Analog					
	a. RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Rencana Rinci	0%	0%	0%	0%	0%
2	Peta Digital					
	a. RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Rencana Rinci	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa peta analog dan peta indikator pada rencana rinci adalah sebesar 0 persen karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi tidak lagi menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) sebagai rencana rinci dari RTRW Provinsi.

Adapun jika ditinjau dari Rancangan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang bahwa ketentuan tentang jenis dan/atau mutu pelayanan dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar pelayanan bidang penataan ruang mencakup standar pelayanan bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan bidang penataan ruang kabupaten/kota yang terdiri atas jenis pelayanan dan/atau mutu pelayanan. Jenis pelayanan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang; dan/atau; dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan 5 (lima) jenis layanan yang sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 2.31.
Perhitungan Kinerja Pemenuhan
Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

No	Jenis Layanan	Bobot
1	Konsultasi publik dalam penyusunan RTR dan proses persetujuan substansi	20%
2	Penyebarluasan informasi rencana tata ruang	20%
3	Pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha	20%
4	Pelayanan Pemenuhan RTH Publik	20%
5	Pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang	20%
Total Nilai		

Sumber: Rapermen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2021

Dalam upaya penyelarasan penataan ruang, pemerintah terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat penyelesaian produk rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kota/kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Berdasarkan peninjauan kembali (PK) RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW didapatkan penilaian dan rekomendasi RTRW P Kalimantan Timur. Berdasarkan penilaian kualitas RTRW Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 diketahui bahwa perubahan muatan materi RTRWP Kalimantan Timur sebesar 56,59 persen dan atas hal tersebut dan

sesuai kategori rekomendasi maka direkomendasikan pencabutan Peraturan Daerah tentang RTRWP Kalimantan Timur tahun 2016-2036. Penyusunan materi teknis revisi RTRWP dan draf ranperda telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut adanya rencana pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun 8 (delapan) Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur yang telah menetapkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota lebih dulu sebelum ditetapkannya Perda RTRWP, yaitu Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Sementara untuk Kabupaten Berau, baru menetapkan Perda RTRW-nya pada November 2017 lalu. Sehingga terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang telah menetapkan Peraturan Daerah RTRW kabupaten/kota. Adapun Kabupaten Mahakam Ulu yang saat ini masih berproses untuk penetapan perda dan sudah mendapatkan Berita Acara (BA) Konsultasi evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Adanya perbedaan waktu dalam menetapkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota dengan Provinsi menyebabkan masih terdapat perbedaan dalam menetapkan peruntukan pola ruang. Terhadap perbedaan tersebut, perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW.

Tabel 2.32.
Progres Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tahun Perda RTRW	Tahun Pelaksanaan Revisi RTRW	Status Terakhir Proses Revisi RTRW	Status Penyusunan KLHS	Dokumen Kelengkapan persetujuan Substansi RTRW Berdasarkan PERMEN ATR/BPN 11/2021 (beri keterangan ada atau tidak ada)													Kendala dalam Penyusunan	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Samarinda	Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014	2019	Matek disusun Tahun 2019, dan saat ini sedang dalam proses melengkapi persyaratan Persub dan penyesuaian dengan PITTI	Sudah Pra Validasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Pra Validasi	Ada	Ada	Tidak Perlu	PITTI: Jika membandingkan dengan Perda RTRW Provinsi Kaltim No. 1 Tahun 2016 maka masih terdapat banyak ketidaksesuaian, sedangkan untuk proses revisi RTRW Kota Samarinda telah menyesuaikan dengan Revisi RTRW Provinsi
Balikpapan	Nomor 12 Tahun 2012	2021-2022	Penyusunan dan Mendapatkan Rekom BIG untuk Peta Dasar	Proses Penandatanganan Surat Permohonan Validasi KLHS dari Wali Kota kepada Gubernur		Ada	Ada	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada (Notulensi)	Belum Ada	Proses (menunggu TTD Kepala BIG)	Proses menuju pengajuan kepada Provinsi	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada		
Bontang					Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019														
Kutai Kartanegara	Nomor 09 Tahun 2013	2013-2033	Konsultasi dengan ATR terkait materi untuk linsek	Validasi	ada	ada	Ada	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada (Notulensi)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	proses, evaluasi	ada, SK Bupati Revisi RTRW
Kutai Barat	Perda No. 32 Tahun 2013	2018	Perbaikan Revisi dari Provinsi, penyesuaian dengan Permen ATR 14 dan 11	Sudah Validasi (No. 660.2/980/B.I.1/DLH/2021, tanggal 7 Juni 2019 tentang Validasi KLHS Revisi	Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Kurang 1 Kabupaten (Kab. Barito Utara Prov. Kalteng)	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Surat Rekomendasi PK RTRW dari Bupati)	kesulitan untuk mendapatkan BA peta dasar. Adanya perubahan peraturan perundangan dan dinamika pembangunan sehingga perlunya	

Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tahun Perda RTRW	Tahun Pelaksanaan Revisi RTRW	Status Terakhir Proses Revisi RTRW	Status Penyusunan KLHS	Dokumen Kelengkapan persetujuan Substansi RTRW Berdasarkan PERMEN ATR/BPN 11/2021 (beri keterangan ada atau tidak ada)													Kendala dalam Penyusunan	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
				RTRW Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2040)														penyelarasan	
Kutai Timur	Perda Kutai Timur No. 1 tahun 2016	2021 - 2022	Asistensi Dasar dengan Peta paralel penyusunan Matek	Penyusunan dokumen	Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada (SK Tim Penyusun Tahun 2021, sebelum Keluar Permen ATR No. 11 Tahun 2021)	Menunggu persetujuan peta dasar dan menunggu finalisasi rtrw propinsi kaltim
Paser	Perda Nomor 9 Tahun 2015	2020	Penyusunan materi teknis, akademik, dan Raperda	Sudah disusun, namun masih perlu perbaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SDM Terbatas
Penajam Paser Utara	Nomor 3 Tahun 2014	2020	*Perlu Penyesuaian SK Kehutanan terbaru dan peta PITTI, Linsek Desember 2022 (menunggu penetapan RTRWP dan RTRW IKN)	Surat Permohonan Validasi KLH sdh ttd Bupati, SK POKJA KLHS proses	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	*Materi Teknis RTRW disusun 2020, menyesuaikan dengan Permen ATR/BPN Nomor 11 & 14 Tahun 2021. *sedang proses SK FPR. *Belum ada surat penjaminan kualitas	
Berau	Nomor 9 Tahun 2017	2022-2024	Peninjauan Kembali	belum ada	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	minim tenaga teknis yang mengakomodir kegiatan di Tata Ruang Kabupaten Berau
Mahakam Ulu	Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021																		

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2021

Keterangan :

Dokumen Kelengkapan Persetujuan Substansi Berdasarkan PERMEN ATR Nomor 11 tahun 2021

1. Berita acara kesepakatan substansi antara bupati/walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
3. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
4. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana, fakta analisis, dan album peta (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
5. Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
6. Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/wali kota
7. Berita acara konsultasi publik (minimal 2 (dua) kali)
8. Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
9. Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar
10. Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan
11. Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota
12. Berita Acara Pembahasan dengan dari Pemerintah Daerah Provisni mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
13. Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk revisi RTRW)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 89 persen RTRW Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur telah memasuki masa Peninjauan Kembali RTRW, kecuali Kabupaten Berau yang belum memasuki waktu peninjauan kembali. Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui progres revisi RTRW Kabupaten/kota di Kalimantan Timur yaitu 8 (delapan) kabupaten/kota sedang dalam status revisi. Berikut merupakan proses revisi RTRW Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Tabel 2.33.
Proses Revisi RTRW Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Tahun Perda	Status	Keterangan
1.	Samarinda	2014	Revisi (2019)	Materi teknis telah disusun pada tahun 2019 oleh Pemkot Samarinda. Sedang dalam tahap evaluasi TKPRD Provinsi.
2.	Balikpapan	2012	Revisi (2017)	Materi teknis telah disusun pada tahun 2018 oleh Pemkot Balikpapan, namun belum mengajukan permohonan evaluasi kepada TKPRD Provinsi
3.	Bontang	2012	Perda (2019)	Revisi RTRW Bontang telah di-Perdakan (Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019)
4.	Kutai Kartanegara	2013	Revisi (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi dilakukan melalui Bantek dari Kementerian ATR/BPN karena akan menjadi kawasan penyangga IKN • Telah dilakukan serah terima dokumen revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kementerian ATR/BPN ke Pemkab
5.	Kutai Timur	2016	Revisi (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Peninjauan Kembalikan dengan hasil RTRW Kabupaten Kutai Timur harus direvisi dengan pencabutan perda • Penyusunan dokumen materi teknis dan ranperda dilaksanakan pada tahun 2021
6.	Kutai Barat	2013	Revisi (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen materi teknis dan ranperda telah disusun pada tahun 2019 • Pada tahun 2020, Pemerintah Kutai Barat mengajukan permohonan evaluasi kepada TKPRD Provinsi • TKPRD Provinsi telah mengirimkan hasil evaluasi terhadap Revisi RTRW Kutai Barat, namun belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
7.	Paser	2015	Revisi (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • RTRW Paser yang secara normatif seharusnya direvisi pada tahun 2020, diundur pada tahun 2021 • Pada tahun 2020 sementara hanya menyusun dokumen KLHS RTRW Paser

No.	Kabupaten/Kota	Tahun Perda	Status	Keterangan
8.	Penajam Paser Utara	2014	Revisi (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi dilakukan melalui Bantek dari Kementerian ATR/BPN karena akan menjadi kawasan penyangga IKN • Telah dilakukan serah terima dokumen revisi RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dari Kementerian ATR/BPN kepada Pemkab • Pemkab PPU belum mengajukan permohonan evaluasi kepada TKPRD Provinsi
9.	Berau	2017	-	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan Kembali yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena terkendala masalah anggaran • Pada tahun 2022 akan dilaksanakan Pra Peninjauan Kembali
10.	Mahakam Ulu	Proses penetapan Perda		<ul style="list-style-type: none"> • Telah mendapatkan BA Rapat Konsultasi dalam penetapan Raperda dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 juni 2021 • Sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN pada tanggal 4 Februari 2021 • Sedang dalam proses perbaikan dan penyempurnaan dokumen pasca evaluasi TKPRD pada Bulan April 2021

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2021

Selanjutnya, untuk proses pengendalian tata ruang dilakukan suatu pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang agar pemanfaatan yang dilakukan sesuai dengan tata ruang. Dengan demikian dapat diwujudkan suatu wilayah yang dapat terus berkembang secara sosial, ekonomi maupun budaya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan Tata Ruang yang direncanakan. Dalam hal pengawasan penyelenggaraan penataan ruang, maka dilakukan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah.

Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang terhadap masing-masing aspek kinerja meliputi aspek pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan.

Perhitungan skoring penyelenggaraan penataan ruang juga dilaksanakan dan digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk mengukur kinerja. Penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2021 telah mencapai skoring 75,38 dari target skoring 75,94. Berikut ini

perhitungan kinerja penyelenggaraan penataan ruang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.34.
Skor Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	KINERJA	Nilai	Kinerja
I	ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG	14,20	Cukup
A	Penetapan Perda RTRW	10,00	
B	Penetapan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi dan RTR Rinci lain	5,04	
C	Penetapan Perda Arah Peraturan Zonasi	1,50	
D	Penetapan Pergub terkait Penataan Ruang	0,00	
II	ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG	37,54	Baik
A	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	9,80	
B	Sosialisasi Peraturan Perundangan di bidang Penataan Ruang	8,33	
C	Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	9,09	
D	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,82	
E	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	1,00	
F	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi	3,00	
G	Penyebarluasan Informasi berbagai Aspek Penataan Ruang	5,00	
H	Pengembangan Kesadaran dan tanggung Jawab Masyarakat	0,50	
III	ASPEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	21,30	Baik
A.	Perencanaan Tata Ruang	10,00	
A.1	Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	5,00	
A.2	Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Rinci lain	5,00	
B.	Pemanfaatan Ruang	9,20	
B.1	Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	5,52	
B.2	Realisasi program pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi	3,68	
C.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2,10	
C.1	Penerapan Arah Peraturan Zonasi	0,00	
C.2	Penerapan perizinan pemanfaatan ruang	2,10	
C.3	Penerapan pemberian insentif dan disinsentif	0,00	
C.4	Pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang	0,00	
Jumlah		75,38	Baik

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2021

Ketidaksesuaian tata ruang terjadi apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Data ketidaksesuaian tersebut didapatkan dari hasil Audit Pemanfaatan Ruang yang baru dilaksanakan di beberapa Kabupaten/ Kota, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (2014) dan Kota Balikpapan (2015), dengan hasil sebagai berikut:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara

- a. Sebanyak 50 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 5, yaitu penggunaan lahan eksisting **belum sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW serta izin yang ada **tidak sesuai** dengan rencana pola ruang. REKOMENDASI: Perlu didorong untuk menyesuaikan dengan peruntukan di RTRW sesuai tahapan perencanaannya dan disiapkan perizinan yang sesuai dan izin tambang yang ada harus segera dicabut.
- b. Sebanyak 18 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 2, yaitu penggunaan lahan eksisting **sudah sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW, tetapi **belum memiliki izin**. REKOMENDASI: perlu diberi sanksi karena menggunakan lahan tanpa adanya izin, dan didorong agar segera menyelesaikan perizinan.
- c. Sebanyak 18 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 4, yaitu penggunaan lahan eksisting **belum sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW, sedangkan **perizinannya sudah ada** dan **sesuai** dengan pola ruang RTRW. REKOMENDASI: kegiatan perlu segera direalisasikan sesuai dengan RTRW karena sudah ada izinnya.
- d. Sebanyak 4 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 1, yaitu penggunaan lahan eksisting, rencana pola ruang RTRW dan perizinan **telah sesuai** dan tidak terjadi overlapping, sehingga pemanfaatan ruang dapat dilanjutkan dan harus terus dipertahankan.
- e. Sebanyak 4 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 3, yaitu penggunaan lahan eksisting **sesuai** dengan rencana pola ruang dan perizinan yang dikeluarkan, namun **terjadi overlapping perizinan dengan kawasan pertambangan**. REKOMENDASI: perlu dilakukan pembatalan perizinan pertambangan, karena perizinan yang sesuai dengan pola ruang adalah perkebunan.
- f. Sebanyak 4 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 8, yaitu penggunaan lahan eksisting **tidak sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW dan **tidak memiliki izin**, sehingga perlu penyidikan dan penertiban untuk disesuaikan

dengan RTRW. Apabila terbukti pelanggaran, maka harus dikenakan sanksi.

- g. Sebanyak 2 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 6, yaitu penggunaan lahan eksisting **belum sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW, sedangkan perizinannya **sudah ada tetapi ada overlapping**. REKOMENDASI: kegiatan perlu segera direalisasikan sesuai dengan RTRW karena sudah ada izinnya, sedangkan izin yang lain harus dibatalkan.

2. Kota Balikpapan

- a. Penggunaan lahan yang **telah sesuai** dengan peraturan pola ruang yang berlaku hingga tahun 2015 adalah sebesar 76.55 persen dari seluruh titik survei di Kota Balikpapan.
- b. Sebanyak 22.37 persen titik survei adalah **boleh terbatas**, yang bermaksud bahwa penggunaan lahan diperbolehkan namun penggunaannya terbatas. REKOMENDASI: penggunaannya perlu dibatasi dan adanya pengawasan yang intens terkait penggunaan lahan tersebut karena ada penggunaan lahan lain yang lebih sesuai untuk diletakkan di wilayah tersebut.
- c. Sebanyak 1.08 persen menyatakan bahwa penggunaan lahan tersebut **tidak sesuai** dengan pola ruang yang telah ditentukan. REKOMENDASI: perlu adanya tindakan berupa peninjauan perijinan yang dikeluarkan serta tindakan lainnya yang mampu meningkatkan kesadaran pengguna lahan untuk selalu menyesuaikan pembangunan yang dilakukan dengan pola ruang yang sudah ada.

3. Kabupaten Penajam

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang Kabupaten Paser, didapatkan ketidaksesuaian kondisi eksisting dengan rencana pola ruang Kabupaten Paser. Ketidaksesuaian tersebut banyak didapatkan pada pola ruang lindung yang digunakan menjadi kegiatan budidaya. Terdapat 41 titik ketidaksesuaian di Kabupaten Paser, sebagai berikut:

- a. Terdapat 4 Perkebunan Sawit di Sempadan Sungai
- b. Terdapat 1 Ruang Terbuka di Budidaya Perkebunan
- c. Terdapat 9 Perkebunan Sawit di Budidaya Tanaman Pangan
- d. Terdapat 5 Perkebunan Sawit di Budidaya Holtikultura
- e. Terdapat 3 Penambangan Terbuka di Cagar Alam

- f. Terdapat 2 Perkebunan Sawit di Cagar Alam
 - g. Terdapat 4 Penambangan Terbuka di Hutan Produksi
 - h. Terdapat 1 Penambangan Terbuka di Kawasan Pantai Berhutan Bakau
 - i. Terdapat 1 Penambangan Terbuka di Hutan Produksi Tetap
 - j. Terdapat 4 Bangunan Permukiman di Sempadan Sungai
 - k. Terdapat 2 Bangunan Permukiman di Cagar Alam
 - l. Terdapat 1 Perkebunan Sawit di Taman Hutan Raya
 - m. Terdapat 2 Penambangan Terbuka di Budidaya Perkebunan
 - n. Terdapat 1 Bangunan Permukiman di Budidaya Tanaman Pangan
 - o. Terdapat 1 Penambangan Terbuka di Sempadan Sungai
- Dari 41 titik ketidaksesuaian tersebut dibedakan menjadi tipologi B dan C. Terdapat 12 lokasi yang dikategorikan sebagai tipologi C. Sedangkan 29 lokasi lainnya dikategorikan sebagai tipologi B.

4. Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa pola ketidaksesuaian pemanfaatan ruang diantaranya adalah:

- a. Ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan budidaya perkebunan, antara lain:
 - 1) Kawasan budidaya perkebunan menjadi dermaga bongkar muat kayu sebanyak 1 (satu) lokasi
 - 2) Kawasan budidaya perkebunan menjadi penambangan terbuka lain sebanyak 3 (tiga) lokasi
 - 3) Kawasan budidaya perkebunan menjadi tambak ikan/udang sebanyak 1 (satu) lokasi
- b. Ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan pantai berhutan bakau, antara lain:
 - 1) Kawasan pantai berhutan bakau menjadi perkebunan kelapa sawit sebanyak 4 (empat) lokasi
 - 2) Kawasan pantai berhutan bakau menjadi perkebunan lain sebanyak 1 (satu) lokasi
 - 3) Kawasan pantai berhutan bakau menjadi tambak ikan/udang sebanyak 3 (tiga) lokasi
- c. Ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan pantai ruang terbuka hijau, antara lain:
 - 1) Ruang terbuka hijau menjadi bangunan permukiman desa sebanyak 1 (satu) lokasi

- 2) Ruang terbuka hijau menjadi bangunan pemukiman kota sebanyak 1 (satu) lokasi
 - 3) Ruang terbuka hijau menjadi perkebunan kelapa sawit sebanyak 2 (dua) lokasi Ruang terbuka hijau menjadi tambak ikan/udang sebanyak 1 (satu) lokasi
- d. Ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan pantai, menjadi tambak ikan/udang sebanyak 1 (satu) lokasi.
 - e. Ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan sungai, antara lain:
 - 1) Sempadan sungai menjadi bangunan permukiman desa sebanyak 2 (dua) lokasi
 - 2) Sempadan sungai menjadi bangunan permukiman kota sebanyak 1 (satu) lokasi
 - 3) Sempadan sungai menjadi tambak ikan/udang sebanyak 3 (tiga lokasi)
 - 4) Sempadan sungai menjadi kawasan budidaya peternakan sebanyak 1 (satu) lokasi
 - f. Ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan tanaman pangan lahan kering, antara lain:
 - 1) Kawasan tanaman pangan lahan kering menjadi bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran sebanyak 2 (dua) lokasi
 - 2) Kawasan tanaman pangan lahan kering menjadi penambangan terbuka lain sebanyak 1 (satu) lokasi

Dilihat dari tipologinya, mayoritas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang memiliki tipologi B atau pemanfaatan ruang tersebut telah ada semenjak belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan tipologinya, dari ke-28 titik yang terindikasi melanggar tata ruang, dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. 26 lokasi memiliki tipologi B
- b. 2 (dua) lokasi memiliki tipologi C

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur belum dapat berjalan secara optimal, dikarenakan belum menyusun dokumen terkait arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, serta arahan pelanggaran sanksi sebagai kendali pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

F. Bidang Bina Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi salah satunya bertujuan mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Keberhasilan kinerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya ketersediaan pendanaan, sumber daya manusia aparatur dan masyarakat jasa konstruksi. Salah satu unsur penting pada masyarakat jasa konstruksi adalah ketersediaan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang merupakan kewenangan Gubernur dan kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil) yang merupakan kewenangan bupati/walikota wajib bersertifikat dan berkompeten.

Kelembagaan sub urusan jasa konstruksi di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 yang ditunjukkan oleh jumlah perangkat daerah yang berada setingkat Eselon III baru mencapai mencapai 65 persen. Capaian tersebut meliputi perangkat daerah di Pemerintah Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kubar, Mahakam Ulu, dan Paser. Sedangkan daerah yang belum membentuk adalah Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Kukar. Sementara Kabupaten Berau sudah membentuk setingkat eselon 4 tetapi saat ini sudah menjadi penyetaraan Jabatan Fungsional Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi, maka hal ini menggambarkan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan Sub Urusan Jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terbentuk di 7 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur keberdaannya diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik dan signifikan bagi peningkatan alokasi dana Untuk melaksanakan kewenangan Bupati/Walikota pada Sub Urusan Jasa Konstruksi.

Gambar 2.4.

Kondisi Eksisting Profil OPD Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Sebagai sarana dalam melakukan koordinasi baik terhadap pola pembinaan yang akan dilakukan atau dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada bidang jasa konstruksi yang melibatkan lintas sektor dibentuklah Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK). TPJK masih dianggap efektif untuk mendukung penuntasan masalah yang melibatkan beberapa pihak pada lintas sektor yang terkait dengan jasa konstruksi. Sampai saat ini status pembentukan TPJK telah ada di 8 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.35.
Jumlah Tenaga Ahli Dan Terampil Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018–2022

No	Intansi	S/D 2018 (Orang)			2019 (Orang)			2020 (Orang)			2021 (Orang)			2022 (Orang)		Jumlah	Total
		Ahli	Terampil	Jumlah	Ahli	Terampil	Jumlah	Ahli	Terampil	Jumlah	Ahli	Terampil	Jumlah	Ahli	Teknisi/Analis dan Operator		
1.	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur	6.660	13.796	20.456	1.024	2.391	3.415	1.336	1.902	3.238						27.109	
2.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	0	0	0	0	1.884	1.884	0	738	738	311	1.184	1.495	0	1.926	1.926	6.043
3.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	164	0	164	216	0	216	206	0	206	426	0	426	1.012
4.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Kalimantan Timur	0	0	0	0	390	390	0	528	528	0	489	489	0	572	572	1.979
5.	Balai Latihan Kerja Industri Samarinda Kementerian Ketenagakerjaan	0	234	234	0	230	230	0	182	182	0	128	128	0	518	518	1.292
6.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	0	128	128	0	261	261	0	0	0	0	261	261	0	0	0	650
	a UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	0	0	0	0	128	128	0	0	0	0	128	128	0	0	0	256
	b UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	0	0	0	0	133	133	0	0	0	0	133	133	0	0	0	266
7.	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) / Tempat Uji Kompetensi (TUK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	90	323	323
8.	Rantai Pasok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75
	a Tata Logam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75
Jumlah		6.660	14.158	20.818	1.188	5.156	6.344	1.552	3.350	4.902	517	2.062	2.579	659	3.181	3.840	38.483
Total Tenaga Ahli		10.576															
Total Tenaga Teknisi/Analis dan Operator (Terampil)		27.907															
Jumlah Total Tenaga Kerja Konstruksi		38.483															

Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Tabel 2.36.
Laporan Sertifikat Keterampilan dan Keahlian LPJKP
Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Kualifika	Jumlah
	Sertifikat Keterampilan (SKT)	
1	Kelas I (K1)	11.511
2	Kelas II (K2)	1.223
3	Kelas III (K3)	1.132
	Jumlah (1)	13.866
	Sertifikat Keahlian (SKA)	
1	Utama	237
2	Madya	3.929
3	Muda	2.494
	Jumlah (2)	6.660
	Total (1+2)	20.526

Sumber: Bina Konstruksi, 2019

Berdasarkan laporan sertifikat keterampilan dan keahlian LPJKP Tahun 2018 diketahui bahwa hingga saat ini jumlah tenaga terampil yang sudah memiliki sertifikat keterampilan mencapai 13.866 orang dan tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat keahlian mencapai 6.660 orang. Dari sertifikat keahlian sebanyak 6.660 orang, terdiri dari sertifikat keahlian utama 237 orang, sertifikat keahlian madya 3.929 orang, dan sertifikat keahlian muda 2.494 orang.

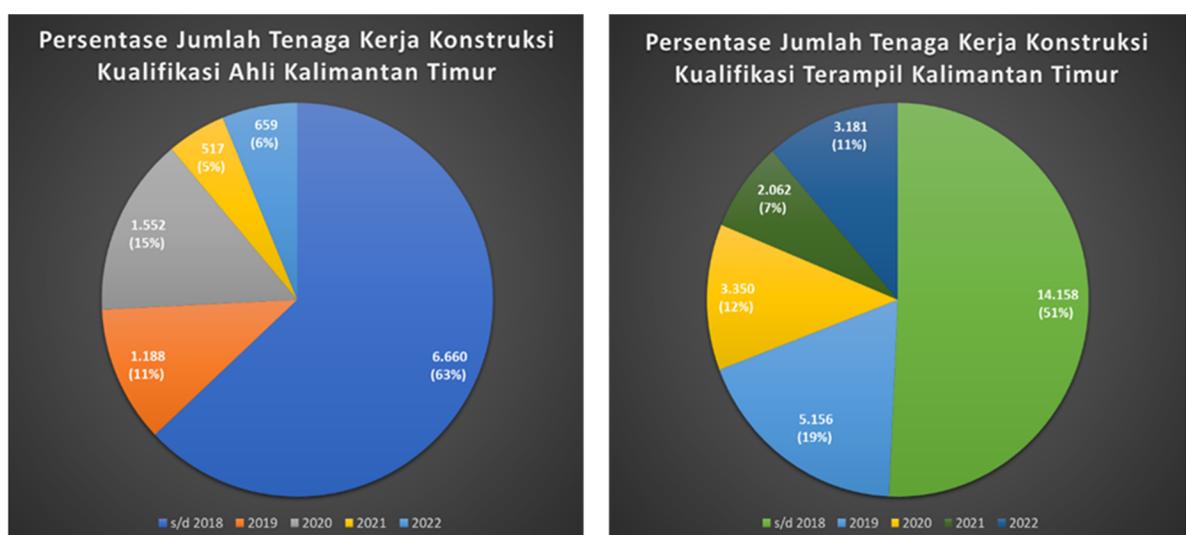
Penerbitan SKA dan SKT di Kalimantan Timur status sampai dengan saat ini, jika dilihat untuk SKA Madya yang jumlahnya cukup besar yakni mencapai 59%, SKA Muda 37%, dan SKA Utama sebanyak 4% dari Keseluruhan Jumlah SKA yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk jumlah sertifikat keterampilan untuk kelas 1 masih sangat besar mencapai 83%, Kelas 2 sebesar 9%, dan Kelas 3 mencapai 8% dari total jumlah Sertifikat Keterampilan yang telah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Timur. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat dan kompeten di Provinsi Kalimantan Timur merupakan wajib sebagai persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi.

Kondisi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di wilayah Kalimantan Timur dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 38.483 orang, yang terdiri dari 10.576 untuk tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 27.907 kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil). Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat tersebut didapat dari berbagai Lembaga/Kementerian, OPD, dan unsur masyarakat lainnya

serta Lembaga yang telah melaksanakan sertifikasi di wilayah Kalimantan Timur. Jumlah tenaga kerja konstruksi diharapkan terus meningkat dan ini tugas bersama seluruh masyarakat jasa konstruksi, dan diharapkan seluruh Lembaga/Kementerian, OPD konsisten dan komitmen melaksanakan sertifikasi berdasarkan kewenangannya, karena pengguna jasa dan penyedia jasa wajib menggunakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat

Berdasarkan data BPS bahwa Jumlah angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah 105.882 orang, hampir sama dengan jumlah tenaga kerja sektor konstruksi Provinsi Kalimantan timur tahun 2022 adalah 105.395 orang, terdiri dari 7.687 Perguruan Tinggi (Kualifikasi Ahli) dan 97.708 SD s/d DIII (Kualifikasi Teknis/Ahli dan Operator Terampil). Data Tenaga Kerja Konstruksi tahun 2022 sebesar 38.483 orang, terdiri dari 10.576 orang kualifikasi ahli dan 27.907 orang kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil), GAP tenaga kerja sektor konstruksi sebesar 66.912 orang (63,49%).

Gambar 2.5.
Persentase Jumlah Tenaga Ahli dan Jumlah Tenaga Terampil
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022



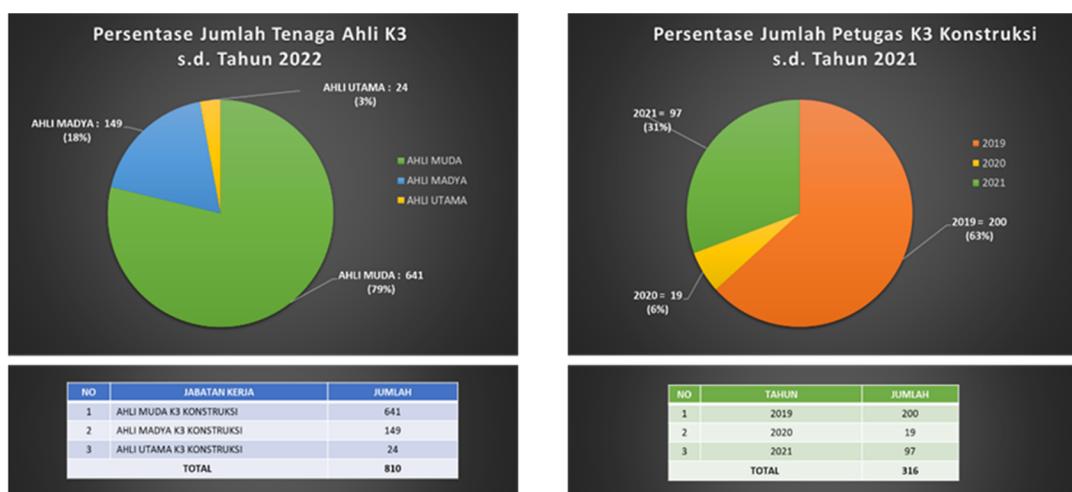
Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK, karena SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung

Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan, maka diperlukan Ahli Keselamatan Konstruksi dan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Petugas K3 Konstruksi

Pada tahun 2018 penerbitan SKA K3 Konstruksi dan Sertifikat Petugas K3 Konstruksi di Kalimantan Timur terhitung masih sangat minim sekali bila dibandingkan dengan jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di Kalimantan Timur, di mana jumlah Ahli Muda Konstruksi sebesar 90 persen dan Ahli Madya sebesar 10% dan Ahli Utama masih belum ada di Kalimantan Timur. Kapasitas Provinsi dalam mencetak petugas K3 Konstruksi hanya berjumlah 196 orang saja yang dapat dihasilkan dari program dan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Gambar 2.6.
Jumlah Tenaga Ahli dan Petugas K3 Konstruksi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



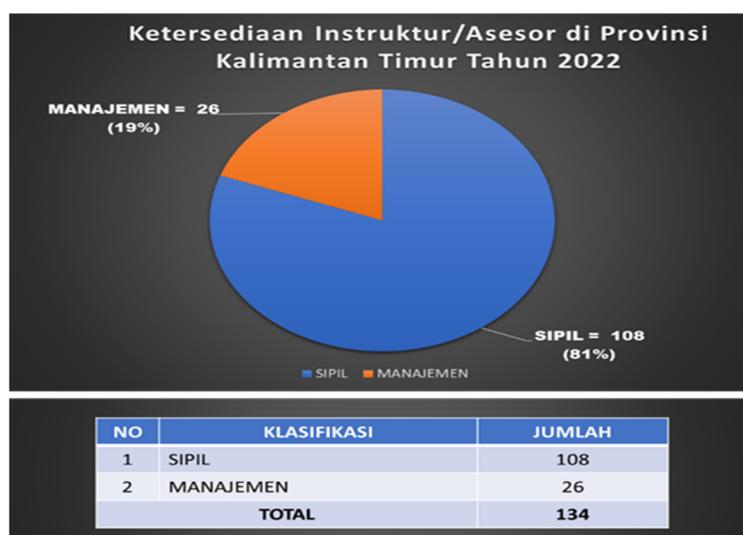
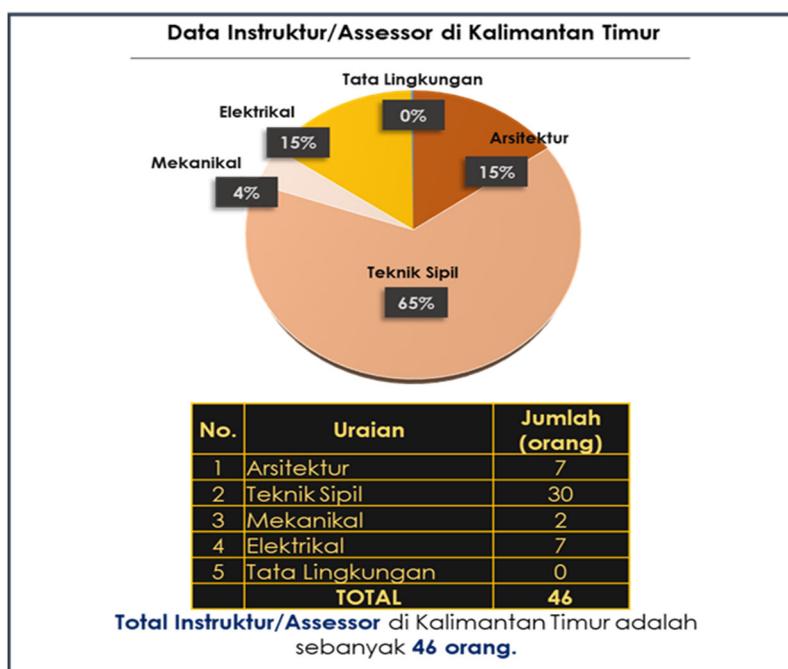
Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Provinsi Kalimantan Timur merupakan keharusan sebagai persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi, hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Salah satunya adalah kewajiban Tidak terkecuali ahli K3 Konstruksi. Dalam mengerjakan semua tahapan pembangunan

infrastruktur (perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran) suatu bangunan, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama semua pihak sehingga tujuan selamat untuk semua dapat tercapai, sehingga dituntut kompetensi kualifikasi ahli K3 konstruksi dan Petugas Konstruksi.

Melihat dari sisi kebutuhan, Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah tenaga ahli K3 Konstruksi sebesar 145 orang, dengan rincian kualifikasi ahli muda 130 orang dan untuk ahli madya 15 orang. Sedangkan untuk jenjang kualifikasi terampil yang sering kita sebut sebagai Petugas K3 Konstruksi, jumlah Petugas K3 konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2017 tersebut sebesar 196 orang

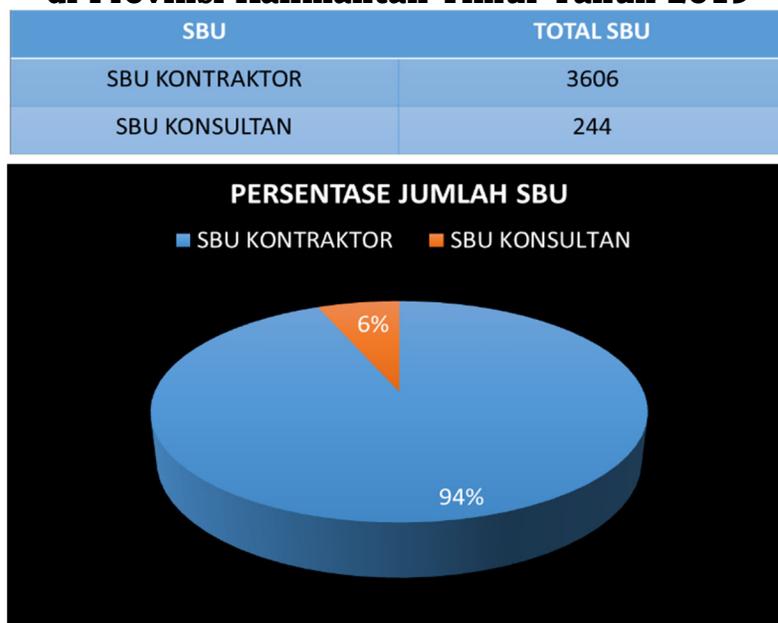
Gambar 2.7.
Ketersediaan Instruktur/Assessor di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021



Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Berdasarkan data dari LPJK bahwa Jumlah BUJK di Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 2.398 Perusahaan, terdiri dari jenis badan usaha dan kualifikasi badan usaha. jenis Badan Usaha terdiri dari Jasa Konsultansi 188 BUJK dan Kontraktor 2.210 BUJK. Kualifikasi Badan Usaha terdiri dari: Besar 28 BUJK, Menengah 425 BUJK, dan Kecil 1.936 BUJK.

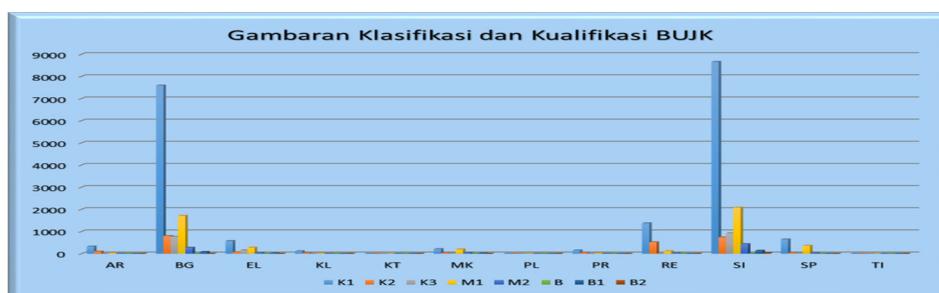
Gambar 2.8.
Jumlah Sertifikat Badan Usaha (SBU)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



Sumber: LPJK Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Berdasarkan Jenis Badan Usaha Kontraktor mendominasi sebesar 92,16 persen dibandingkan Konsultan. Kualifikasi BUJK dari Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang ada, masih didominasi oleh SBU dengan Kualifikasi Kecil mencapai 81,04 persen, dan Kualifikasi Menengah mencapai 17,79 persen yang yang paling rendah adalah Kualifikasi besar yang hanya mencapai 1,17 persen.

Gambar 2.9.
Gambaran Klasifikasi dan Kualifikasi BUJK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018



Sumber: Bina Konstruksi, 2019

Capaian pembinaan jasa konstruksi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sampai dengan tahun 2018 berjumlah 592 Orang. Terdapat beberapa Bimbingan Teknis seperti Bimbingan Teknis Peraturan, Pelatihan Pengawasan Jalan dan Jembatan, Pelatihan Hukum Kontrak, Pelatihan SMK3 Konstruksi, Pelatihan E-Procurement, Pelatihan aparatur Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Tahun 2019 sampai dengan 2022 dilakukan pembinaan melalui Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Penting Sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli, Pengawasan dan Monitoring, Workshop, Rapat Koordinasi, Forum Jasa Konstruksi.

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat tren penurunan Pembinaan SDM sektor Konstruksi di Indonesia bahkan di dunia karena mengalami pandemi COVID-2019 dan Varian Delta yang banyak memakan korban jiwa sehingga di Indonesia diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan Pembinaan yang biasa dilaksanakan bertatap muka langsung karena tidak semua SDM Aparatur memahami era digitalisasi.

Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan, kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi terdiri dari Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial dan Kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (Dua Puluh) jam pelajaran dalam 1 (Satu) tahun. Pada tahun 2022 pertama kalinya Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kerja sama dengan BPSDM Kementerian PUPR sebagai wujud melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Timur dan diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur PUPR memiliki sertifikat dan kompeten sama dengan tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat dan berkompeten sehingga pengguna jasa dan penyedia jasa dapat melaksanakan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pembinaan jasa Konstruksi untuk peningkatan sumber daya manusia aparatur PUPR di Kalimantan Timur tahun 2019-2022 melalui

Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Kegiatan Penyelenggaraan Tenaga Ahli, sebanyak 424 Orang, pada tahun 2019 yang dilakukan pembinaan sebanyak 139 orang pada tahun 2020 sebanyak 29 orang pada tahun 2021 sebanyak 43 orang dan terjadi kenaikan yang signifikan sebesar lebih dari 100% yaitu pada tahun 2022 jumlah SDM PUPR yang dibina sebanyak 242 orang

Tabel 2.37.
Capaian Peningkatan SDM (Aparatur dan Non Aparatur) Pada Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2019-2020 dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2021-2022

No.	Nama Kegiatan	Realisasi Jumlah Peserta (Orang)	Tahun
I.	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi		
1	Bimbingan Teknis Hukum Kontrak	30	2019
2	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (Angkatan 1 dan 2)	50	
3	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (Angkatan 3 dan 4)	59	
Jumlah		139	
II.	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	130	
1	Bimbingan Teknis Permen No. 14 Tahun 2020 / Permen No. 21/PRT/2019 / Bimtek Pengawasan	29	2020
Jumlah		29	
III.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Bina Konstruksi (PBJ & Permen PUPR 10/2021)	17	2021
2	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	26	
Jumlah		43	
IV.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
1	Pembinaan K3 Konstruksi	46	2022
2	Pembekalan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	27	
3	Pembekalan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30	
4	Bimbingan Teknis Pengawasan Pekerjaan Jasa Konstruksi	47	
5	Pembekalan Penyelenggaraan Rantai Pasok Konstruksi	50	
6	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	42	
Jumlah		242	
Jumlah 2019 sampai dengan 2022		424	

Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Setiap kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi dalam melaksanakan operasionalnya harus memiliki izin usaha jasa konstruksi (IUJK), maka dilakukan pengawasan dan monitoring tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terhadap IUJK menjadi kewenangan dan tanggung jawab sub urusan jasa konstruksi di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Sub-Sektor Jasa Konstruksi termasuk kategori Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah tinggi maka tidak ada lagi penerbitan IUJK, pelaku usaha pada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi untuk menyelenggarakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia

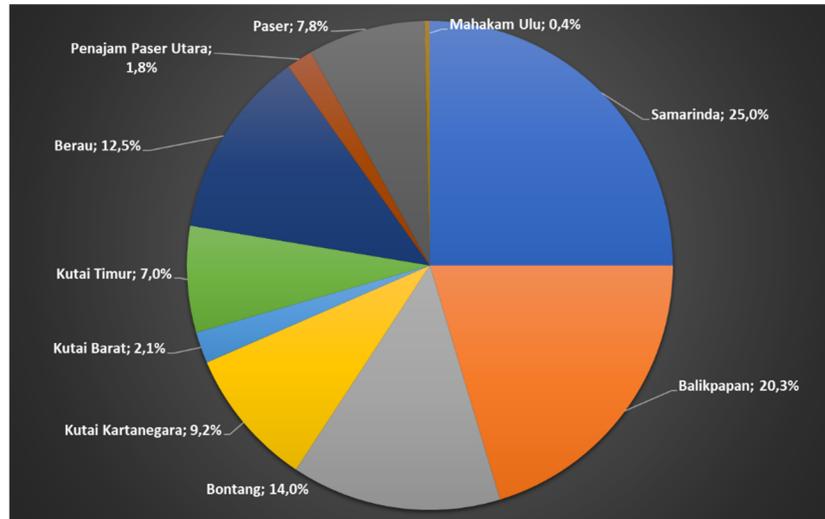
Tabel 2.38.
Hasil Monitoring IUJK ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

No	Kabupaten/Kota	2019	2020
1	Kota Samarinda	278	134
2	Kota Balikpapan	115	220
3	Kota Bontang	165	65
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	76	76
5	Kabupaten Kutai Barat	7	27
6	Kabupaten Kutai Timur	40	176
7	Kabupaten Berau	72	134
8	Kabupaten Penajam PaserUtara	12	17
9	Kabupaten Paser	64	64
10	Kabupaten Mahakam Ulu	1	5

Sumber: Bina Konstruksi, 2021

Komposisi penerbitan IUJK di kabupaten/kota selama kurun waktu 2019-2020 menunjukkan bahwa Kota Samarinda adalah yang terbesar dalam penerbitan IUJK yang mencapai 25 persen, Kota Balikpapan mencapai 20,3 persen, sementara kabupaten/kota lain berkisar antara 0,4–14 persen dari total jumlah IUJK yang diterbitkan sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 2.10.
Persentase IUJK ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020



Sumber: Bina Konstruksi, 2021

2.3.2. Realisasi Anggaran

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah pada periode tahun 2016-2022 digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang.

Tabel 2.39.

**Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Dinas PUPR-PERA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022**

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Terhadap Rencana Anggaran
2019	1.544.774.267.711,74	1.169.689.898.155,72	75,72
2020	1.223.081.936.274,18	1.087.228.973.047,35	88,89
2021	1.556.506.358.294,00	1.303.329.304.098,28	83,73
2022	1.585.987.075.102,00	1.320.139.322.603,86	83,24

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPUPR-PERA Prov. Kaltim, 2019 sampai 2022

Dari tabel tersebut diatas, realisasi tertinggi sebesar 88,89 persen di tahun 2020, realisasi terendah sebesar 75,72 persen di tahun 2019. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rencana target dan anggaran untuk setiap sub kegiatan perlu disusun dengan efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran Renstra PD dan sasaran RPD yang terkait tugas dan fungsi dinas.

Sehubungan dengan realiasi anggaran dinas per tahun, maka perlu juga diketahui tingkat penyerapan anggaran program. Pada tabel di bawah disajikan informasi mengenai target dan realisasi anggaran program Dinas PUPR-PERA periode tahun 2019-2022. Dalam tabel tersebut terdapat program yang hanya dilaksanakan pada tahun tertentu sebab adanya perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat, selain itu adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra pada tahun 2021.

Tabel 2.40.
Target dan Realisasi Anggaran Program Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

NO.	PROGRAM	TARGET				REALISASI				TINGKAT CAPAIAN (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.795.124.000,00	16.119.883.657,50	-	-	15.285.471.100,00	14.907.004.190,00	-	-	91,01	92,48		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.814.877.150,00	9.773.057.653,00	-	-	17.753.419.698,00	9.039.489.760,80	-	-	94,36	92,49		
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	4.332.525.000,00	1.857.700.000,00	-	-	4.115.676.979,00	1.613.961.640,00	-	-	94,99	86,88		
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	941.317.500,00	1.084.128.000,00	-	-	806.995.030,00	420.702.051,00	-	-	85,73	38,81		
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	619.548.262.397,00	345.785.622.064,00	-	-	412.831.639.257,13	280.814.038.814,43	-	-	66,63	81,21		
6	Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	51.460.350.000,00	53.619.455.631,25	-	-	43.046.082.032,80	48.306.411.418,12	-	-	83,65	90,09		
7	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	289.923.916.387,00	287.789.226.284,61	-	-	203.554.488.948,61	266.845.708.139,28	-	-	70,21	92,72		
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	195.977.580.817,74	109.489.614.652,80	106.173.593.992,00	104.329.160.525,00	140.591.772.456,19	83.009.884.974,00	88.697.136.662,83	44.652.720.298,00	71,74	75,82	83,54	42,80
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.297.172.500,00	5.392.026.496,00	7.492.280.000,00	8.578.763.700,00	5.546.232.903,00	5.084.754.765,00	6.786.010.461,00	7.772.712.791,00	88,07	94,30	90,57	90,60
10	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	3.471.800.000,00	3.023.812.500,00	-	-	3.180.923.691,00	2.667.597.716,00	-	-	91,62	88,22		
11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I	53.343.177.000,00	51.956.586.213,66	-	-	53.042.344.725,00	51.749.903.975,86	-	-	99,44	99,60		
12	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II	55.110.837.480,00	57.761.942.743,00	-	-	54.830.290.039,00	57.750.257.711,00	-	-	99,49	99,98		
13	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi	32.500.000.000,00	45.328.768.320,00	-	-	31.381.176.800,00	45.283.913.000,00	-	-	96,56	99,90		

NO.	PROGRAM	TARGET				REALISASI				TINGKAT CAPAIAN (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Wilayah III												
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	111.108.427.632,00	99.862.470.973,00	-	-	97.369.425.530,87	84.814.439.576,00			87,63	84,93
15	Program Penyelenggaraan Jalan	-	-	765.958.058.272,00	788.197.691.713,00	-	-	668.551.038.741,94	664.736.396.250,00			87,28	84,34
16	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	3.202.003.010,00	43.429.770.275,00	-	-	2.672.101.586,69	41.230.752.133,44			83,45	94,94
17	Program Kawasan Permukiman	-	-	43.282.908.990,00	43.919.674.978,00	-	-	38.813.473.166,16	38.635.518.094,42			89,67	87,97
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	44.981.874.700,00	167.249.167.064,00	-	-	35.787.481.546,92	136.777.317.877,00			79,56	81,78
19	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	61.650.000,00	98.270.000,00			61,65	98,27
20	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-	1.141.298.300,00	761.160.000,00	-	-	1.009.085.482,00	709.410.460,00			88,42	93,20
21	Program Pengembangan Permukiman	-	-	134.706.700,00		-	-	40.524.150,00				30,08	
22	Program Penataan Bangunan Gedung	-	-	269.161.605.069,00	209.235.567.886,00	-	-	199.035.364.609,95	195.497.844.889,00			73,95	93,43
23	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-	-	173.834.170.602,00	100.425.721.528,00	-	-	150.221.279.311,22	90.020.864.020,00			86,42	89,64
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	24.276.456.494,00	10.739.754.460,00	-	-	11.533.907.796,70	7.768.724.513,00			47,51	72,34
25	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	3.471.800.000,00	3.023.812.500,00			2.798.288.211,00	2.655.933.716,00	2.388.555.784	6.507.984.922	97,17/93,28	88,09/87,83		
26	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			5.335.166.000,00	8.278.230.000,00			2.338.555.784,00	6.507.984.922,00			81,13/44,77	96,25/78,62
27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	323.808.533,00		-	-	306.123.848,00				94,54	
28	Program Pengembangan Perumahan	-	-		879.942.000,00	-	-		800.164.180,00				90,93

Sumber: - LKJIP Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, 2020, dan 2021, diolah
- Evaluasi Hasil Renja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR-PERA bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Kelompok sasaran diartikan sebagai pihak yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan kerja dinas. Kelompok sasaran layanan yang menjadi target dapat disajikan per bidang, sebagai berikut:

- a. Bidang Sumber Daya Air: masyarakat khususnya petani, masyarakat di sekitar sungai/danau/laut, dan masyarakat di lokasi potensi banjir, serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Bidang Bina Marga: masyarakat sebagai pengguna jalan provinsi.
- c. Bidang Cipta Karya: masyarakat penggunaan air minum, masyarakat pengguna sistem air limbah domestik, pihak yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik, pihak yang terlibat dalam pengelolaan drainase lingkungan, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan persampahan, serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Bidang Bina Konstruksi: Masyarakat jasa konstruksi terdiri asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan kerja konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa, perguruan tinggi/pakar, pelaku rantai pasok, tenaga kerja konstruksi, pemerhati konstruksi, lembaga sertifikasi jasa konstruksi dan pemanfaat produk jasa konstruksi.
- e. Bidang Perumahan dan Permukiman: masyarakat terkait perumahan dan permukiman, pelaku usaha/swasta terkait penyediaan perumahan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- f. Bidang Penataan Ruang: masyarakat dan pelaku usaha terkait pemanfaatan ruang dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur terkait penyusunan RTRW dan RRTR.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pelayanan dinas yang disajikan pada subbab ini adalah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang memiliki daya ungkit dan menjadi prioritas daerah.

Rumusan permasalahan pelayanan dinas tidak lepas dari permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan daerah pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang memiliki keterkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, yaitu: 1) masih relatif tingginya angka kemiskinan yang salah satu penyebabnya adalah masih terdapat hunian dengan kondisi tidak layak huni; dan 2) belum terpenuhinya pemerataan dan pemenuhan infrastruktur yang antara lain dipicu oleh belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jalan dalam mendukung pendistribusian barang dan jasa, masih rendahnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air, belum meratanya pemenuhan infrastruktur air minum, belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang, dan masih terdapat kawasan permukiman yang masuk kategori kumuh. Adapun masalah pokok daerah yang diturunkan ke masalah dan akar masalah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, dimuat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

**Permasalahan Daerah dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026
Terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi daerah	Masih relatif tingginya angka kemiskinan	Masih terdapat hunian dengan kondisi tidak layak huni
	Belum terpenuhinya pemerataan dan pemenuhan infrastruktur	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jalan dalam mendukung pendistribusian barang dan jasa
		Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air
		Belum meratanya pemenuhan infrastruktur air minum
		Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
		Masih terdapat kawasan permukiman yang masuk kategori kumuh

Sumber: RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Masalah dan akar masalah dalam RPD yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat didukung dengan hasil identifikasi permasalahan di tingkat perangkat daerah. Adapun masalah pokok dinas adalah belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar, dan penyediaan permukiman yang layak masih belum optimal. Lebih lanjut, masalah pokok tersebut dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Belum optimalnya konektivitas & aksesibilitas terutama menuju kawasan strategis provinsi	- Kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan
		- Kelas jalan belum sesuai dengan peruntukan
		- Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik
		- Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan
		- Belum lengkapnya bukti syah kepemilikan lahan yang menghambat proses pengelolaan jalan
		- Adanya mekanisme keperdataan dalam proses pengadaan lahan dan juga untuk meminimalisir dampak pengadaan lahan pada masyarakat sehingga membutuhkan waktu, turut menyebabkan lambannya kinerja pembangunan jalan dan jembatan
	- Dinamika perkembangan transportasi yang sangat pesat dan tidak dapat segera terantisipasi	
	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Belum Optimal	- Masih adanya bangunan gedung pemerintah yg belum memadai
		- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemakai bangunan gedung
	Masih rendahnya ketersediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air	- Regulasi terkait penataan bangunan dan lingkungan serta pengelolaan prasarana dan sarana bangunan belum terlaksana dengan baik
- Belum optimalnya kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan irigasi teknis		
		- Ketersediaan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum memadai

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan jangkauan pelayanan bendung/embung - Terbatasnya sumber air baku - Belum sinkronnya strategi dan arah kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan pekerjaan umum (pengairan) - Kurangnya data dan informasi lahan pertanian eksiting - Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pemenuhan jaringan irigasi - Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP
	Belum optimalnya dan masih rendahnya pengendalian daya rusak air	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbangunnya pengendali banjir - Masalah sosial dan lahan - Masih rendahnya implementasi dokumen pola dan rencana pengelolaan DAS - Belum optimalnya sistem pengendali banjir - Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali - Sistem drainase dan sarana pendukungnya yang belum berfungsi baik - Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP - Masih rendahnya infrastruktur penanganan pantai kritis - Belum optimalnya penanganan pantai kritis - Belum terbangunnya infrastruktur penanganan pantai kritis - Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi
	Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas dan kuantitas dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) serta tingginya dinamika kebijakan dan regulasi pembangunan pada lingkup provinsi serta kabupaten/kota - Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana tata ruang antara Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota. - Kurangnya pemahaman publik terkait penataan ruang - Sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan secara maksimal - Rendahnya peran sistem informasi penataan ruang untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan penataan ruang - Belum adanya instrumen pengendalian yang komprehensif - Kurang optimalnya penertiban pemanfaatan ruang
	Masih ada penduduk yang belum mendapatkan layanan air minum layak dan aman.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kelembagaan pengelola dan dokumen perencanaan infrastruktur layanan dasar SPAM Regional secara lengkap - Terdapat kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku yang handal untuk air minum, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas - Belum tersedianya prasarana yang memberikan layanan air minum curah lintas kab/kota - Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi untuk mencapai akses universal (100%) air minum layak - Kondisi geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan penyediaan layanan air minum dengan sistem regional tidak efisien untuk dilakukan - Penanganan air minum masih difokuskan untuk akses layak universal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	Belum seluruh penduduk Kaltim memperoleh layanan air limbah dan sanitasi layak (terutama yang berada dalam cakupan kewenangan provinsi).	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pelayanan air limbah terpusat belum optimal - Belum tersedianya prasarana pengolahan air limbah domestik skala regional, berikut dengan kesiapan lembaga pengelola dan perencanaan teknis yang lengkap 	
	Belum optimalnya Penanganan Sampah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir) - Belum tersedia pengelolaan persampahan yang berorientasi 3R (dari hulu ke hilir). 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau Reuse, Reduce dan Recycle (3R) 	
	Selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kerja sektor konstruksi sebesar 66.912 orang (63,49%)	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil) kewenangan kabupaten/kota mendominasi kesenjangan	
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Penyediaan permukiman yang layak masih belum optimal	Masih ada penduduk yang tinggal di permukiman tidak layak yakni dengan kondisi dan kualitas lingkungan dibawah standar kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu perhatian Pemerintah Provinsi - Sebagian besar rumah dikawasan kumuh berada di kawasan bantaran sunga - biasanya lahan merupakan milik pemerintah - warganya tidak memiliki sertifikat - Update SK Kumuh terjadi ditengah tahun pelaksanaan jangka menengah daerah sehingga mengganggu perhitungan capaian - Penanganan belum tepat sasaran, pelaksanaan penanganan kumuh bukan merupakan bagian dari aspek kumuh yang dapat mengurangi skor kekumuhan - Penguasaan lahan telah lebih dahulu daripada penetapan rencana tata ruang - Penguasaan lahan oleh masyarakat tanpa bukti kepemilikan yang syah - Ketidakjelasan kriteria penentuan luasan untuk klasifikasi kewenangan - Proses Pendataan yang belum sempurna - Keterbatasan finansial warga untuk membeli atau membangun rumah yang layak huni - Penerapan SPM Perumahan dapat dipenuhi pasca terjadinya bencana (setelah ada penetapan bencana provinsi). Hanya bisa dilakukan tahap-tahap sebelumnya 	
		Masih ada Rumah Tangga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat warga yang tinggal di wilayah rawan bencana - Terdapat warga yang berpotensi terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi - Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk korban bencana tingkat provinsi - Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk warga yang terkena relokasi program pemerintah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Penentuan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur mempertimbangkan isu strategis daerah dalam RPD, telaahan rencana pembangunan IKN, dan permasalahan layanan dinas.

3.3. Telaahan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Ibu Kota Negara bernama Nusantara (Ibu Kota Nusantara) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara meliputi: a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).

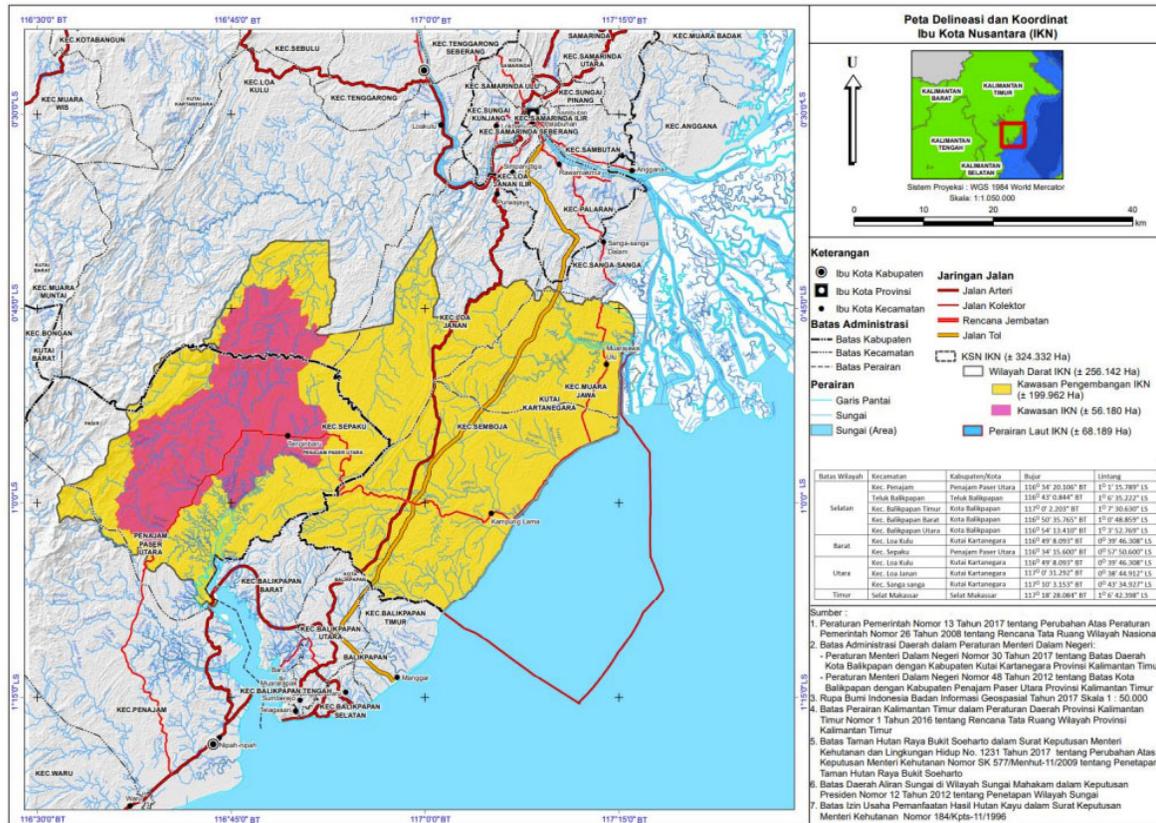
Batas wilayah Ibu Kota Nusantara yaitu:

- 1) sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- 2) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- 4) sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Wilayah IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 256.142 hektare. Sementara Wilayah

Kawasan Ibu Kota Nusantara memiliki luas kurang lebih 56.180 hektare, terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 3.1.
Peta Wilayah Ibu Kota Nusantara



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi ekonomi di IKN dan Provinsi Kalimantan Timur serta Daerah Mitra di Pulau Kalimantan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui kerjasama IKN dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kerangka implementasi kerjasama pembangunan IKN yang diarahkan oleh Pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:

1. Sektor Ekonomi dan Industri
 - a. Kawasan Industri Kariangau (Kota Balikpapan).
 - b. Kawasan Industri Buluminung (Kabupaten Penajam Paser Utara).
 - c. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kabupaten Kutai Timur).

Kerjasama: Perencanaan pembangunan fasilitas dan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, pelibatan masyarakat dan promosi investasi.

2. Logistik dan Konektivitas

- a. Logistik dan konektivitas antarpusat kegiatan di wilayah IKN.
- b. Simpul dan jaringan di luar wilayah IKN (Kota Balikpapan dan Samarinda).
- c. Akses jalur nasional dan internasional.

Kerjasama: Penguatan sistem logistik dan konektivitas pengembangan IKN sebagai superhub ekonomi, penguatan simpul dan jaringan tingkat regional (pintu masuk dan hub ke IKN).

3. SDM dan Ketenagakerjaan

Sarana pendidikan dan kejuruan (wilayah IKN dan daerah mitra).

Kerjasama: Penambahan sarana pendidikan dan kejuruan, pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kuantitas tenaga kerja, penguatan pendidikan tinggi di daerah mitra untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai klaster ekonomi yang akan dikembangkan.

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Hutan lindung Sungai Wain
- b. Kawasan Ekosistem riparian Sungai Wain
- c. Kawasan Ekosistem Teluk Balikpapan
- d. Sungai Mahakam
- e. Koridor Sawa

Kerjasama: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah mitra, pembagian peran dalam pemulihan ekosistem terdegradasi serta pertahanan dan peningkatan fungsi ekosistem diluar wilayah IKN, pemeliharaan kawasan ekosistem esensial.

5. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Wisata alam, religi buatan dan kuliner (Kota Samarinda)
- b. Wisata alam Pesut Mahakam (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- c. Ekowisata pertanian hulu (Kabupaten Penajam Paser Utara)

Kerjasama: Pengembangan potensi pariwisata dan dapat didukung dengan konektivitas transportasi massal yang memadai.

6. Energi dan Ketenagalistrikan

- a. Smart grid (daerah mitra)
- b. Pembangkit listrik (Pulau Kalimantan)
- c. Jaringan transmisi dan distribusi pipa gas bumi Trans Kalimantan

d. Produksi gas hydrogen (diluas wilayah IKN)

Kerjasama: Peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan dan produksi gas serta pembangunan sistem smart grid yang akan melalui area di daerah mitra.

7. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang pertanian dan perikanan (Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara).

Kerjasama: Permanfaatan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan irigasi, sarana produksi perikanan, dan peralatan pendukung lainnya untuk mendukung sektor pertanian hulu dan kebutuhan pangan.

8. Pengelolaan SDA

Wilayah intake Sungai Mahakam (Kota Samarinda dan Balikpapan)

Bendungan Batu Lepek (Provinsi Kalimantan Timur)

Kerjasama: Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi lewat pengembangan pengelolaan sumber daya air terpadu.

Pembangunan IKN tentu membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit sampai dengan beberapa tahun kedepan. Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN dan menjadi mitra IKN memiliki peluang besar untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan IKN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 12.1/KPTS/Dk/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, Kualifikasi jenjang 1 – 8 dengan Klasifikasi Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan. Sesuai kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kualifikasi Ahli Jenjang 7 - 8 dan Kualifikasi Teknisi/Analisis dan Operator (Terampil) pada Jenjang 1 - 6. Potensi Tenaga Kerja Lokal Kalimantan Timur yang telah bersertifikat sebanyak 38.483 dengan rincian Kualifikasi Tenaga Ahli 10.576 dan Kualifikasi Tenaga Teknisi/Analisis dan Operator (Terampil) 27.907.

Tenaga Kerja Konstruksi yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN sebanyak 745.600 orang dengan 3 (tiga) skema yaitu:

a. Skema 1 (10 : 90)

➤ Kebutuhan TKK Pembangunan IKN

- Tenaga Ahli sebanyak 74.560 orang
- Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 671.040 orang

- Ketersediaan TKK Prov. Kalimantan Timur
 - Tenaga Ahli sebanyak 3.848 orang (14%)
 - Teknisi/Analis/Operator sebanyak 34.635 orang (4%)
- b. Skema 2 (15 : 85)
 - Kebutuhan TKK Pembangunan IKN
 - Tenaga Ahli sebanyak 111.840 orang
 - Teknisi/Analis/Operator sebanyak 633.760 orang
 - Ketersediaan TKK Prov. Kalimantan Timur
 - Tenaga Ahli sebanyak 5.722 orang (9%)
 - Teknisi/Analis/Operator sebanyak 32.711 orang (4%)
- c. Skema 3 (20 : 80)
 - Kebutuhan TKK Pembangunan IKN
 - Tenaga Ahli sebanyak 149.120 orang
 - Teknisi/Analis/Operator sebanyak 596.480
 - Ketersediaan TKK Prov. Kalimantan Timur
 - Tenaga Ahli sebanyak 7.697 orang (7%)
 - Teknisi/Analis/Operator sebanyak 30.786 orang (5%)

3.4. Telaahan Isu Strategis Daerah dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Isu strategis daerah yang dimuat dalam Rancangan RPD menjadi bagian penting untuk ditelaah dalam merumuskan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026. Dari sejumlah isu strategis daerah, terdapat 2 (dua) isu yaitu isu 2 dan isu 3 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Adapun kedua isu strategis tersebut, meliputi:

Isu 2: Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Kalimantan Timur beberapa tahun diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur.

Isu 3: Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Negara Nusantara memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian negara. Perlu ketersediaan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan IKN.

Masalah utama yang ditemui adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata. Pesatnya dinamika perkembangan transportasi menjadi tantangan bagaimana ketersediaan infrastruktur yang ada sudah atau belum menunjang. Oleh karena itu sangat perlu dipertimbangkan adanya pembangunan jalan baru yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peningkatan jalan dan jembatan. Hal ini sangat berkaitan dengan proses pengadaan lahan. Pengadaan lahan membutuhkan perencanaan yang sistematis, pembiayaan/ anggaran yang cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta kendala sosial ekonomi dan keperdataan yang cukup kompleks.

Selain itu, kondisi infrastruktur yang sebagian tidak dalam kondisi baik, menyebabkan pelayanan tidak optimal. Terjadi kerusakan pada beberapa ruas jalan yang disebabkan faktor Over Load di beberapa ruas jalan sehingga perlu penanganan serius dengan meningkatkan kapasitas jalan atau membuat jaringan jalan khusus untuk moda transportasi pertambangan dan perkebunan sawit serta penegakan hukum terkait penggunaan jalan.

Faktor cuaca ekstrim dan kondisi alam tidak jarang menjadi kendala dalam pemenuhan infrastruktur. Dampak dari cuaca ekstrim dan kondisi alam terhadap infrastruktur pekerjaan umum sangat signifikan mulai dari genangan, banjir hingga dampak kerusakan infrastruktur yang lebih cepat.

3.5. Penetapan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan dengan

mempertimbangkan isu strategis daerah, permasalahan pelayanan dinas, juga potensi, peluang dan tantangan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan. Isu pembangunan IKN menjadi salah satu pertimbangan sebab pada fase awal pembangunan IKN tentu membutuhkan dukungan dan sinergi terutama infrastruktur dengan Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas serta tugas dan fungsi dari 2 (dua) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas, maka ditetapkan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2024-2026, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi:
 - a. Peningkatan konektivitas daerah
 - b. Peningkatan infrastruktur sumber daya air
 - c. Peningkatan akses air minum dan sanitasi
 - d. Peningkatan kualitas penataan bangunan dan gedung
 - e. Peningkatan kualitas penataan ruang
 - f. Peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi
2. Peningkatan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
3. Peningkatan akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026. Tujuan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk itu, Renstra Dinas PUPRPR disusun dengan tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan kewenangan pada kedua urusan tersebut dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan daerah provinsi. Lebih lanjut, penentuan tujuan dan sasaran dinas juga memerhatikan isu-isu strategis yang aktual terkait tugas dan fungsi dinas.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan 2 dan sasaran 6 serta sasaran 7 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar. Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), dengan target akhir periode mencapai 9,05.

Berdasarkan isu strategis dinas dan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimuat pada Tabel 4.1. Tujuan Renstra diturunkan ke sasaran-sasaran sampai tahun 2026 yang menggambarkan kinerja bidang-bidang sesuai tugas dan fungsi.

Isu strategis merupakan hal yang berdaya ungkit dan penting untuk dikedepankan dalam pelayanan perangkat daerah. Isu strategis untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 menjadi penentu perumusan sasaran strategis Renstra, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Isu Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang diterjemahkan kedalam sasaran Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Isu Peningkatan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman diterjemahkan kedalam sasaran Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- c. Isu Peningkatan akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah diterjemahkan kedalam sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian Tujuan **Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian** diukur dengan indikator: 1) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas; dan 2) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung. Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas meliputi komponen yang diprioritas yakni jalan, sumber daya air (irigasi, air baku, dan genangan banjir), air minum, jasa konstruksi, penataan ruang, dan kawasan kumuh. Komponen-komponen ini diprioritaskan pada kurun waktu 2024-2026 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026. Sementara indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung meliputi komponen

pantai kritis, persampahan, air limbah, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pengujian bahan konstruksi, penyelenggaraan SPM Perumahan, dan penanganan PSU Permukiman.

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2022	2023 (target)	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
T1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6,10	6,74	7,19	8,04	8,89	8,89
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0,40	1,56	3,41	4,98	6,85	6,85
S.1.1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas	Indeks	6,16	6,88	7,42	8,08	8,85	8,85
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung	Indeks	0,20	1,21	3,59	5,04	6,72	6,72
S.1.2	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Persen	55,02	56,84	53,03	76,87	100	100
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung	Indeks	1,45	2,26	3,00	4,93	7,37	7,37
T2	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Poin	84,41	84,60	85	85,50	86	86
S.2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	60,05	62,00	65,00	67,00	71,00	71,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82,09	82,09	82,20	82,44	82,70	82,70

Sumber: hasil proyeksi, 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas PUPRPR Tahun 2024-2026. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra PD dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD Kalimantan Timur.

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan RPD terkait infrastruktur. Strategi dan arah kebijakan RPD tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Table 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEHIJAKAN
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian		
Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Peningkatan fungsi pelayanan jalan	Pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
	Peningkatan kapasitas dan kinerja daerah aliran sungai dan drainase	Pengurangan sedimentasi dan sampah pada aliran sungai dan drainase
	Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana jaringan irigasi	Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi
	Peningkatan kapasitas dan kinerja daerah aliran sungai dan drainase	Pengurangan sedimentasi dan sampah pada aliran sungai dan drainase
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air minum	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum (SPAM)
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan persampahan	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana persampahan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air limbah
	Peningkatan kualitas	Perencanaan, pembangunan,

TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEHIJAKAN
	penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar	pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar
		Penataan bangunan dan lingkungan gedung sesuai standar
	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Pemberian fasilitasi dan koordinasi penataan ruang, penyusunan kebijakan penataan ruang
		Penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang, koordinasi dan sinkronisasi serta memaksimalkan fungsi sistem informasi penataan ruang
		Penyusunan kebijakan pengendalian, koordinasi serta pelaksanaan penertiban penegakan hukum
		Pelaksanaan kebijakan satu peta
	Peningkatan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
		Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
		Pengawasan Teknis Tertib Usaha Jasa Konstruksi, Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Peningkatan layanan kualitas kawasan permukiman
	Peningkatan rumah layak huni	Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni terutama untuk pemenuhan SPM perumahan rakyat
	Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Peningkatan kualitas layanan PSU
Tujuan 2: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas		
Sasaran 2.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
		Peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM, serta peningkatan mutu layanan administrasi keuangan, umum, pendukung, dan sarana prasarana perkantoran
		Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dinas, maka telah dipilih strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara atau upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Lebih lanjut, arah kebijakan menjadi dasar untuk menentukan kinerja yang akan dihasilkan oleh dinas. Kinerja hasil (*outcome*) diwujudkan dalam bentuk program perangkat daerah yang dilengkapi dengan kegiatan dan subkegiatan. Nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sementara Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026, dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku; dan

7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dinas selain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD, juga ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Terdapat beberapa *major project* yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPD. *Major project* di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat diarahkan untuk mendukung sasaran 6 dan sasaran 7 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar. Adapun *major project* dimaksud, meliputi:

- 1) Rekonstruksi jalan
- 2) Pembangunan jalan
- 3) Pembangunan Air Baku
- 4) Pembangunan SPAM Regional
- 5) Penanganan banjir perkotaan
- 6) 1000 unit/tahun Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu
- 7) Penanganan 6 kawasan kumuh di 6 Kab/Kota : Bontang (Kampung Kuala Bahari/Kampung Pesisir Kel. Tj Laut Indah, Tj Limau Kel. Gunung Elai), Balikpapan (Kampung Pesisir Kel. Klandasan Ilir), Samarinda, Kukar, Kubar dan Berau

Penentuan program dinas berdasarkan kinerja yang akan dihasilkan untuk mewujudkan sasaran strategis Renstra PD, berdasarkan strategi dan arah kebijakan. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada Tabel VI.1 Program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja dan pagu indikatif per tahun serta lokasi dari setiap sub kegiatan.

Tabel. 6. 1 Rencana Program dan Kegiatan DPUPR PERA 2024-2026

MISI /TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)		
TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6.10	7.19	1,936,264,515,363	8.04	2,985,277,046,115.00	8.89	3,776,764,453,783	8.89	8,698,306,015,261			
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0.40	3.41	223,548,920,630	4.98	158,175,296,800.00	6.85	181,251,301,372	6.85	562,975,518,802			
	SASARAN 1.1 : Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas	Indeks	6.16	7.42	1,785,565,671,363	8.08	2,888,927,046,115.00	8.85	3,634,764,453,783	8.85	8,309,257,171,261			
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan	Indeks	0.20	3.59	170,449,796,800	5.04	92,175,296,800.00	6.72	111,251,301,372	6.72	373,876,394,972			

		Umum dan Penataan Ruang Prndukung												
	SUMBER DAYA AIR				360,716,477,680		172,450,000,000.00		198,950,663,667		732,117,141,347			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8,940.00	9,460	92,650,000,000	9,730	35,400,000,000.00	10,030	43,300,000,000	10,030.00	171,350,000,000		
		Panjang pantai kritis yang ditangani **	Km	0.45	2.80	95,474,500,000	0.33	27,000,000,000.00	0.63	35,193,992,882	4.71	157,668,492,882		
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	239.00	94.00	77,900,000,000	60.00	54,000,000,000.00	50.00	40,100,000,000	443.00	172,000,000,000		
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87.40	70.00	51,041,977,680	140.00	28,483,652,400.00	210.00	44,606,670,785	210.00	124,132,300,865		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	5,158.00	5,480.00	51,041,977,680	4,801.86	28,483,652,400.00	7,669.29	44,606,670,785	17,951.15	124,132,300,865		Samarinda, Bontang, Kutai Timur
		Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	0.00	6.00	77,900,000,000	3.00	54,000,000,000.00	1.00	40,100,000,000	10.00	172,000,000,000		Balikpapan, Bontang, Samarinda
		Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi	1.00	7.00	95,474,500,000	6.00	27,000,000,000.00	6.00	35,193,992,882	19.00	157,668,492,882		Berau, PPU, Balikpapan

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	7.00	15.00	28,800,000,000	3.00	6,400,000,000.00	1.00	5,000,000,000	19.00	40,200,000,000		10 Kab Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	14.00	14.00	6,824,500,000	10.00	4,750,000,000.00	3.00	2,250,000,000	27.00	13,824,500,000		10 Kab Kota
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang terbangun	Unit	-			1.00	5,000,000,000.00	3.00	20,550,000,000	4.00	25,550,000,000		Bontang
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	-	5.00	20,550,000,000	3.00	6,600,000,000.00			8.00	27,150,000,000		Balikpapan, Bontang, Samarinda
Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	-	1.00	28,550,000,000	1.00	36,000,000,000.00	1.00	14,550,000,000	1.00	79,100,000,000		Bontang
Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM	-	0.20	6,550,000,000					0.20	6,550,000,000		Balikpapan
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0.45	2.68	82,100,000,000	0.34	22,250,000,000.00	0.63	32,943,992,882	3.65	137,293,992,882		Berau, PPU, Balikpapan

Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	5.16	5.48	42,800,000,000	4.80	25,000,000,000.00	7.67	41,123,018,385	17.95	108,923,018,385	Samarinda, Bontang, Kutai Timur
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	1.00	1.00	758,995,000	1.00	758,995,000.00	1.00	758,995,000	3.00	2,276,985,000	10 Kab Kota
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	10.00	6.00	6,855,736,980	6.00	2,097,411,700.00	6.00	2,097,411,700	18.00	11,050,560,380	Balikpapan, Samarinda, Berau
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	3.00	1.00	349,956,000	1.00	349,956,000.00	1.00	349,956,000	3.00	1,049,868,000	Berau, Kutim, Kukar, Bontang
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	1.00	1.00	277,289,700	1.00	277,289,700.00	1.00	277,289,700	3.00	831,869,100	Balikpapan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	2,014.00	1,940.00	92,650,000,000	3,838.46	35,400,000.00	5,387.17	43,300,000,000	11,165.63	171,350,000,000		Berau, Kukur, Paser
Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	3.00	8.00	4,400,000,000	7.00	2,300,000,000.00	2.00	1,400,000,000	17.00	8,100,000,000		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2.01	1.78	83,850,000,000	2.46	26,900,000,000.00	2.91	31,700,000,000	7.16	142,450,000,000		Berau, Kukur
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	-	0.16	4,400,000,000	1.38	6,200,000,000.00	2.48	10,200,000,000	4.01	20,800,000,000		Paser, Kukur
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	7.82	11.15	43,650,000,000	12.76	27,566,347,600.00	14.89	35,750,000,000.00	14.89	106,966,347,600.00		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	meter	2,723.70	1,469.00	43,650,000,000	710.00	27,566,347,600.00	944.00	35,750,000,000	3,123.00	106,966,347,600		Samarinda, Balikpapan, Kutim

	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	1.00	6.00	2,650,000,000	5.00	2,750,000,000.00	5.00	2,750,000,000	16.00	8,150,000,000		Samarinda, Balikpapan, Kutim
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	1.00	6.00	41,000,000,000	5.00	24,816,347,600.00	5.00	33,000,000,000	16.00	98,816,347,600		Samarinda, Balikpapan, Kutim
BIDANG CIPTA KARYA						1,049,620,761,131		1,011,900,708,908.00		748,145,229,598		2,809,666,699,637		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	39.15	57.65	165,500,000,000	83.40	193,651,696,848.00	100.00	211,144,621,588	100.00	570,296,318,436		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	Unit	2.00	3.00	165,500,000,000	5.00	193,651,696,848.00	3.00	211,144,621,588	13.00	570,296,318,436		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2.00	7.00	8,220,000,000	4.00	5,550,000,000.00	5.00	7,100,000,000	18.00	20,870,000,000		Samarinda
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	lt/dt	-	70.00	156,030,000,000	70.00	186,851,696,848.00	85.00	202,794,621,588	225.00	545,676,318,436		Kukar, Bonta

Lintas Kabupaten/Kota	Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun													ng, Kutim, Paser, PPU
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab/kota	3.00	5.00	450,000,000	5.00	450,000,000.00	5.00	450,000,000	5.00	1,350,000,000			
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab/kota	10.00	10.00	800,000,000	10.00	800,000,000.00	10.00	800,000,000	10.00	2,400,000,000			
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	%	10.00	17.50	1,000,000,000	25.00	1,000,000,000.00	40.00	1,500,000,000.00	40.00	3,500,000,000.00			
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	Dokumen	1.00	1.00	1,000,000,000	1.00	1,000,000,000.00	2.00	1,500,000,000.00	5.00	3,500,000,000.00			
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	25.00	25.00	550,000,000	25.00	500,000,000.00	25.00	500,000,000	100.00	1,550,000,000			PPU

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	1.00	1.00	450,000,000	1.00	500,000,000.00	2.00	1,000,000,000	5.00	1,950,000,000		Samarinda, Kukar
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	%	17.50	32.50	3,500,000,000	42.00	3,500,000,000.00	46.00	8,882,011,690.00	46.00	15,882,011,690.00		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	Dokumen	1.00	2.00	3,500,000,000	2.00	3,500,000,000.00	1.00	8,882,011,690.00	6.00	15,882,011,690.00		
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	25.00	25.00	1,250,000,000	25.00	750,000,000.00	25.00	500,000,000	100.00	2,500,000,000		PPU
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1.00	3.00	2,250,000,000	2.00	2,100,000,000.00	1.00	500,000,000	7.00	4,850,000,000		Samarinda, Kukar
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan	Kab/kota	2.00	2.00		2.00	650,000,000.00	2.00	7,882,011,690	2.00	8,532,011,690		Samarinda, Kukar

Lintas Kabupaten/Kota	Air Limbah Domestik (SPALD)												
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	%	-	50.00	30,000,000,000	75.00	40,000,000,000.00	100.00	40,000,000,000.00	100.00	110,000,000,000.00		
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	Kawasan	-	4.00	30,000,000,000	2.00	40,000,000,000.00	2.00	40,000,000,000.00	8.00	110,000,000,000.00		
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit		4.00	30,000,000,000	2.00	40,000,000,000.00	2.00	40,000,000,000	8.00	110,000,000,000		Samarinda, Balikpapan, Berau, Kutubaru, Kutim, PPU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	%	11.03	59.77	809,620,761,131	83.58	753,749,012,060.00	100.00	461,618,596,320.00	100.00	2,024,988,369,511.00		
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	6.00	15.00	809,620,761,131	9.00	753,749,012,060.00	6.00	461,618,596,320.00	36.00	2,024,988,369,511.00		

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	6.00	19.00	22,500,000,000	10.00	16,200,000,000.00	5.00	9,100,000,000	40.00	47,800,000,000		Samarinda, Balikpapan
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	6.00	16.00	785,470,761,876	9.00	736,249,012,060.00	5.00	450,218,596,320	36.00	1,971,938,370,256		Samarinda, Balikpapan
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kab/kota	-	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000.00	2.00	500,000,000	6.00	1,500,000,000		Samarinda
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Orang	-	-	-	-	-	2.00	1,000,000,000	2.00	1,000,000,000		Samarinda
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung,	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada	Orang	50.00	50.00	200,000,000	50.00	200,000,000.00	50.00	200,000,000	200.00	600,000,000		Samarinda

dan Masyarakat	Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat												
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	-	25.00	274,999,628	25.00	200,000,000.00	25.00	200,000,000	75.00	674,999,628		10 Kab/Kota
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara	-	5.00	274,999,628	5.00	200,000,000.00	5.00	200,000,000	15.00	674,999,628		Samarinda
Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Lisensi	1.00	2.00	400,000,000	10.00	200,000,000.00	10.00	200,000,000	23.00	800,000,000		Samarinda
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	%	16.67	50.00	40,000,000,000	66.67	20,000,000,000.00	100.00	25,000,000,000.00	100.00	85,000,000,000.00		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	2.00	3.00	40,000,000,000	1.00	20,000,000,000.00	2.00	25,000,000,000.00	8.00	85,000,000,000.00		

Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-	2.00	1,600,000,000	2.00	3,000,000,000.00	1.00	500,000,000	5.00	5,100,000,000		Samarinda, Kukar, Berau, Paser
Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen	2.00	4.00	7,500,000,000	2.00	3,800,000,000.00	3.00	4,300,000,000	11.00	15,600,000,000		Samarinda, Kukar, Berau, Paser
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	2.00	3.00	30,700,000,000	1.00	13,000,000,000.00	2.00	20,000,000,000	8.00	63,700,000,000		Samarinda, Kukar, Berau, Paser
Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab/kota	10.00	10.00	200,000,000	10.00	200,000,000.00	10.00	200,000,000	10.00	600,000,000		10 Kab/Kota
TATA RUANG							13,500,000,000		15,000,000,000.00		20,000,000,000		48,500,000,000

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	78,57 %	83,2 0 %	13,500,0 00,000	83,9 0 %	15,000,00 0,000.00	84,9 4 %	20,000,0 00,000	84,9 4 %	48,500,00 0,000		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	%	12.51 %	13.2 4%	2,200,00 0,000	13.3 5%	3,500,000 ,000.00	13.5 2%	4,400,00 0,000	13.5 2%	10,100,00 0,000		
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Doku men	0	1	1,800,00 0,000	3	3,100,000, 000.00	3	4,000,000 ,000	7	8,900,000, 000		
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	Oran g	150	100	400,000, 000	100	400,000,0 00.00	100	400,000,0 00	300	1,200,000, 000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	%	26.11 %	27.6 5%	2,350,00 0,000	27.8 8%	3,350,000 ,000.00	28.2 2%	6,850,00 0,000.00	28.2 2%	12,550,00 0,000.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Doku men	1	0	-	1	1,000,000, 000.00	2	3,000,000 ,000	3	4,000,000, 000		
Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	Peta	1	0	-	0	-	1	1,500,000 ,000	1 Peta	1,500,000, 000		
Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berit a Acar a	2	4	500,000, 000	3	500,000,0 00.00	3	500,000,0 00	10	1,500,000, 000		

Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	25	350,000,000	25	350,000,000.00	25	350,000,000	75	1,050,000,000		
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan	1	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	25.02 %	26.50 %	4,600,000,000	26.73 %	4,050,000,000.00	27.06 %	4,400,000,000.00	27.06 %	13,050,000,000.00		
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	0	6	600,000,000	6	600,000,000.00	6	600,000,000	18	1,800,000,000		
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	0	6	350,000,000	6	350,000,000.00	6	350,000,000	18	1,050,000,000		

Kegiatan Non Berusaha													
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	0	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Penataan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	2	1,900,000,000	2	1,500,000,000.00	3	1,800,000,000	7	5,200,000,000		
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	5	1,250,000,000	4	1,100,000,000.00	4	1,150,000,000	13	3,500,000,000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	14.93 %	15.8 1%	4,350,000,000	15.9 4%	4,100,000,000.00	16.1 4%	4,350,000,000.00	16.1 4%	12,800,000,000.00		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1,400,000,000	1	400,000,000.00	1	1,400,000,000	3	3,200,000,000		
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penataan ruang	Berita Acara	0	1	350,000,000	1	350,000,000.00	1	350,000,000	3	1,050,000,000		
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	0	0	-	1	800,000,000.00	0	-	1	800,000,000		
Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan	Kasus	0	1	800,000,000	1	750,000,000.00	1	800,000,000	3	2,350,000,000		

		ruang												
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	0	1	300,000,000	1	300,000,000.00	1	300,000,000	3	900,000,000		
	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000	3	3,000,000,000		
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
	BINA MARGA					1,169,877,261,683		2,297,930,917,267.00		2,984,818,729,410		6,452,626,908,360		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	Persen	77.52	82.09	852,477,261,683	86.23	1,583,430,917,267.00	93.53	1,759,818,729,410	93.53	4,195,726,908,360		
		Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas	-	1.00	317,400,000,000	2.00	714,500,000,000.00	4.00	1,225,000,000,000	4.00	2,256,900,000,000		
	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Panjang jalan dengan kondisi mantap	km	693,86	754,55 Km	852,477,261,683	792,61 Km	1,583,430,917,267.00	859,71 Km	1,759,818,729,410	859.71	4,195,726,908,360		Sama rinda, Balik papa

													n, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, PPU, Paser
	Panjang jalan baru yang terbangun	km	13,95	26 Km	317,400,000,000	43,50 Km	714,500,000,000.00	67,80 Km	1,225,000,000,000	67,80 Km	2,256,900,000,000		Samarinda, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	33.00	25 Dokumen	22,600,000,000	30 Dokumen	25,600,000,000.00	30 Dokumen	25,600,000,000	85 Dokumen	73,800,000,000		
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	-	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000.00	1 Dokumen	1,500,000,000	3 Dokumen	4,500,000,000		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan	KM	895,09	895,	2,900,00	895,	2,900,000,	895,	2,900,000	895,	8,700,000,		

	yang Disurvey Kondisinya			09 KM	0,000	09 KM	000.00	09 KM	,000	09 KM	000		
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	13,95	14,50 KM	248,500,000,000	17,50 KM	528,500,000,000.00	24,30 KM	1,144,500,000,000	56,30 KM	1,921,500,000,000		
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	-	6 KM	45,000,000,000	8 KM	60,000,000,000.00	8 KM	60,000,000,000	22 KM	165,000,000,000		
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	48.00	57,40 KM	740,477,261,683	112 KM	1,443,430,917,267.00	126 KM	1,619,818,729,410	295,40 KM	3,803,726,908,360		
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	2.00	6 Jembatan	68,900,000,000	6 Jembatan	186,000,000,000.00	6 Jembatan	80,500,000,000	18 Jembatan	335,400,000,000		
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM	895,09	895,09 KM	40,000,000,000	895,09 KM	50,000,000,000.00	895,09 KM	50,000,000,000	895,09 KM	140,000,000,000		
BIDANG BINA KONSTRUKSI					21,500,000,000		24,993,000,000.00		25,055,000,000		71,548,000,000		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	55.16 %	57.64 %	21,500,000,000	60.13 %	24,993,000,000.00	62.62 %	25,055,000,000	62.62 %	71,548,000,000		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	Orang	426	1500 orang	14,680,000,000	1500 orang	15,950,000,000.00	1500 orang	15,955,000,000	4500 orang	46,585,000,000		
Penyediaan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang	48	96	1,280,000,000	120	1,600,000,000.00	120	1,600,000,000	336	4,480,000,000		

	(Orang)												
Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,000,000	1	250,000,000.00	1	250,000,000	3	600,000,000		
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	Orang	426	1500	6,000,000,000	1500	6,000,000,000.00	1500	6,000,000,000	4500	18,000,000,000		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3	8	1,200,000,000	10	1,500,000,000.00	10	1,500,000,000	28	4,200,000,000		
Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,000,000	1	200,000,000.00	1	200,000,000	3	500,000,000		
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	Orang	426	1500	5,700,000,000	1500	6,000,000,000.00	1500	6,000,000,000	4500	17,700,000,000		
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)	Orang	426	1500	150,000,000	1500	200,000,000.00	1500	200,000,000	4500	550,000,000		

Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)	Lembaga	6	10	150,000,000	10	200,000,000.00	10	205,000,000	30	555,000,000		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	Layanan	1	1 Layanan	750,000,000	1 Layanan	1,200,000,000	1 Layanan	1,250,000,000	3 Layanan	3,200,000,000		
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	Layanan Informasi	1	1	100,000,000	1	200,000,000.00	1	250,000,000	3	550,000,000		
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	Perangkat Pendukung	1	1	250,000,000	1	450,000,000.00	1	450,000,000	3	1,150,000,000		
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	1	1	200,000,000	1	350,000,000.00	1	350,000,000	3	900,000,000		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	30	60	200,000,000	60	200,000,000.00	60	200,000,000	180	600,000,000		
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Dokumen	2	3 Dokumen	6,070,000,000	3 Dokumen	7,843,000,000	3 Dokumen	7,850,000,000	9 Dokumen	21,763,000,000		

	Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi												
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	Paket Pekerjaan	53	130	1,000,000,000	150	1,300,000,000.00	175	1,300,000,000	455	3,600,000,000		
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	Bangunan Konstruksi	24	20	500,000,000	20	650,000,000.00	20	650,000,000	60	1,800,000,000		
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	Lembaga	11	11	2,300,000,000	11	3,390,000,000.00	11	3,400,000,000	33	9,090,000,000		
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	Badan Usaha	53	100	750,000,000	100	850,000,000.00	100	850,000,000	300	2,450,000,000		

	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	Dokumen	1	1	1,520,000,000	1	1,653,000,000.00	1	1,650,000,000	3	4,823,000,000		
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I						44,446,432,000		64,946,432,000		70,446,432,000		179,839,296,000		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8,940.00	9,460	5,500,000,000	9,730	5,500,000,000.00	10,030.00	5,000,000,000	10,030.00	16,000,000,000			
	Panjang pantai kritis yang ditangani	Km												
	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	239.00	94.00	2,000,000,000	60.00	2,500,000,000.00	50.00	2,500,000,000	50.00	7,000,000,000			
	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87.40	70.00		140.00		210.00		210.00				
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	5,158.00	5,480.00	2,000,000,000	4,801.86	2,500,000,000.00	7,669.29	2,500,000,000	7,669.29	7,000,000,000			
	Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	0.00	6.00		3.00		1.00		10.00				
	Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi												
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	2.00	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000.00	2.00	500,000,000	2.00	1,500,000,000			
Rehabilitasi Kanal	Panjang kanal	M												

Banjir	banjir yang direhabilitasi		2.00	1,25 0.00	1,000,00 0,000	1,25 0.00	1,500,000, 000.00	1,25 0.00	1,500,000 ,000	1,25 0.00	4,000,000, 000		
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing sungai yang Dipelihara	KM	0.50	0.50	500,000, 000	0.50	500,000,0 00.00	0.50	500,000,0 00	0.50	1,500,000, 000		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	mete r	2,014. 00	1,94 0.00	5,500,00 0,000	3,83 8.46	5,500,000 ,000	5,38 7.17	5,000,00 0,000	5,38 7.17	16,000,00 0,000		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	45.28	45.2 8	5,500,00 0,000.00	45.2 8	5,500,000, 000.00	45.2 8	5,000,000 ,000.00	45.2 8	16,000,00 0,000		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	%	11.03	59.7 7	550,000, 000	83.5 8	550,000,0 00.00	100. 00	550,000, 000	100. 00	1,650,000 ,000		
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	4.00	1.00	550,000, 000	1.00	550,000,0 00.00	1.00	550,000, 000	1.00	1,650,000 ,000		
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan	Doku men		1 Dok ume n	550,000, 000	1 Dok ume n	550,000,0 00.00	1 Dok ume n	550,000,0 00		1,650,000, 000		

Provinsi	strategis daerah provinsi												
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	77.52	82.09	36,396,432,000	86.23	56,396,432,000.00	93.53	62,396,432,000	93.53	155,189,296,000		
	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas											
Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dengan kondisi mantap	Km	693.86	754.55	36,396,432,000	792.61	56,396,432,000.00	859.71	62,396,432,000	859.71	155,189,296,000		
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	5.00	5.00	7,000,000,000	6.00	8,000,000,000.00	7.00	10,000,000,000	20.00	25,000,000,000		
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	15.00	20.00	27,396,432,000	20.00	46,396,432,000.00	20.00	50,396,432,000	20.00	124,189,296,000		
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	600.00	300.00	2,000,000,000	300.00	2,000,000,000.00	300.00	2,000,000,000	300.00	6,000,000,000		
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II					55,500,000,000		76,500,000,000.00		82,296,000,000		214,296,000,000		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8,940.00	9,460.00	5,000,000,000	9,730.00	5,000,000,000.00	10,030.00	5,000,000,000	10,030.00	15,000,000,000		
	Panjang pantai kritis yang ditangani	Km											

	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/d etik	239.00	94.00	500,000,000	60.00	500,000,000.00	50.00	500,000,000	50.00	1,500,000,000		
	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87.40	70.00		140.00		210.00		210.00			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	5,158.00	5,480.00	500,000,000	4,801.86	500,000,000.00	7,669.29	500,000,000	7,669.29	1,500,000,000		
	Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	0.00	6.00		3.00		1.00		10.00			
	Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi											
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	1.00	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000.00	1.00	500,000,000	1.00	1,500,000,000		Bend ali HM. Ardan s Kota Sama rinda
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	2,014.00	3,390.58	5,000,000,000	3,838.46	5,000,000,000	5,387.17	5,000,000,000	5,387.17	15,000,000,000		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	26 D.I.	20.00	5,000,000,000	20.00	5,000,000,000.00	20.00	5,000,000,000	20.00	15,000,000,000		Kab. Kuka r
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	7.82	11.15	6,000,000,000	12.76	6,000,000,000.00	14.89	6,000,000,000	14.89	18,000,000,000		

DRAINASE													
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	meter	2,723.70	1,940.00	6,000,000,000	710.00	6,000,000,000	944.00	6,000,000,000	944.00	18,000,000,000		
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	2.00	9.00	6,000,000,000	9.00	6,000,000,000.00	9.00	6,000,000,000	9.00	18,000,000,000		Sistem Jaringan Sungai Karang Asam Kecil
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	77.52	82.09	44,000,000,000	86.23	65,000,000,000.00	93.53	70,796,000,000	93.53	179,796,000,000		
	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas											
Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dengan kondisi mantap		693.86	754.55	44,000,000,000	792.61	65,000,000,000.00	859.71	70,796,000,000	859.71	179,796,000,000		
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	KM	3.00	4.50	24,714,28,981	4.00	39,122,122,900.00	4.00	32,725,935,000	4.00	96,562,286,881		Kota Samarinda dan Kab. Kutai
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan	KM	10.00	10.0	9,625,07	11.0	19,000,00	14.0	22,000,00	14.0	50,625,07		Kota Sama

		pemeliharaan secara rutin			0	0,519	0	0,000.00	0	0,000	0	0,519		rinda dan Kab. Kukur
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	28.00	30.00	9,660,700,500	30.00	6,877,877,100.00	30.00	16,070,065,000	30.00	32,608,642,600		Kota Samarinda dan Kab. Kukur
		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III				56,000,000,000		76,455,000,000.00		83,247,000,000		215,702,000,000		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8,940.00	9,460.00	7,000,000,000	9,730.00	7,000,000,000.00	10,030.00	7,000,000,000	10,030.00	21,000,000,000		
		Panjang pantai kritis yang ditangani	Km											
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik											
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha											
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	2,014.00	1,940.00	7,000,000,000	33.30	7,000,000,000.00	33.30	7,000,000,000	33.30	21,000,000,000		

Kabupaten/Kota													
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	4 D.I	1.30	2,000,000,000	1.30	2,000,000,000.00	1.30	2,000,000,000	1.30	6,000,000,000		Kab. Berau
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	5 D.I	32.00	5,000,000,000	32.00	5,000,000,000.00	32.00	5,000,000,000	32.00	15,000,000,000		Kab. Berau
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	77.52	82.09	49,000,000,000	86.23	69,455,000,000.00	93.53	76,247,000,000	93.53	194,702,000,000		
	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas											
Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dengan kondisi mantap	km	693.86	754.55	49,000,000,000	792.61	69,455,000,000.00	859.71	76,247,000,000	859.71	194,702,000,000		
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	2.00	1.80	15,000,000,000	1.80	15,000,000,000.00	1.80	15,000,000,000	1.80	45,000,000,000		Kab. Berau
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	66.00	37.00	32,000,000,000	38.00	52,455,000,000.00	40.20	59,247,000,000	40.20	143,702,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan	20.00	2.00	2,000,000,000	2.00	2,000,000,000.00	2.00	2,000,000,000	6.00	6,000,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI							475,296,800		675,296,800		675,296,800		1,825,890,400
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi		23.09	45.21	475,296,800	71.11	675,296,800.00	99.40	675,296,800	99.40	1,825,890,400		Samarinda, Kalim

	KONSTRUKSI													antan Timur
	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen	1.00	3.00	475,296,800	3.00	675,296,800.00	3.00	675,296,800	9.00	1,825,890,400		Samarinda, Kalimantan Timur
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (UPTD LBK)	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi		3.00	475,296,800	3.00	675,296,800.00	3.00	675,296,800	9.00	1,825,890,400		Samarinda, Kalimantan Timur
	TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6.10	7.19	1,936,264,515,363	8.04	2,985,277,046,115.00	8.89	3,776,764,453,783	8.89	8,698,306,015,261		
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0.40	3.41	223,548,920,630	4.98	158,175,296,800.00	6.85	181,251,301,372	6.85	562,975,518,802		
	SASARAN 1.2 : Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	55.02	56.84	150,698,844,000	53.03	96,350,000,000.00	76.87	142,000,000,000	100.00	389,048,844,000		

		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung	Indeks	1.45	2.26	53,099,123,830	3.00	66,000,000,000.00	4.93	70,000,000,000	7.37	189,099,123,830		
		BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				233,099,123,830		182,350,000,000.00		232,000,000,000		647,449,123,830		
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	%	25%	33.32 %	2,099,123,830	47.89 %	26,000,000,000.00	62.46 %	30,000,000,000	62.46 %	58,099,123,830		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	2 Dokumen	2,000,000,000	2 Dokumen	2,000,000,000.00	2 Dokumen	2,000,000,000	6 Dokumen	6,000,000,000		
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	2 Dokumen	2,000,000,000	2 Dokumen	2,000,000,000.00	2 Dokumen	2,000,000,000	6 Dokumen	6,000,000,000		
	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	0	0 Unit	-	100 Unit	23,900,876,170	100 Unit	27,900,876,170	200 Unit	51,801,752,340		
	1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit	0	0 Unit Rumah	-	100 Unit Rumah	23,900,876,170.00	100 Unit Rumah	27,900,876,170	200 Unit Rumah	51,801,752,340		

Program Provinsi													
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	0	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830	3 Laporan	297,371,490		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	0	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830.00	1 Laporan	99,123,830	3 Laporan	297,371,490		
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	11.46	108.01 Ha	150,698,844,000	156.59 Ha	96,350,000,000	203.75 Ha	142,000,000,000	203.75 Ha	389,048,844,000		
1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	0	4 Laporan	1,761,706,400	4 Laporan	1,855,508,000.00	4 Laporan	1,761,706,400	12 Laporan	5,378,920,800		
1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	0	4 Laporan	1,761,706,400	4 Laporan	1,855,508,000.00	4 Laporan	1,761,706,400	12 Laporan	5,378,920,800		
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	Ha	11.46	96.55 Hektar	148,937,137,600	48.58 Hektar	94,494,492,000	47.16 Hektar	140,238,293,600	203.75 Hektar	383,669,923,200		

di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	11.46	96.55 Ha	146,765,937,600	48.58 Ha	94,068,092,000.00	47.16 Ha	140,238,293,600	203.75 Ha	381,072,323,200		
1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	0	5 Laporan	2,171,200,000	1 Laporan	426,400,000.00	0 Laporan	-	6 Laporan	2,597,600,000		
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	%	17.06 %	22.40 %	51,000,000,000	52.57 %	40,000,000,000.00	100 %	40,000,000,000	100 %	131,000,000,000		
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	0	10 Lokasi	51,000,000,000	6 Lokasi	40,000,000,000.00	7 Lokasi	40,000,000,000	23 Lokasi	131,000,000,000		

		untuk Menunjang Fungsi Permukiman											
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0	10 Lokasi	48,562,490,000	6 Lokasi	40,000,000,000.00	7 Lokasi	40,000,000,000	23 Lokasi	128,562,490,000	
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	0	8 Dokumen	2,437,510,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	8 Dokumen	2,437,510,000	
TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6,10	7,19 Indeks		8,04 Indeks		8,89 Indeks		8,89 Indeks		
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0,4	3,41 Indeks		4,98 Indeks		6,85 Indeks		6,85 Indeks		
	SASARAN 1.2 : Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	55.02 %	56.84 %	29,301,156,000	53.03 %	20,000,000,000.00	76.87 %	20,000,000,000	76.87 %	69,301,156,000	
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman	Indeks	1,45	2,26 Indeks		3,00 Indeks		4,93 Indeks		4,93 Indeks		

		Pendukung												
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	11.46	108.01 Ha	29,301,156,000	156.59 Ha	20,000,000,000.00	203.75 Ha	20,000,000,000	203.75 Ha	69,301,156,000		
	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	Ha	11.46	96.55 Hektar	29,301,156,000	48.58 Hektar	20,000,000,000.00	47.16 Hektar	20,000,000,000	203.75 Hektar	69,301,156,000		
	1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	0	1000 Unit Rumah	29,301,156,000	1000 Unit Rumah	20,000,000,000.00	1000 Unit Rumah	20,000,000,000	3000 Unit Rumah	69,301,156,000		
	TUJUAN 2 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78.25	78.50	75,693,034,373	79.3	73,950,653,464.00	80.01	73,473,405,619	80.01	223,117,093,456		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Poin	84.60	85.00	39,502,793,503	85.5	38,111,895,561.00	86	38,175,977,906	86	115,790,666,970		
	SASARAN 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	60.05	65.00	75,693,034,373	67	73,950,653,464.00	71	73,473,405,619	71	223,117,093,456		

		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82.09	82.20	39,502,793,503	82.44	38,111,895,561.00	82.7	38,175,977,906	82.7	115,790,666,970		
	SEKRETARIAT					88,249,321,176		85,901,262,325.00		84,985,659,325		259,136,242,826		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	Indeks	68.46	72.20	63,731,652,845	74.60	62,894,592,245.00	77.00	62,356,233,245	77.00	188,982,478,335		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	24,517,668,331	100.00	23,006,670,080.00	100.00	22,629,426,080	100.00	70,153,764,491		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	82.00	83.00	1,600,000,000	84.00	1,650,000,000.00	85.00	1,650,000,000	85.00	4,900,000,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	2.00	500,000,000	2.00	550,000,000.00	2.00	550,000,000	6.00	1,600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	4.00	200,000,000	4.00	200,000,000.00	4.00	200,000,000	12.00	600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	4.00	200,000,000	4.00	200,000,000.00	4.00	200,000,000	12.00	600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	-	4.00	200,000,000	4.00	200,000,000.00	4.00	200,000,000	12.00	600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5.00	20.00	500,000,000	20.00	500,000,000.00	20.00	500,000,000	60.00	1,500,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	54,893,293,845	100.00	54,156,233,245.00	100.00	54,156,233,245	100.00	163,205,760,335		
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		4,452.00	52,474,605,845	4,452.00	51,737,545,245.00	4,452.00	51,737,545,245	13,356.00	155,949,696,335		Kota Samarinda

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		6.00	2,018,688,000	6.00	2,018,688,000.00	6.00	2,018,688,000	18.00	6,056,064,000		Kota Samarinda
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000.00	100.00	300,000,000	100.00	900,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	Dokumen	-	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda

	Daerah SKPD												
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	100.00	1,550,000,000	100.00	1,400,000,000.00	100.00	1,250,000,000	100.00	4,200,000,000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		2.00	850,000,000	1.00	850,000,000.00	1.00	800,000,000	4.00	2,500,000,000		Kota Samarinda
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		200.00	300,000,000	100.00	150,000,000.00	100.00	150,000,000	400.00	600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		50.00	200,000,000	50.00	200,000,000.00	25.00	100,000,000	125.00	500,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan

													antan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	100.00	3,006,925,631	100.00	2,320,000,000.00	100.00	2,200,000,000	100.00	7,526,925,631		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5.00	100,000,000	5.00	100,000,000.00	5.00	100,000,000	15.00	300,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12.00	700,000,000	12.00	500,000,000.00	12.00	500,000,000	36.00	1,700,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4.00	276,925,631	4.00	250,000,000.00	4.00	250,000,000	12.00	776,925,631		Kota Samarinda
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		200.00	250,000,000	200.00	270,000,000.00	200.00	300,000,000	600.00	820,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Barang, Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12.00	280,000,000	12.00	250,000,000.00	12.00	200,000,000	36.00	730,000,000		Kota Samarinda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12.00	800,000,000	12.00	800,000,000.00	12.00	700,000,000	36.00	2,300,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1.00	500,000,000	1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000	3.00	600,000,000		Kota Samarinda
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	600,000,000	100.00	700,000,000.00	100.00	600,000,000	100.00	1,900,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	14.00	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000.00	1.00	500,000,000	3.00	1,500,000,000		Kota Samarinda
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		3.00	100,000,000	5.00	200,000,000.00	3.00	100,000,000	11.00	400,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	21,510,742,700	100.00	20,686,670,080.00	100.00	20,429,426,080	100.00	62,626,838,860		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12.00	100,000,000	12.00	100,000,000.00	12.00	100,000,000	36.00	300,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12.00	2,885,206,295	12.00	2,418,437,075.00	12.00	2,161,193,075	36.00	7,464,836,445		Kota Samarinda

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12.00	18,525,536,405	12.00	18,168,233,005.00	12.00	18,168,233,005	36.00	54,862,002,415		Kota Samarinda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	4,788,359,000	100.00	4,688,359,000.00	100.00	4,400,000,000	100.00	13,876,718,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	51.00	30.00	500,000,000	30.00	500,000,000.00	30.00	500,000,000	30.00	1,500,000,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		4.00	1,000,000,000	4.00	1,000,000,000.00	4.00	1,000,000,000	12.00	3,000,000,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		3.00	400,000,000	3.00	400,000,000.00	3.00	300,000,000	9.00	1,100,000,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		4.00	2,688,359,000	4.00	2,688,359,000.00	4.00	2,500,000,000	12.00	7,876,718,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	-	1.00	200,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	400,000,000		Kota Samarinda
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I					5,553,568,000		5,553,568,000.00		6,053,568,000		17,160,704,000		

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	Indeks	68.46	72.20	2,609,379,527	74.60	2,609,379,527.00	77.00	3,009,379,527	77.00	8,228,138,581		
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	2,944,188,473	100.00	2,944,188,473.00	100.00	3,044,188,473	100.00	8,932,565,419		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	287,480,000	100.00	287,480,000.00	100.00	287,480,000	100.00	862,440,000		Kota Balik papan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	12.00	12.00	282,480,000	12.00	282,480,000.00	12.00	282,480,000	36.00	847,440,000		Kota Balik papan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Doku men	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Doku men	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Lapo ran	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balik papan

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-		-		-		-		-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	20,000,000	100.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000	100.00	60,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	30,000,000		Kota Balikpapan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100.00	100.00	354,977,500	100.00	354,977,500.00	100.00	383,245,527	100.00	1,093,200,527		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	35.00	22,977,500	35.00	22,977,500.00	35.00	22,977,500	105.00	68,932,500		Kota Balikpapan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20.00	10.00	138,000,000	10.00	138,000,000.00	10.00	128,000,000	30.00	404,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Dokumen	2.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balikpapan

	Kepegawaian												
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10.00	15.00	189,000,000	15.00	189,000,000.00	15.00	227,268,027	45.00	605,268,027		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	100.00	944,188,473	100.00	944,188,473.00	100.00	1,044,188,473	100.00	2,932,565,419		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	25,197,473	1.00	25,197,473.00	1.00	25,197,473	1.00	75,592,419		Kota Balikpapan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	3.00	161,277,000	3.00	161,277,000.00	3.00	161,277,000	9.00	483,831,000		Kota Balikpapan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	34,000,000	1.00	34,000,000.00	1.00	34,000,000	1.00	102,000,000		Kota Balikpapan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1.00	1.00	9,600,000	1.00	9,600,000.00	1.00	9,600,000	1.00	28,800,000		Kota Balikpapan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	21.00	21.00	704,114,000	21.00	704,114,000.00	21.00	804,114,000	21.00	2,212,342,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	1.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	1.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	572,000,000	100.00	512,000,000.00	100.00	932,000,000	100.00	2,016,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	8.00	8.00	40,000,000	8.00	400,000,000.00	8.00	400,000,000	8.00	840,000,000		Kota Balikpapan
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		-		-		-		-	-		
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	21.00	21.00	420,000,000	21.00	-	21.00	420,000,000	21.00	840,000,000		Kota Balikpapan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	33.00	33.00	112,000,000	33.00	112,000,000.00	33.00	112,000,000	33.00	336,000,000		Kota Balikpapan

	yang Disediakan													n
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit									-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000	100.00	6,000,000,000			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.00	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000	1.00	30,000,000			Kota Balikpapan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36.00	36.00	180,808,080	36.00	180,808,080.00	36.00	180,808,080	36.00	542,424,240			Kota Balikpapan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	1,809,191,920	12.00	1,809,191,920.00	12.00	1,809,191,920	12.00	5,427,575,760			Kota Balikpapan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	1,374,922,027	100.00	1,434,922,027.00	100.00	1,386,654,000	100.00	4,196,498,054			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22.00	22.00	158,902,000	22.00	158,902,000.00	22.00	158,902,000	22.00	476,706,000			Kota Balikpapan

Operasional atau Lapangan													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	17.00	17.00	607,400,027	17.00	627,400,027.00	17.00	629,132,000	51.00	1,863,932,054		Kota Balikpapan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20.00	20.00	85,120,000	20.00	85,120,000.00	20.00	85,120,000	20.00	255,360,000		Kota Balikpapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5.00	5.00	518,500,000	5.00	558,500,000.00	5.00	508,500,000	5.00	1,585,500,000		Kota Balikpapan
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balikpapan
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II					8,979,242,500	8,194,022,500.00	8,488,460,000	25,661,725,000					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	68.46	72.20	5,395,092,409	74.60	4,489,772,100.00	77.00	4,226,993,255	77.00	14,111,857,764		
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	3,584,150,091	100.00	3,704,250,400.00	100.00	4,261,466,745	100.00	11,549,867,236		
	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat	%	100.00	100.00	419,200,000	100.00	419,200,000.00	100.00	419,200,000	100.00	1,257,600,000		

	Waktu												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.00	1.00	343,200,000	1.00	343,200,000.00	1.00	343,200,000	3.00	1,029,600,000		Kota Samarinda
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1.00	18,000,000	1.00	18,000,000.00	1.00	18,000,000	3.00	54,000,000		Kota Samarinda
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1.00	10,000,000	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	30,000,000		Kota Samarinda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		12.00	36,000,000	12.00	36,000,000.00	12.00	36,000,000	36.00	108,000,000		Kota Samarinda
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		12.00	12,000,000	12.00	12,000,000.00	12.00	12,000,000	36.00	36,000,000		Kota Samarinda
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	80,000,000	100.00	80,000,000.00	100.00	80,000,000	100.00	240,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		12.00	12,000,000	12.00	12,000,000.00	12.00	12,000,000	36.00	36,000,000		Kota Samarinda

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		12.00	50,000,000	12.00	50,000,000.00	12.00	50,000,000	36.00	150,000,000		Kota Samarinda
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		12.00	18,000,000	12.00	18,000,000.00	12.00	18,000,000	36.00	54,000,000		Kota Samarinda
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	100.00	904,900,000	100.00	615,000,000.00	100.00	904,900,000	100.00	2,424,800,000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3.00	261.00	234,900,000			261.00	234,900,000	522.00	469,800,000		Kota Samarinda
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40.00	36.00	350,000,000	30.00	295,000,000.00	36.00	350,000,000	102.00	995,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		12.00	20,000,000	12.00	20,000,000.00	12.00	20,000,000	36.00	60,000,000		Kota Samarinda
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		12.00	50,000,000	12.00	50,000,000.00	12.00	50,000,000	36.00	150,000,000		Kota Samarinda
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		36.00	250,000,000	30.00	250,000,000.00	36.00	250,000,000	102.00	750,000,000		Dalam dan Luar Wilayah

													Kalimantan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100.00	100.00	884,466,745	100.00	962,270,000.00	100.00	1,183,966,745	100.00	3,030,703,490		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	12,500,000	1.00	12,500,000.00	1.00	12,500,000	3.00	37,500,000		Kota Samarinda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	4.00	250,500,000	2.00	125,400,000.00	4.00	300,000,000	10.00	675,900,000		Kota Samarinda
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4.00	3.00	92,850,000	3.00	92,850,000.00	3.00	92,850,000	9.00	278,550,000		Kota Samarinda
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2.00	2.00	37,096,745	2.00	40,000,000.00	2.00	37,096,745	6.00	114,193,490		Kota Samarinda
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	72.00	72.00	11,520,000	72.00	11,520,000.00	72.00	11,520,000	216.00	34,560,000		Kota Samarinda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	12.00	450,000,000	12.00	650,000,000.00	12.00	700,000,000	36.00	1,800,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1.00	15,000,000	1.00	15,000,000.00	1.00	15,000,000	3.00	45,000,000		Kota Samarinda
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1.00	15,000,000	1.00	15,000,000.00	1.00	15,000,000	3.00	45,000,000		Kota Samarinda
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	985,220,000	100.00	1,692,610,000.00	100.00	492,610,000	100.00	3,170,440,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	8.00	2.00	985,220,000	1.00	492,610,000.00	1.00	492,610,000	4.00	1,970,440,000		Kota Samarinda
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	14.00			1.00	1,200,000,000.00			1.00	1,200,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00	2,699,683,346	100.00	2,741,980,400.00	100.00	3,077,500,000	100.00	8,519,163,746		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	12.00	12,000,000	12.00	12,000,000.00	12.00	12,000,000	36.00	36,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	268,202,946	12.00	310,500,000.00	12.00	315,500,000	36.00	894,202,946		Kota Samarinda

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	2,419,480,400	12.00	2,419,480,400.00	12.00	2,750,000,000	36.00	7,588,960,800		Kota Samarinda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	3,005,772,409	100.00	1,682,962,100.00	100.00	2,330,283,255	100.00	7,019,017,764		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	34.00	32.00	450,000,000	30.00	350,000,000.00	32.00	450,000,000	94.00	1,250,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit	23.00	38.00	1,056,172,500	38.00	660,462,100.00	39.00	1,207,783,255	115.00	2,924,417,855		Kota Samarinda
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	129.00	34.00	49,599,909	34.00	42,500,000.00	34.00	42,500,000	102.00	134,599,909		Kota Samarinda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3.00	15.00	1,435,000,000	4.00	615,000,000.00	4.00	615,000,000	4.00	2,665,000,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit		15.00	15,000,000	15.00	15,000,000.00	15.00	15,000,000	15.00	45,000,000		Kota Samarinda

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III					6,795,000,000		6,795,000,000.00		6,503,000,000		20,093,000,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	68.46	72.20	2,278,213,392	74.60	2,278,213,392.00	77.00	2,202,103,392	77.00	6,758,530,176		
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	4,516,786,608	100.00	4,516,786,608.00	100.00	4,300,896,608	100.00	13,334,469,824		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	100	473,340,000	100	473,340,000.00	100	415,840,000	100	1,362,520,000		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Bulan	1.00	383,340,000	1.00	383,340,000.00	1.00	375,840,000	3.00	1,142,520,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	60,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	60,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	-	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	60,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD												
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	40,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	32,500,000	100.00	32,500,000.00	100.00	25,000,000	100.00	90,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1.00	12,500,000	1.00	12,500,000.00	1.00	10,000,000	3.00	35,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	40,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%		100.00	222,887,000	100.00	222,887,000.00	100.00	211,777,000	100.00	657,551,000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	264 Stel	2.00	140,112,000	2.00	140,112,000.00	2.00	140,112,000	6.00	420,336,000		Kab. Kutim & Kab. Berau

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	16 Orang	10.00	45,000,000	10.00	45,000,000.00	10.00	45,000,000	30.00	135,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	5.00	27,775,000	5.00	27,775,000.00	3.00	16,665,000	13.00	72,215,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	100.00	983,536,008	100.00	983,536,008.00	100.00	767,646,008	100.00	2,734,718,024		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Bulan	3.00	34,680,500	3.00	34,680,500.00	3.00	34,680,500	9.00	104,041,500		Kab. Kutim & Kab. Berau

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7 Unit	1.00	49,742,200	1.00	49,742,200.00	1.00	49,742,200	3.00	149,226,600	Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12 Bulan	4.00	61,392,500	4.00	61,392,500.00	4.00	61,392,500	12.00	184,177,500	Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Bulan	2.00	52,515,808	2.00	52,515,808.00	2.00	52,515,808	6.00	157,547,424	Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Bulan	2.00	57,008,000	2.00	57,008,000.00	2.00	57,008,000	6.00	171,024,000	Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Bulan	1.00	47,000	1.00	47,000.00	1.00	47,000	3.00	141,000	Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Bulan	12.00	708,950,000	12.00	708,950,000.00	12.00	493,060,000	36.00	1,910,960,000	Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1.00	14,200,000	1.00	14,200,000.00	1.00	14,200,000	3.00	42,600,000	Kab. Kutim & Kab. Berau

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	40,200,000	100.00	40,200,000.00	100.00	40,200,000	100.00	120,600,000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6 Unit	2.00	40,200,000	2.00	40,200,000.00	2.00	40,200,000	6.00	120,600,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	3,533,250,600	100.00	3,533,250,600.00	100.00	3,533,250,600	100.00	10,599,751,800		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Bulan	12.00	21,169,200	12.00	21,169,200.00	12.00	21,169,200	36.00	63,507,600		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Bulan	12.00	226,689,000	12.00	226,689,000.00	12.00	226,689,000	36.00	680,067,000		Kab. Kutim & Kab. Berau

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Unit	1.00	1,385,200	1.00	1,385,200.00	1.00	1,385,200	3.00	4,155,600		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	65 Orang	12.00	3,284,007,200	12.00	3,284,007,200.00	12.00	3,284,007,200	36.00	9,852,021,600		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	1,509,286,392	100.00	1,509,286,392.00	100.00	1,509,286,392	100.00	4,527,859,176		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48 Unit	47.00	100,300,000	47.00	100,300,000.00	47.00	100,300,000	141.00	300,900,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	26 Unit	26.00	802,947,300	26.00	802,947,300.00	26.00	802,947,300	78.00	2,408,841,900		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12 Bulan	65.00	64,475,100	65.00	64,475,100.00	65.00	64,475,100	195.00	193,425,300		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha	Unit	6 Unit	24.00	499,299,000	24.00	499,299,000.00	24.00	499,299,000	72.00	1,497,897,000		Kab. Kutim & Kab. Berau

		bilitasi												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6.00	42,264,992	6.00	42,264,992.00	6.00	42,264,992	18.00	126,794,976		Kab. Kutim & Kab. Berau
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI						5,618,696,200	5,618,696,200.00	5,618,696,200	16,856,088,600					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	68.46	72.20	1,678,696,200	74.60	1,678,696,200.00	77.00	1,678,696,200	77.00	5,036,088,600		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	3,940,000,000	100.00	3,940,000,000.00	100.00	3,940,000,000	100.00	11,820,000,000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	220,840,000	100.00	220,840,000.00	100.00	220,840,000	100.00	662,520,000		Samarinda, Kalimantan Timur
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.00	1.00	120,840,000	1.00	120,840,000.00	1.00	120,840,000	3.00	362,520,000		Samarinda, Kalimantan Timur
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.00	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12.00	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000	3.00	90,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1.00	20,000,000	1.00	20,000,000.00		20,000,000	2.00	60,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	65,000,000	100.00	65,000,000.00	100.00	65,000,000	100.00	195,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000	3.00	60,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1.00	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000	3.00	60,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	100.00	317,856,200	100.00	317,856,200.00	100.00	317,856,200	100.00	953,568,600		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4.00	4.00	227,856,200	4.00	227,856,200.00	4.00	227,856,200	12.00	683,568,600		Samarinda, Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1.00	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1.00	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		5.00	40,000,000	5.00	40,000,000.00	5.00	40,000,000	15.00	120,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	100.00	1,715,000,000	100.00	1,715,000,000.00	100.00	1,715,000,000	100.00	5,145,000,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10.00	3.00	40,000,000	3.00	40,000,000.00	3.00	40,000,000	9.00	120,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12.00	4.00	130,000,000	4.00	130,000,000.00	4.00	130,000,000	12.00	390,000,000		Samarinda, Kalimantan

													antan Timur
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	12.00	1,100,000,000	12.00	1,100,000,000.00	12.00	1,100,000,000	36.00	3,300,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	27.00	6.00	200,000,000	6.00	200,000,000.00	6.00	200,000,000	18.00	600,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	98.00	2.00	50,000,000	2.00	50,000,000.00	2.00	50,000,000	6.00	150,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12.00	3.00	100,000,000	3.00	100,000,000.00	3.00	100,000,000	9.00	300,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4.00	2.00	50,000,000	2.00	50,000,000.00	2.00	50,000,000	6.00	150,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1.00	20,000,000	1.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000	3.00	60,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen		1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur

Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000.00	100.00	600,000,000	100.00	1,800,000,000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1.00	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000.00	2.00	100,000,000	6.00	300,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	71.00	50.00	500,000,000	50.00	500,000,000.00	50.00	500,000,000	150.00	1,500,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,225,000,000	100.00	2,225,000,000.00	100.00	2,225,000,000	100.00	6,675,000,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	12.00	25,000,000	12.00	25,000,000.00	12.00	25,000,000	36.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	300,000,000	12.00	300,000,000.00	12.00	300,000,000	36.00	900,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	1,900,000,000	12.00	1,900,000,000.00	12.00	1,900,000,000	36.00	5,700,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	475,000,000	100.00	475,000,000.00	100.00	475,000,000	100.00	1,425,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9.00	10.00	225,000,000	10.00	225,000,000.00	10.00	225,000,000	30.00	675,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88.00	88.00	100,000,000	88.00	100,000,000.00	88.00	100,000,000	264.00	300,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.00	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000.00	1.00	150,000,000	3.00	450,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab ini memuat rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun tahun 2024-2026. Rencana kinerja ditunjukkan dengan alat ukur atau indikator kinerja urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sementara Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Penyajian indikator kinerja dinas terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sedangkan IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Baik IKU maupun IKK menjadi tolok ukur dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ditujukan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) memuat indikator tujuan dan sasaran Renstra PD sebagaimana dimuat pada Bab IV. Terdapat 10 (sepuluh) indikator yang merupakan IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimuat pada Tabel 7.1.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6,10	6,74	7,19	8,04	8,89	8,89
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0,40	1,56	3,41	4,98	6,85	6,85
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas	Indeks	6,16	6,88	7,42	8,08	8,85	8,85
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung	Indeks	0,20	1,21	3,59	5,04	6,72	6,72
5	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Persen	55,02	56,84	53,03	76,87	100	100
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	1,45	2,26	3,00	4,93	7,37	7,37
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Poin	84,41	84,60	85	85,50	86	86
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	60,05	62,00	65,00	67,00	71,00	71,00
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82,09	82,09	82,20	82,44	82,70	82,70

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Indikator Kinerja Kunci (IKK) memuat indikator penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. IKK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat merupakan indikator kinerja kunci tingkat Outcome sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyajian seluruh IKK beserta target indikator mulai tahun 2024 sampai dengan 2026 menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPD Provinsi Kalimantan Timur, disajikan pada Tabel 7.2 di bawah.

Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	47,66	58,95	70,78	82,6	94,43	94,43
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	Persen	15,08	55,29	65,29	77,06	97,65	97,65
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	57,86	61,10	61,22	62,97	64,91	64,91
4	Rasio kemandapan jalan	Persen	77,52	79,05	82,09	86,23	93,53	93,53
5	Rasio tenaga kerja konsrtuksi yang telatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persen	52,62	55,16	57,64	60,13	62,62	62,62
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Persen	55,02	56,84	53,03	76,87	100	100

Sumber: hasil proyeksi, 2023

7.2. Cascading Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading memberi gambaran hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan. Proses penyusunan *cascading* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).

Dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 menyusun rencana kinerja secara *cascading* atau berjenjang. Penjenjangan kinerja ini membentuk arsitektur kinerja mulai dari tingkat tertinggi sampai ke yang rendah yakni dari tingkat dampak (*impact*) atau dapat juga disebut *intermediate outcome* untuk tujuan dan sasaran Renstra PD, diturunkan ke kinerja hasil (*outcome*) atau *intermediate outcome* untuk program, lalu diturunkan ke kinerja hasil yang segera (*outcome*) atau *immediate outcome* untuk kegiatan, dan terakhir diturunkan ke kinerja keluaran (*output*) untuk sub kegiatan.

Gambaran penjenjangan kinerja dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ke Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada TABEL 7.3 Pada gambar tersebut menyajikan penjenjangan kinerja mulai dari tingkat yang paling atas yaitu tujuan dan sasaran Renstra sampai ke kinerja output untuk sub kegiatan.

Sub Kegiatan	indikator		Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[TUJUAN] Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung		0,4 Indeks	3,41 Indeks		4,98 Indeks		6,85 Indeks		6,85 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas		6,1 Indeks	7,19 Indeks		8,04 Indeks		8,89 Indeks		8,89 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[SASARAN] Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung		0,20 Indeks	3,59 Indeks		5,04 Indeks		6,72 Indeks		6,72 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas		6,16 Indeks	7,42 Indeks		8,08 Indeks		8,85 Indeks		8,85 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani		7.82%	11.15%		12.76%		14.89%		14.89%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi (SDA)	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik		2723.70 meter	1640 meter		710 meter		944 meter		944 meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		1 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	41,000,000,000	5 Sistem Drainase Perkotaan	24,816,347,600	5 Sistem Drainase Perkotaan	33,000,000,000	16 Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		1 Dokumen	6 Dokumen	2,650,000,000	5 Dokumen	2,750,000,000	5 Dokumen	2,750,000,000	16 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD 3)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		2 Sistem Drainase Perkotaan	9 Sistem Drainase Perkotaan	6,000,000,000	9 Sistem Drainase Perkotaan	6,000,000,000	9 Sistem Drainase Perkotaan	6,000,000,000	9 Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani		11.56%	59.77%		83.58%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		6 unit	15 unit		9 unit		6 unit		30 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		50 orang	50 orang	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	150	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola		0	5 Rumah Negara	274,999,628	5	200,000,000	5	200,000,000	15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)		0	25 Bangunan Gedung Negara	274,999,628	25	200,000,000	25	200,000,000	75	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 52 Usulan Aspirasi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang DiUbahsuaikan		6	16 Bangunan Gedung	785,470,761,876	9	736,249,012,060	5	450,218,596,320	30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang			1	2 Lisensi	400,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara			0	2 Kab/Kota	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			6	19 Dokumen	22,500,000,000		16,200,000,000	5	9,100,000,000	34	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif									1,000,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi				1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
												Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

											Rakyat
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat		55.16%	57.64%		60.13%		62.62%		62.62%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat		426 orang	1500 orang		1500 orang		1500 orang		4500 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Orang)		48	96	1,280,000,000	120	1,600,000,000	120	1,600,000,000	336	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)		1	1	100,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)		426	1500	6,000,000,000	1500	6,000,000,000	1500	6,000,000,000	4500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		3	8	1,200,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

											Perumahan Rakyat
Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)		1	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)		426	1500	5,700,000,000	1500	6,000,000,000	1500	6,000,000,000	4500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)		426	1500	150,000,000	1500	200,000,000	1500	200,000,000	4500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)		6	10	150,000,000	10	200,000,000	10	205,000,000	30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan		1 Layanan	1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		3 Layanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)		1	1	100,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

											Rakyat
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)		1	1	250,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen)		1	1	200,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		30	60	200,000,000	60	200,000,000	60	200,000,000	180	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah NSPK yang diterapkan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi		2 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		9 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)		53	130	1,000,000,000	150	1,300,000,000	175	1,300,000,000	455	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)		24	20	500,000,000	20	650,000,000	20	650,000,000	60	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)		11	11	2,300,000,000	11	3,390,000,000	11	3,400,000,000	33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		53	100	750,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	300	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)		1	1	1,520,000,000	1	1,653,000,000	1	1,650,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi		23.09%	45.21%		71.11%		99.40%		99.40%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah NSPK yang diterapkan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi		2 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		9 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (UPTD LBK)	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk			3 Bangunan Konstruksi	475,296,800	3 Bangunan Konstruksi	675,296,800	3 Bangunan Konstruksi	675,296,800	3 Bangunan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang		78,57 %	83,20 %		83,90 %		84,94 %		84,94 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		12.51%	13.24%		13.35%		13.52%		13.52%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Perda/Pergub selain RTRW Provinsi		0	1	1,800,000,000	3	3,100,000,000	3	4,000,000,000	7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi		150	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	300	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		26.11%	27.65%		27.88%		28.22%		28.22%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi		1	0	-	1	1,000,000, 000	2	3,000,00 0,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar		1	0	-	0	-	1	1,500,00 0,000	1 Peta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota		2	4	500,000,00 0	3	500,000,0 00	3	500,000, 000	10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota		1	1	500,000,00 0	1	500,000,0 00	1	500,000, 000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		0	1	500,000,00 0	1	500,000,0 00	1	500,000, 000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		0	25	350,000,000	25	350,000,000	25	350,000,000	75	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat		1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		25.02%	26.50%		26.73%		27.06%		27.06%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		0	6	600,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		0	6	350,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000	18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		0	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Penataan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		1	2	1,900,000,000	2	1,500,000,000	3	1,800,000,000	7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		1	5	1,250,000,000	4	1,100,000,000	4	1,150,000,000	13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		14.93%	15.81%		15.94%		16.14%		16.14%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi Pelaksaaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1	1	1,400,000,000	1	400,000,000	1	1,400,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang		0	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif		0	0	-	1	800,000,000	0	-	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang		0	1	800,000,000	1	750,000,000	1	800,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		0	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi		8940 Ha	9460 Ha		9730 Ha		10030 Ha		10030 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Panjang pantai kritis yang ditangani		0,45 Km	2,80 Km		0,33 Km		0,63 Km		4,71 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih		239 liter/detik	94 liter/detik		60 liter/detik		50 liter/detik		443 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan		87,4 Ha	70 Ha		140 Ha		210 Ha		210 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani		0 Unit	6 Unit		3 Unit		1 Unit		10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Panjang segmen sungai yang ditangani		5158 meter	5480 meter		4801.86 meter		7669.29 meter		17951.15 meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

	Pantai Kritis yang ditangani		1 Lokasi	7 Lokasi		6 Lokasi		6 Lokasi		19 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		0.5 KM	0.5 KM	500,000,000	0.5 KM	500,000,000	0.5 KM	500,000,000	0.5 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0099 Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi		2 KM	1.25 KM	1,000,000,000	1.25 KM	1,500,000,000	1.25 KM	1,500,000,000	1.25 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[SUB KEGIATAN] 1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	500,000,000	3 Unit	500,000,000	3 Unit	500,000,000	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (UPTD 2)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				500,000,000		500,000,000		500,000,000		
1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		7 Dokumen	15 Dokumen	28,800,000,000	3 Dokumen	6,400,000,000	1 Dokumen	5,000,000,000	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		14 Dokumen	14 Dokumen	6,824,500,000	10 Dokumen	4,750,000,000	3 Dokumen	2,250,000,000	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	5,000,000,000	3 Unit	20,550,000,000	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun		0 Titik	5 Titik	20,550,000,000	3 Titik	6,600,000,000	0 Titik	-	0 Titik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0123 Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun		0 Unit	1 Unit	28,550,000,000	1 Unit	36,000,000,000	1 Unit	14,550,000,000	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0086 Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun		0 KM	0.2 KM	6,550,000,000	0 KM	-	0 KM	-	0 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0.45 KM	2.68 KM	82,100,000,000	0.34 KM	22,250,000,000	0.63 KM	32,943,992,882	0.63 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		5.16 KM	5.48 KM	42,800,000,000	4.8 KM	25,000,000,000	7.67 KM	41,123,018,385	7.67 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	1 Dokumen	758,995,000	1 Dokumen	758,995,000	1 Dokumen	758,995,000	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		10 Lembaga	6 Lembaga	6,855,736,980	6 Lembaga	2,097,411,700	6 Lembaga	2,097,411,700	6 Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		3 Dokumen	1 Dokumen	349,956,000	1 Dokumen	349,956,000	1 Dokumen	349,956,000	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		1 Lembaga	1 Lembaga	277,289,700	1 Lembaga	277,289,700	1 Lembaga	277,289,700	1 Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik		2014 meter	1940 meter		3838.46 meter		5387.17 meter		11165.63 meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		32 KM	32 KM	5,000,000,000	32 KM	5,000,000,000	32 KM	5,000,000,000	32 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		3 Dokumen	8 Dokumen	4,400,000,000	7 Dokumen	2,300,000,000	2 Dokumen	1,400,000,000	2 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		59.31 KM	59.08 KM	96,350,000,000	59.76 KM	39,400,000,000	60.21 KM	43,700,000,000	60.21 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi		0 KM	0.16 KM	4,400,000,000	1.38 KM	6,200,000,000	2.48 KM	10,200,000,000	2.48 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota		39.15 %	57.65 %		83.40 %		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani		2 Unit	3 Unit		5 Unit		3 Unit		13 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	800,000,000	10 Kabupaten/Kota	800,000,000	10 Kabupaten/Kota	800,000,000	10 Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		3 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	450,000,000	5 Kabupaten/Kota	450,000,000	5 Kabupaten/Kota	450,000,000	5 Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun		0 Liter/Detik	70 Liter/Detik	156,030,000,000	70 Liter/Detik	186,851,696,848	85 Liter/Detik	202,794,621,588	225 Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		2 Dokumen	7 Dokumen	8,220,000,000	4 Dokumen	5,550,000,000	5 Dokumen	7,100,000,000	18 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik		10.00 %	17.50 %		25.00 %		40.00 %		40.00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		5 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		25 Orang	25 Orang	550,000,000	25 Orang	500,000,000	25 Orang	500,000,000	100 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	500,000,000	2 Dokumen	1,000,000,000	5 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota		17.50 %	32.50 %		42.00 %		46.00 %		46.00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional		1 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05.1.01.0016 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		2 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota	-	2 kabupaten/kota	650,000,000	2 kabupaten/kota	7,882,011,690	2 kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		25 Orang	25 Orang	1,250,000,000	25 Orang	750,000,000	25 Orang	500,000,000	100 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		1 Dokumen	3 Dokumen	2,250,000,000	2 Dokumen	2,100,000,000	1 Dokumen	500,000,000	7 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi		0%	50%		75%		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur		0 kawasan	4 kawasan		2 kawasan		2 kawasan		8 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.07.1.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi		0 Unit	4 Unit	30,000,000,000	2 Unit	40,000,000,000	2 Unit	40,000,000,000	8 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Kawasan yang Ditata		16.67 %	50%		66.67 %		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		2 kawasan	3 kawasan		1 kawasan		2 kawasan		8 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan		10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	200,000,000	10 kabupaten/kota	200,000,000	10 kabupaten/kota	200,000,000	10 kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		2 Kawasan	3 Kawasan	30,700,000,000	1 Kawasan	13,000,000,000	2 Kawasan	20,000,000,000	8 Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		2 Dokumen	4 Dokumen	7,500,000,000	2 Dokumen	3,800,000,000	3 Dokumen	4,300,000,000	11 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		0 Dokumen	2 Dokumen	1,600,000,000	2 Dokumen	3,000,000,000	1 Dokumen	500,000,000	5 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru		0 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan		2 Ruas Jalan		4 Ruas Jalan		4 Ruas Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi		77.52%	82.09%		86.23%		93.53%		93.53%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap		693,86 Km	754,55 Km		792,61 Km		859,71 Km		859,71 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Baru Yang Terbangun		13,95 Km	26 Km		43,50 Km		67,80 Km		67,80 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		91 KM	67 KM	69,021,502,519	69 KM	117,851,432,000	74,20 KM	131,643,432,000	74,20 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		10 KM	11,30 KM	46,714,228,981	11,30 KM	62,122,122,900	11,80 KM	57,725,935,000	11,80 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		50 Jembatan	56 Jembatan	13,660,700,500	56 Jembatan	10,877,877,100	56 Jembatan	20,070,065,000	56 Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		33 Dokumen	25 Dokumen	22,600,000,000	30 Dokumen	25,600,000,000	30 Dokumen	25,600,000,000	85 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		0 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		895,09 KM	895,09 KM	2,900,000,000	895,09 KM	2,900,000,000	895,09 KM	2,900,000,000	895,09 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		13,95 KM	14,50 KM	248,500,000,000	17,50 KM	528,500,000,000	24,30 KM	1,144,500,000,000	56,30 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		0 KM	6 KM	45,000,000,000	8 KM	60,000,000,000	8 KM	60,000,000,000	22 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		48 KM	57,40 KM	740,477,261,683	112 KM	1,443,430,917,267	126 KM	1,619,818,729,410	295,40 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		2 Jembatan	6 Jembatan	68,900,000,000	6 Jembatan	186,000,000,000	6 Jembatan	80,500,000,000	18 Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi		895,09 KM	895,09 KM	40,000,000,000	895,09 KM	50,000,000,000	895,09 KM	50,000,000,000	895,09 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[TUJUAN] Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung		0,4 Indeks	3,41 Indeks		4,98 Indeks		6,85 Indeks		6,85 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas		6,10 Indeks	7,19 Indeks		8,04 Indeks		8,89 Indeks		8,89 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

[SASARAN] Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung		1,45 Indeks	2,26 Indeks		3,00 Indeks		4,93 Indeks		7,37 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		55.02%	56.84%		53.03%		76.87%		76.87%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan		25%	33.32 %		47.89 %		62.46 %		62.46 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		0 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		6 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		0 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000,000	2 Dokumen	2,000,000,000	2 Dokumen	2,000,000,000	6 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun		0 Unit	0 Unit	-	100 Unit		100 Unit		200 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	-	100 Unit Rumah	23,900,876,170	100 Unit Rumah	27,900,876,170	200 Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		0 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		0 Laporan	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830	3 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		11.46 Ha	108.01 Ha		156.59 Ha		203.75 Ha		203.75 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		0 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		12 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		0 Laporan	4 Laporan	1,761,706,400	4 Laporan	1,855,508,000	4 Laporan	1,761,706,400	12 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani		11.46 Hektar	96.55 Hektar		48.58 Hektar		47.16 Hektar		203.75 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar		11.46 Ha	96.55 Ha	146,765,937,600	48.58 Ha	94,068,092,000	47.16 Ha	140,238,293,600	203.75 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		0 Laporan	5 Laporan	2,171,200,000	1 Laporan	426,400,000	0 Laporan	-	6 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman		17.06 %	22.40 %		52.57 %		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman		0 Lokasi	10 Lokasi		6 Lokasi		7 Lokasi		23 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05.1.01.0006 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan		0 Lokasi	10 Lokasi	48,562,490,000	6 Lokasi	40,000,000,000	7 Lokasi	40,000,000,000	23 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		0 Dokumen	8 Dokumen	2,437,510,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	8 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[TUJUAN] Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung		0,4 Indeks	3,41 Indeks		4,98 Indeks		6,85 Indeks		6,85 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas		6,10 Indeks	7,19 Indeks		8,04 Indeks		8,89 Indeks		8,89 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[SASARAN] Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung		1,45 Indeks	2,26 Indeks		3,00 Indeks		4,93 Indeks		4,93 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		55.02%	56.84%		53.03%		76.87%		76.87%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		11.46 Ha	108.01 Ha		156.59 Ha		203.75 Ha		203.75 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani		11.46 Hektar	96.55 Hektar		48.58 Hektar		47.16 Hektar		203.75 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		0 Unit Rumah	1000 Unit Rumah	29,301,156,000	1000 Unit Rumah	20,000,000,000	1000 Unit Rumah	20,000,000,000	3000 Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[URUSAN] NON URUSAN											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[TUJUAN] Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah		84,60 Poin	85,00 Poin		85,50 Poin		86,00 Poin		86,00 Poin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		78,25 Poin	78,50 Poin		79,30 Poin		80,01 Poin		80,01 Poin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[SASARAN] Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		82,09 Poin	82,20 Poin		82,44 Poin		82,70 Poin		82,70 Poin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		60,05 Poin	65,00 Poin		67,00 Poin		71,00 Poin		71,00 Poin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		70,80 Indeks	72,20 Indeks		74,60 Indeks		77,00 Indeks		77,00 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu (%)		82.00%	83.00%		84.00%		85.00%		85.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	2 Dokumen	500,000,00 0	2 Dokumen	550,000,0 00	2 Dokumen	550,000, 000	6 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	4 Dokumen	200,000,00 0	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000, 000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	4 Dokumen	200,000,00 0	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000, 000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	4 Dokumen	200,000,00 0	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000, 000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	20 Dokumen	500,000,00 0	20 Dokumen	500,000,0 00	20 Dokumen	500,000, 000	60 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4452 orang	52,474,605,845	4452 orang	51,737,545,245	4452 orang	51,737,545,245	13356 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		32 Dokumen	21 Dokumen	3,148,548,000	21 Dokumen	3,148,548,000	21 Dokumen	3,141,048,000	63 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	4 Dokumen	168,000,000	4 Dokumen	168,000,000	4 Dokumen	153,000,000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	4 Dokumen	160,000,000	4 Dokumen	160,000,000	4 Dokumen	145,000,000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan	16 Laporan	196,000,000	16 Laporan	196,000,000	16 Laporan	181,000,000	48 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	15 Dokumen	147,000,000	15 Dokumen	147,000,000	14 Dokumen	142,000,000	44 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			16 Dokumen	154,500,000	16 Dokumen	154,500,000	16 Dokumen	152,000,000	48 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			16 Dokumen	195,000,000	16 Dokumen	195,000,000	16 Dokumen	190,000,000	48 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			16 Dokumen	148,000,000	16 Dokumen	148,000,000	16 Dokumen	148,000,000	48 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		274 Paket	47 Paket	1,475,845,700	42 Paket	1,240,945,700	46 Paket	1,425,845,700	135 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		76 orang	56 orang	533,000,000	50 orang	478,000,000	56 orang	523,000,000	162 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		200 orang	200 orang	300,000,000	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000	400 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3 Dokumen	16 Dokumen	155,000,000	16 Dokumen	155,000,000	16 Dokumen	155,000,000	48 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	15 Dokumen	180,000,000	15 Dokumen	180,000,000	15 Dokumen	180,000,000	45 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 orang	111 orang	706,775,000	111 orang	706,775,000	84 orang	633,933,027	306 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		19 Paket	12 Paket	222,377,973	12 Paket	222,377,973	12 Paket	222,377,973	34 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		52 Paket	21 Paket	1,040,242,200	18 Paket	715,142,200	20 Paket	889,742,200	59 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	130,000,000	4 Paket	130,000,000	4 Paket	130,000,000	12 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		40 Paket	14 Paket	538,318,131	14 Paket	511,392,500	14 Paket	511,392,500	42 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		407 Paket	210 Paket	606,642,808	210 Paket	626,642,808	210 Paket	656,642,808	630 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Barang, Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		39 Paket	20 Paket	508,104,745	20 Paket	481,008,000	20 Paket	428,104,745	58 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		85 Dokumen	74 Dokumen	21,167,000	74 Dokumen	21,167,000	74 Dokumen	21,167,000	220 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		69 Laporan	69 Laporan	3,763,064,000	69 Laporan	3,963,064,000	69 Laporan	3,797,174,000	165 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	5 Dokumen	554,200,000	5 Dokumen	104,200,000	5 Dokumen	104,200,000	13 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	13 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	2 unit	100,000,000	2 unit	100,000,000	2 unit	100,000,000	6 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		28 unit	11 unit	1,525,220,000	10 unit	1,392,610,000	10 unit	1,392,610,000	15 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		14 unit	0	-	1 unit	1,200,000,000	0	-	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		21 unit	21 unit	420,000,000	21 unit	-	21 unit	420,000,000	21 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		110 unit	88 unit	752,200,000	90 unit	852,200,000	88 unit	752,200,000	200 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		49 Laporan	49 Laporan	168,169,200	49 Laporan	168,169,200	49 Laporan	168,169,200	145 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		84 Laporan	84 Laporan	3,860,906,321	84 Laporan	3,436,434,155	84 Laporan	3,184,190,155	180 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	1 Laporan	1,385,200	1 Laporan	1,385,200	1 Laporan	1,385,200	3 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		113 Laporan	60 Laporan	27,938,215,925	60 Laporan	27,580,912,525	60 Laporan	27,911,432,125	156 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		202 unit	141 unit	1,434,202,000	139 unit	1,334,202,000	141 unit	1,434,202,000	317 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		66 unit	81 unit	2,466,519,827	81 unit	2,090,809,427	82 unit	2,639,862,555	82 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		259 unit	211 unit	1,299,195,009	211 unit	1,292,095,100	211 unit	1,292,095,100	211 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 unit	36 unit	3,002,799,000	36 unit	2,222,799,000	36 unit	2,072,799,000	36 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	10 unit	2,688,359,000	10 unit	2,688,359,000	10 unit	2,500,000,000	10 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 unit	6 unit	42,264,992	6 unit	42,264,992	6 unit	42,264,992	6 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 unit	17 unit	220,000,000	17 unit	120,000,000	17 unit	120,000,000	17 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan selama 3 (tiga) tahun serta berbagai kebijakan pembangunan lainnya terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas PUPRPR Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya pembangunan sarana prasarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang adil dan merata.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas PUPRPR dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sangat perlu untuk mengedepankan aspek perencanaan beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan, dan subkegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2024 sampai dengan 2026.
3. Kepala Dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

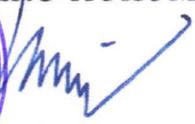
Pelaksanaan Renstra akan didukung oleh berbagai pihak terkait baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Renstra ini diharapkan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009